



LAPORAN KINERJA TAHUN 2020



**PANGKALAN PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
LAMPULO**

**DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
2020**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (Laporan Kinerja) UPT Pangkalan PSDKP Lampulo merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta target kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020. Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Instansi Pemerintah serta bagian dari perwujudan transparansi dan akuntabilitas UPT Pangkalan PSDKP Lampulo dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam kaitannya dengan terselenggaranya *good governance*.

Laporan Kinerja (Laporan Kinerja) Tahun 2020 Pangkalan PSDKP Lampulo memberikan gambaran terhadap capaian kinerja selama tahun 2020, dari aktivitas kegiatan yang telah menjadi target pada tahun tersebut. Dalam Laporan Kinerja ini juga menjabarkan langkah-langkah tindak lanjut dalam rangka perbaikan capaian ke depan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Saran dan masukan dalam rangka perbaikan laporan ini di masa datang sangat kami harapkan. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan aktif, sehingga laporan kinerja ini dapat disusun dan diterbitkan.

Banda Aceh, 10 Januari 2021

Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan Lampul



Basri, A.Pi, M.Si

NIP. 19750713 199803 1 003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Instansi Pemerintah, maka disusun Laporan Kinerja (Laporan Kinerja) Tahun 2020 UPT Pangkalan PSDKP Lampulo. Laporan Kinerja ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja UPT Pangkalan PSDKP Lampulo yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan RKT tahun 2020.

Sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja, untuk tahun 2020 terhadap 14 Sasaran Strategis dan 24 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dilaksanakan oleh UPT Pangkalan PSDKP Lampulo sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap kinerja yang akan dilaksanakan.

Hasil pengukuran capaian kinerja UPT Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2020, diperoleh Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 108,37 dengan uraian 2 (dua) IKU berwarna kuning, yakni IKU 10. Jumlah hari Operasi Kapal Pengawas Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo dan IKU 22. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo.

Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Pangkalan PSDKP Lampulo tahun 2020 mengalami revisi anggaran, dari yang semula sebesar Rp. 25.931.557.000,00 (Dua Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah), setelah mengalami revisi anggaran menjadi Rp. 19.685.586.000,00 (Sembilan Belas Miliar Enam ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah). Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, anggaran tersebut telah terserap sebesar Rp 18.618.013.434,00 atau bila dipersentasikan sebesar 94,58%. Data tersebut diambil dari Penyerapan Anggaran pada Aplikasi SAS. Melalui Laporan Kinerja (Laporan Kinerja) Tahun 2020 ini, diharapkan menjadi bahan masukan untuk perbaikan kinerja di Triwulan berikut, sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dalam RKT dan dokumen Perjanjian Kinerja dapat tercapai.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Isu Aktual pada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	2
1. Bidang Perikanan Tangkap.....	2
2. Bidang Perikanan Budidaya.....	2
3. Bidang Pengolahan Hasil Perikanan.....	2
4. Bidang Pemasaran Hasil Perikanan.....	2
5. Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.....	2
D. Tugas dan Fungsi Pangkalan PSDKP Lampulo	3
1. Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
2. Struktur Organisasi.....	3
E. Sistematika Penyajian	6
BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN	7
A. Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 – 2024	7
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	11
C. Pengukuran Kinerja Tahun 2020	14
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2020	15
1. Capaian Sasaran Strategis (SS) Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2020.....	15
2. Capaian Indikator Kinerja Utama Pengawasan SDKP Tahun 2020.....	16

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	19
Sasaran Strategis 1: Terselenggaranya Tindak Lanjut Atas Laporan	
Pengaduan POKMASWAS	19
IKU-1: “Persentase Tindak Lanjut Informasi Pokmaswas Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	19
Sasaran Strategis 2: Terselenggaranya Pengawasan Pemangku Kepentingan Kelautan.....	22
IKU-2: “Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang Diperiksa Kepatuhan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	22
Sasaran Strategis 3: Terselenggaranya Pengawasan Kepatuhan Pemangku Kepentingan Perikanan.....	38
IKU-3: “Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang Diperiksa Kepatuhan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo.....	38
1.) Persentase Kapal Perikanan yang Diperiksa Kepatuhan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	40
2.) Persentase Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang Diperiksa Kepatuhan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	41
3.) Persentase Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Diperiksa Kepatuhan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo.....	44
4.) Persentase Unit Usaha Distribusi Hasil Perikanan yang Diperiksa Kepatuhan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	47
Sasaran Strategis-4: Terselenggaranya Pemantauan SDKP Menggunakan Kapal Pengawas	50
IKU-4: “Persentase Cakupan WPP-NRI yang Dipantau Menggunakan Kapal Pengawas Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo.....	50
Sasaran Strategis-5: Terselenggaranya Pemantauan SDKP Menggunakan Speed Boat / Rigid Inflatable Boat/ Rubber Boat	51
IKU-5: “Persentase Cakupan WPP-NRI yang Dipantau dari Kegiatan Illegal Fishing Melalui Operasional <i>Speed Boat / Rigid Inflatable Boat / Rubber Boat</i> Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	51
Sasaran Strategis-6: Terselenggaranya Pemantauan SDKP Melalui Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP).....	53
IKU-6: “Persentase Kesiapan Sistem Pemantauan SDKP”	53
Sasaran Strategis-7: Terselenggaranya Perawatan Kapal Pengawas.....	54

IKU-7: “Jumlah Kapal Pengawas yang Siap Operasi Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	54
Sasaran Strategis-8: Terselenggaranya Perawatan Speed Boat Pengawas...	56
IKU-8: “Jumlah Speed Boat yang Siap Operasi Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	56
Sasaran Strategis-9: Terselenggaranya Operasi Kapal Pengawas.....	58
IKU-9“Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa di Laut Menggunakan Kapal Pengawas”	58
IKU-10: “Jumlah Hari Operasi Kapal Pengawas Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	59
Sasaran Strategis-10: Terselenggaranya Operasi Speed Boat Pengawas.....	61
IKU-11: Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa di Laut Menggunakan <i>Speed Boat</i> Pengawas.....	61
IKU-12: “Jumlah Hari <i>Operasi Speed Boat / Rigid Infkatable Boat / Rubber Boat</i> Pengawas Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	62
Sasaran Strategis-11: Terselenggaranya Awak Kapal Pengawas Perikanan yang Memenuhi Kualifikasi Kesehatan	63
IKU-13: “Jumlah Awak Kapal Pengawas Perikanan yang Memperoleh Pemeriksaan Kesehatan Rutin Tahunan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	63
Sasaran Strategis-12: Terselenggaranya Penyidikan TPKP.....	64
IKU-14: “Persentase Penyelesaian Administrasi Penyidikan, Pemanggilan, Dan Pemeriksaan Tersangka serta Saksi TPKP Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	64
Sasaran Strategis-13: Terselenggaranya Penanganan Barbuk dan Awak Kapal	66
IKU-15: “Persentase Penyelesaian Penanganan Barang Bukti Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	66
IKU-16: “Persentase Penyelesaian Penanganan Awak Kapal Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	68
Sasaran Strategis-14: Tata kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo.....	70
IKU-17: “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	70

IKU-18: “Persentase Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen Satker Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	71
IKU-19: “Persentase Pemenuhan Layanan Sarana dan Prasarana Internal Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	72
IKU-20: “Persentase Pemenuhan Layanan Perkantoran Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	73
IKU-21: “Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	73
IKU-22: “Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	74
IKU-23: “Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	75
IKU-24: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	77
C. Akuntabilitas Keuangan	79
BAB IV. PENUTUP	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Rekomendasi	80
C. LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo (Revisi September) Tahun 2020.....	12
Tabel 3.1. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2020.....	15
Tabel 3.2. Hasil Pengukuran Kinerja Pangkalan PSDKP Tahun 2020.....	16
Tabel 3.3. Hasil Capaian IKU “Persentase Tindak Lanjut Informasi Pokmaswas Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”.....	19
Tabel 3.4. Hasil Capaian IKU “Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang Diperiksa Kepatuhanannya Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	22
Tabel 3.5. Rincian Capaian IKU “Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang Diperiksa Kepatuhanannya Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	23
Tabel 3.6. Hasil Capaian IKU “Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang Diperiksa Kepatuhanannya Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	39
Tabel 3.7. Rincian Capaian IKU “Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang Diperiksa Kepatuhanannya Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	39
Tabel 3.8. Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa Kepatuhanannya Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	40
Tabel 3.9. Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang Diperiksa Kepatuhanannya Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo.....	41
Tabel 3.10. Jumlah Pelaku Usaha Pembudidayaan Ikan yang Diperiksa Kepatuhanannya Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	44
Tabel 3.11. Komponen IKU “Persentase Unit Usaha Distribusi Hasil Perikanan yang Diperiksa Kepatuhanannya” Melalui Pemeriksaan Distribusi Hasil Perikanan Ekspor.....	47
Tabel 3.12. Komponen IKU “Persentase Unit Usaha Distribusi Hasil Perikanan Ikan yang Diperiksa Kepatuhanannya Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” Melalui Pemeriksaan Distribusi Hasil Perikanan Impor	48
Tabel 3.13. Komponen IKU “Persentase Unit Usaha Distribusi Hasil Perikanan Ikan yang Diperiksa Kepatuhanannya Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” Melalui Pemeriksaan Distribusi Hasil Perikanan Dalam Negeri	49
Tabel 3.14. Hasil Capaian IKU “Persentase Cakupan WPP-NRI yang Dipantau Menggunakan Kapal Pengawas Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	51

Tabel 3.15. Hasil Capaian IKU “Persentase Cakupan WPP-NRI yang Dipantau dari Kegiatan <i>Illegal Fishing</i> Melalui Operasional <i>Speed Boat / Rigid Inflatable Boat / Rubber Boat</i> Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	52
Tabel 3.16. Hasil Capaian IKU “Persentase Kesiapan Sistem Pemantauan SDKP”	53
Tabel 3.17. Hasil capaian IKU “Jumlah Kapal Pengawas yang Siap Operasi Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	54
Tabel 3.18. Hasil Capaian IKU “Jumlah <i>Speed Boat</i> yang Siap Operasi Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	56
Tabel 3.19. <i>Speed Boat</i> Pengawas yang Siap Operasi Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	57
Tabel 3.20. Hasil Capaian IKU “Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa di Laut Menggunakan Kapal Pengawas”	59
Tabel 3.21. Hasil Capaian IKU “Jumlah Hari Operasi Kapal Pengawas Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	60
Tabel 3.22. Hasil Capaian IKU “Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa di Laut Menggunakan <i>Speed Boat / Rigid Inflatable Boat / Rubber Boat</i> Pengawas...”	61
Tabel 3.23. Hasil Capaian IKU “Jumlah Hari Operasi <i>Speed Boat / Rigid Inflatable Boat / Rubber Boat</i> Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	62
Tabel 3.24. Hasil Capaian IKU “Jumlah Awak Kapal Pengawas Perikanan yang Memperoleh Pemeriksaan Kesehatan Rutin Tahunan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	63
Tabel 3.25. Hasil Capaian IKU “Persentase Penyelesaian Administrasi Penyidikan, Pemanggilan, dan Pemeriksaan Tersangka serta Saksi TPKP Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	65
Tabel 3.26. Penyelesaian Administrasi Penyidikan Terhadap Kasus Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	65
Tabel 3.27. Hasil Capaian IKU “Persentase Penyelesaian Penanganan Barang Bukti Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	66
Tabel 3.28. Rincian Kondisi Barang Bukti pada Kasus Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	67
Tabel 3.29. Hasil Capaian IKU “Persentase Penyelesaian Penanganan Awak Kapal Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	68
Tabel 3.30. Informasi Awak Kapal pada Kasus Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	68

Tabel 3.31. Hasil Capaian IKU “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Surat Laik Operasi) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo.....	70
Tabel 3.32. Hasil Capaian IKU “Persentase Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen Satker Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”.....	71
Tabel 3.33. Hasil Capaian IKU “Persentase Pemenuhan Layanan Sarana dan Prasarana Internal Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”.....	72
Tabel 3.34. Hasil Capaian IKU “Persentase Pemenuhan Layanan Perkantoran Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”.....	73
Tabel 3.35. Hasil Capaian IKU “Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo.....	74
Tabel 3.36. Hasil Capaian IKU “Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”.....	75
Tabel 3.37. Hasil Capaian IKU “Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo.....	76
Tabel 3.38. Hasil Capaian IKU “Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	77
Tabel 3.39. Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (Reaktivasi) Tahun 2020	77
Tabel 3.40. Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Lampulo sampai dengan Bulan Desember Tahun 2020.....	79
Tabel 4.1. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2020	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Pangkalan Pengawasan SDKP Lampulo	4
Gambar 1.2. Wilayah Kerja Pangkalan PSDKP Lampulo.....	6
Gambar 2.1. Kapal Pengawas Hiu-12.....	55
Gambar 2.2. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar	76

RINGKASAN EKSEKUTIF

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Instansi Pemerintah, maka disusun Laporan Kinerja (Laporan Kinerja) Tahun 2020 UPT Pangkalan PSDKP Lampulo. Laporan Kinerja ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja UPT Pangkalan PSDKP Lampulo yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan RKT tahun 2020.

Sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja, untuk tahun 2020 terhadap 14 Sasaran Strategis dan 24 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dilaksanakan oleh UPT Pangkalan PSDKP Lampulo sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap kinerja yang akan dilaksanakan.

Hasil pengukuran capaian kinerja UPT Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2020, diperoleh Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 108,37 dengan uraian 2 (dua) IKU berwarna kuning, yakni IKU 10. Jumlah hari Operasi Kapal Pengawas Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo dan IKU 22. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo.

Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Pangkalan PSDKP Lampulo tahun 2020 mengalami revisi anggaran, dari yang semula sebesar Rp. 25.931.557.000,00 (Dua Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah), setelah mengalami revisi anggaran menjadi Rp. 19.685.586.000,00 (Sembilan Belas Miliar Enam ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah). Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, anggaran tersebut telah terserap sebesar Rp 18.618.013.434,00 atau bila dipersentasikan sebesar 94,58%. Data tersebut diambil dari Penyerapan Anggaran pada Aplikasi SAS. Melalui Laporan Kinerja (Laporan Kinerja) Tahun 2020 ini, diharapkan menjadi bahan masukan untuk perbaikan kinerja di Triwulan berikut, sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dalam RKT dan dokumen Perjanjian Kinerja dapat tercapai.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Isu Aktual pada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	2
1. Bidang Perikanan Tangkap.....	2
2. Bidang Perikanan Budidaya.....	2
3. Bidang Pengolahan Hasil Perikanan.....	2
4. Bidang Pemasaran Hasil Perikanan.....	2
5. Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.....	2
D. Tugas dan Fungsi Pangkalan PSDKP Lampulo	3
1. Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
2. Struktur Organisasi.....	3
E. Sistematika Penyajian	6
BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN	7
A. Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 – 2024	7
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	11
C. Pengukuran Kinerja Tahun 2020	14
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2020	15
1. Capaian Sasaran Strategis (SS) Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2020.....	15
2. Capaian Indikator Kinerja Utama Pengawasan SDKP Tahun 2020.....	16

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	19
Sasaran Strategis 1: Terselenggaranya Tindak Lanjut Atas Laporan	
Pengaduan POKMASWAS	19
IKU-1: “Persentase Tindak Lanjut Informasi Pokmaswas Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	19
Sasaran Strategis 2: Terselenggaranya Pengawasan Pemangku Kepentingan Kelautan.....	22
IKU-2: “Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang Diperiksa Kepatuhan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	22
Sasaran Strategis 3: Terselenggaranya Pengawasan Kepatuhan Pemangku Kepentingan Perikanan.....	38
IKU-3: “Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang Diperiksa Kepatuhan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo.....	38
1.) Persentase Kapal Perikanan yang Diperiksa Kepatuhan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	40
2.) Persentase Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang Diperiksa Kepatuhan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	41
3.) Persentase Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Diperiksa Kepatuhan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo.....	44
4.) Persentase Unit Usaha Distribusi Hasil Perikanan yang Diperiksa Kepatuhan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	47
Sasaran Strategis-4: Terselenggaranya Pemantauan SDKP Menggunakan Kapal Pengawas	50
IKU-4: “Persentase Cakupan WPP-NRI yang Dipantau Menggunakan Kapal Pengawas Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo.....	50
Sasaran Strategis-5: Terselenggaranya Pemantauan SDKP Menggunakan Speed Boat / Rigid Inflatable Boat/ Rubber Boat	51
IKU-5: “Persentase Cakupan WPP-NRI yang Dipantau dari Kegiatan Illegal Fishing Melalui Operasional <i>Speed Boat / Rigid Inflatable Boat / Rubber Boat</i> Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	51
Sasaran Strategis-6: Terselenggaranya Pemantauan SDKP Melalui Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP).....	53
IKU-6: “Persentase Kesiapan Sistem Pemantauan SDKP”	53
Sasaran Strategis-7: Terselenggaranya Perawatan Kapal Pengawas.....	54

IKU-7: “Jumlah Kapal Pengawas yang Siap Operasi Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	54
Sasaran Strategis-8: Terselenggaranya Perawatan Speed Boat Pengawas...	56
IKU-8: “Jumlah Speed Boat yang Siap Operasi Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	56
Sasaran Strategis-9: Terselenggaranya Operasi Kapal Pengawas.....	58
IKU-9“Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa di Laut Menggunakan Kapal Pengawas”	58
IKU-10: “Jumlah Hari Operasi Kapal Pengawas Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	59
Sasaran Strategis-10: Terselenggaranya Operasi Speed Boat Pengawas.....	61
IKU-11: Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa di Laut Menggunakan <i>Speed Boat</i> Pengawas.....	61
IKU-12: “Jumlah Hari <i>Operasi Speed Boat / Rigid Infkatable Boat / Rubber Boat</i> Pengawas Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	62
Sasaran Strategis-11: Terselenggaranya Awak Kapal Pengawas Perikanan yang Memenuhi Kualifikasi Kesehatan	63
IKU-13: “Jumlah Awak Kapal Pengawas Perikanan yang Memperoleh Pemeriksaan Kesehatan Rutin Tahunan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	63
Sasaran Strategis-12: Terselenggaranya Penyidikan TPKP.....	64
IKU-14: “Persentase Penyelesaian Administrasi Penyidikan, Pemanggilan, Dan Pemeriksaan Tersangka serta Saksi TPKP Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	64
Sasaran Strategis-13: Terselenggaranya Penanganan Barbuk dan Awak Kapal	66
IKU-15: “Persentase Penyelesaian Penanganan Barang Bukti Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	66
IKU-16: “Persentase Penyelesaian Penanganan Awak Kapal Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	68
Sasaran Strategis-14: Tata kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo.....	70
IKU-17: “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	70

IKU-18: “Persentase Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen Satker Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	71
IKU-19: “Persentase Pemenuhan Layanan Sarana dan Prasarana Internal Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	72
IKU-20: “Persentase Pemenuhan Layanan Perkantoran Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	73
IKU-21: “Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	73
IKU-22: “Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	74
IKU-23: “Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	75
IKU-24: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	77
C. Akuntabilitas Keuangan	79
BAB IV. PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Rekomendasi	80
C. LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo (Revisi September) Tahun 2020.....	12
Tabel 3.1. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2020.....	15
Tabel 3.2. Hasil Pengukuran Kinerja Pangkalan PSDKP Tahun 2020.....	16
Tabel 3.3. Hasil Capaian IKU “Persentase Tindak Lanjut Informasi Pokmaswas Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”.....	19
Tabel 3.4. Hasil Capaian IKU “Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang Diperiksa Kepatuhanannya Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	22
Tabel 3.5. Rincian Capaian IKU “Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang Diperiksa Kepatuhanannya Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	23
Tabel 3.6. Hasil Capaian IKU “Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang Diperiksa Kepatuhanannya Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	39
Tabel 3.7. Rincian Capaian IKU “Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang Diperiksa Kepatuhanannya Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	39
Tabel 3.8. Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa Kepatuhanannya Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	40
Tabel 3.9. Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang Diperiksa Kepatuhanannya Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo.....	41
Tabel 3.10. Jumlah Pelaku Usaha Pembudidayaan Ikan yang Diperiksa Kepatuhanannya Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	44
Tabel 3.11. Komponen IKU “Persentase Unit Usaha Distribusi Hasil Perikanan yang Diperiksa Kepatuhanannya” Melalui Pemeriksaan Distribusi Hasil Perikanan Ekspor.....	47
Tabel 3.12. Komponen IKU “Persentase Unit Usaha Distribusi Hasil Perikanan Ikan yang Diperiksa Kepatuhanannya Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” Melalui Pemeriksaan Distribusi Hasil Perikanan Impor	48
Tabel 3.13. Komponen IKU “Persentase Unit Usaha Distribusi Hasil Perikanan Ikan yang Diperiksa Kepatuhanannya Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” Melalui Pemeriksaan Distribusi Hasil Perikanan Dalam Negeri	49
Tabel 3.14. Hasil Capaian IKU “Persentase Cakupan WPP-NRI yang Dipantau Menggunakan Kapal Pengawas Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	51

Tabel 3.15. Hasil Capaian IKU “Persentase Cakupan WPP-NRI yang Dipantau dari Kegiatan <i>Illegal Fishing</i> Melalui Operasional <i>Speed Boat / Rigid Inflatable Boat / Rubber Boat</i> Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	52
Tabel 3.16. Hasil Capaian IKU “Persentase Kesiapan Sistem Pemantauan SDKP”	53
Tabel 3.17. Hasil capaian IKU “Jumlah Kapal Pengawas yang Siap Operasi Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	54
Tabel 3.18. Hasil Capaian IKU “Jumlah <i>Speed Boat</i> yang Siap Operasi Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	56
Tabel 3.19. <i>Speed Boat</i> Pengawas yang Siap Operasi Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	57
Tabel 3.20. Hasil Capaian IKU “Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa di Laut Menggunakan Kapal Pengawas”	59
Tabel 3.21. Hasil Capaian IKU “Jumlah Hari Operasi Kapal Pengawas Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	60
Tabel 3.22. Hasil Capaian IKU “Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa di Laut Menggunakan <i>Speed Boat / Rigid Inflatable Boat / Rubber Boat</i> Pengawas...”	61
Tabel 3.23. Hasil Capaian IKU “Jumlah Hari Operasi <i>Speed Boat / Rigid Inflatable Boat / Rubber Boat</i> Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	62
Tabel 3.24. Hasil Capaian IKU “Jumlah Awak Kapal Pengawas Perikanan yang Memperoleh Pemeriksaan Kesehatan Rutin Tahunan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	63
Tabel 3.25. Hasil Capaian IKU “Persentase Penyelesaian Administrasi Penyidikan, Pemanggilan, dan Pemeriksaan Tersangka serta Saksi TPKP Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	65
Tabel 3.26. Penyelesaian Administrasi Penyidikan Terhadap Kasus Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	65
Tabel 3.27. Hasil Capaian IKU “Persentase Penyelesaian Penanganan Barang Bukti Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	66
Tabel 3.28. Rincian Kondisi Barang Bukti pada Kasus Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	67
Tabel 3.29. Hasil Capaian IKU “Persentase Penyelesaian Penanganan Awak Kapal Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	68
Tabel 3.30. Informasi Awak Kapal pada Kasus Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	68

Tabel 3.31. Hasil Capaian IKU “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Surat Laik Operasi) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo.....	70
Tabel 3.32. Hasil Capaian IKU “Persentase Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen Satker Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”.....	71
Tabel 3.33. Hasil Capaian IKU “Persentase Pemenuhan Layanan Sarana dan Prasarana Internal Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”.....	72
Tabel 3.34. Hasil Capaian IKU “Persentase Pemenuhan Layanan Perkantoran Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”.....	73
Tabel 3.35. Hasil Capaian IKU “Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo.....	74
Tabel 3.36. Hasil Capaian IKU “Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”.....	75
Tabel 3.37. Hasil Capaian IKU “Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo.....	76
Tabel 3.38. Hasil Capaian IKU “Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	77
Tabel 3.39. Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (Reaktivasi) Tahun 2020	77
Tabel 3.40. Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Lampulo sampai dengan Bulan Desember Tahun 2020.....	79
Tabel 4.1. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2020	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Pangkalan Pengawasan SDKP Lampulo	4
Gambar 1.2. Wilayah Kerja Pangkalan PSDKP Lampulo.....	6
Gambar 2.1. Kapal Pengawas Hiu-12.....	55
Gambar 2.2. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (Laporan Kinerja) UPT Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2020 merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah desiminasi informasi capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan Kinerja ini menginformasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus UPT Pangkalan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo untuk mencapai target kinerja yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana aturan tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam rangka menuju perwujudan “*good governance*”.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Laporan Kinerja UPT Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2020 adalah untuk mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis selama Tahun 2020 kepada para *stakeholders* guna mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi mandat atau amanah. Laporan ini merupakan perwujudan salah satu kewajiban untuk menjawab (*obligation to answer*) tentang apa yang sudah diamanatkan kepada UPT Pangkalan PSDKP Lampulo. Dengan demikian, Laporan Kinerja ini merupakan sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai selama dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang telah diterima.

Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja UPT Pangkalan PSDKP Lampulo dari tahun sebelumnya dan

memperbaiki kinerja ke arah yang lebih baik dimasa mendatang, yang dimulai dari proses perencanaan secara benar, pelaksanaan, dan evaluasinya.

C. Isu Aktual pada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

1. Bidang Perikanan Tangkap

Isu aktual pada bidang perikanan tangkap, antara lain sebagai berikut:

- a. Masih maraknya kegiatan *illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) baik yang dilakukan oleh Kapal Ikan Indonesia (KII) maupun Kapal Ikan Asing (KIA).
- b. Masih maraknya penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan serta merusak sumber daya ikan dan lingkungannya, seperti di wilayah Aceh Barat, Sibolga, dan Bengkulu;
- c. Kurangnya sarana pengawasan di laut;
- d. Kurangnya SDM Pengawas Perikanan untuk melaksanakan kegiatan penegakan hukum, pengawasan penangkapan ikan, dan pengawasan budidaya perikanan.

2. Bidang Perikanan Budidaya

Adapun isu aktual terkait bidang perikanan budidaya adalah belum terdapat kejelasan terkait perizinan budidaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

3. Bidang Pengolahan Hasil Perikanan

Isu yang diambil dari bidang pengolahan hasil perikanan adalah penggunaan bahan pengawet, pemutih, dan bahan lainnya yang membahayakan kesehatan dalam pengolahan ikan.

4. Bidang Pemasaran Hasil Perikanan

Isu aktual pada bidang pemasaran hasil perikanan adalah masih ditemui ikan-ikan yang mengandung formalin di pasar-pasar tradisional.

5. Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Isu aktual pada bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, antara lain sebagai berikut:

- a. Kerusakan terumbu karang akibat penambangan karang dan penggunaan alat tangkap yang merusak habitat ikan, seperti: bom, racun, dan setrum;
- b. Alih fungsi lahan mangrove;
- c. Kegiatan perikanan yang menyebabkan pencemaran perairan pesisir, laut, dan perairan darat.

D. Tugas dan Fungsi Pangkalan PSDKP Lampulo

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pangkalan PSDKP Lampulo merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, UPT Pangkalan PSDKP Lampulo menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

- a) Penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
- b) Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c) Pelaksanaan bimbingan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
- d) Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan;
- e) Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- f) Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- g) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

2. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi (TUSI) organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, maka dalam menjalankan tugasnya, Kepala Pangkalan membawahi Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran, dan Seksi Sarana dan Prasarana, serta membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun gambaran terkait Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Lampulo, disajikan pada gambar berikut:



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Lampulo

Struktur organisasi Pangkalan PSDKP Lampulo, masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan, yang diuraikan sebagai berikut:

a) Kepala Pangkalan

Tugas dan kewenangan dari Kepala Pangkalan, yaitu merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial dibidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan di lingkungan UPT Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

b) Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Tugas dan kewenangan dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha, yaitu melakukan penyiapan bahan Penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, kepegawaian, dan jabatan fungsional, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.

c) Kepala Seksi Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran

Tugas dan kewenangan dari Kepala Seksi Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran, yaitu melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas), serta evaluasi, dokumentasi, informasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan.

d) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana

Tugas dan kewenangan dari Kepala Seksi Sarana dan Prasarana, yaitu melakukan pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan, dan perencanaan dan pengembangan pengawasan kapal pengawas.

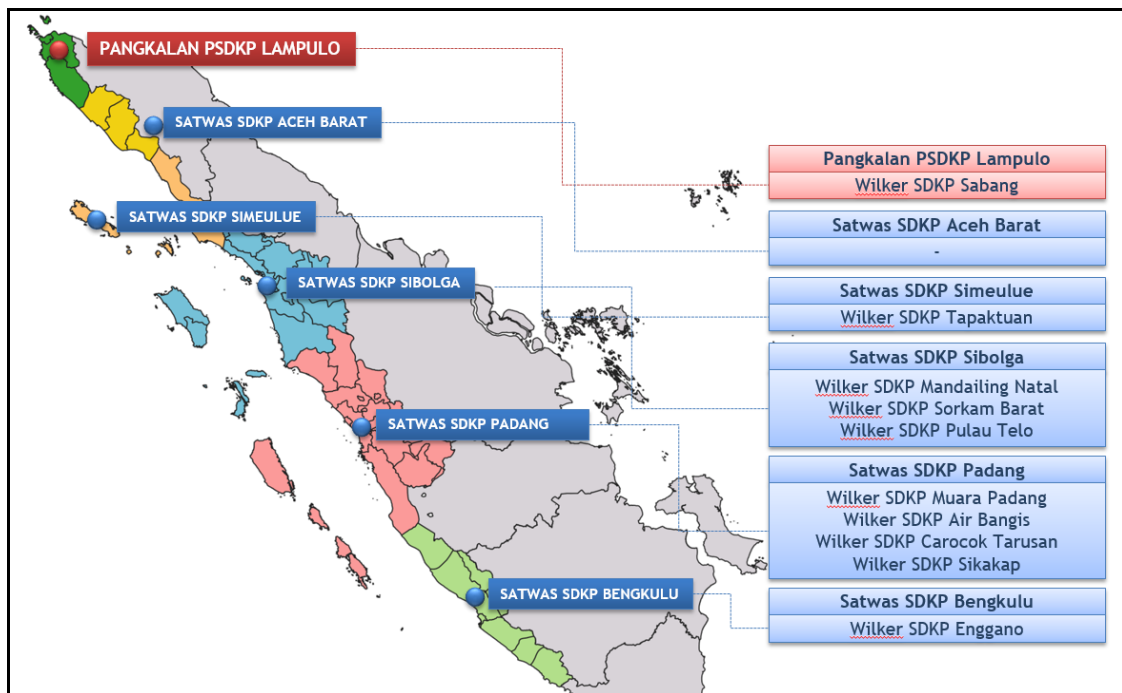
e) Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas dan kewenangan dari Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan, yaitu melaksanakan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta kegiatan lain sesuai dengan tugas jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan untuk fungsional lainnya disesuaikan dengan bidang tugas fungsional yang diembannya berdasarkan SK fungsional yang telah ditetapkan.

f) Satuan PSDKP

Tugas dan kewenangan dari Satuan PSDKP, yaitu melaksanakan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) serta evaluasi, dokumentasi, informasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah kerja masing-masing dan dipimpin oleh seorang Koordinator.

Untuk mendukung terlaksananya kegiatan PSDKP secara baik sampai ke daerah, maka telah di bentuk Satuan PSDKP dan Wilayah Kerja PSDKP di bawah koordinasi UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, yang meliputi 5 Satuan PSDKP dan 10 Wilayah Kerja PSDKP, yang disajikan pada gambar berikut:



Gambar 1.2. Wilayah Kerja Pangkalan PSDKP Lampulo

E. Sistematika Penyajian

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Tahun 2020 UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, secara garis besar diuraikan sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan Penyusunan Laporan Kinerja, tugas dan fungsi Unit Kerja serta data umum UPT Pangkalan PSDKP Lampulo.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan secara ringkas tentang rencana strategis UPT Pangkalan PSDKP Lampulo untuk periode 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja tahun 2020.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan

Menjelaskan uraian hasil Pengukuran Kinerja, evaluasi dan analisis Capaian Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan.

4. Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Tahun 2020 UPT Pangkalan PSDKP Lampulo dan rekomendasi perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: (1) Rencana Kerja; dan (2) Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang telah disempurnakan dengan pendekatan sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balance Score Cards* (BSC).

A. Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 - 2024

Renstra disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan KKP 2020 – 2024.

Adapun proses Penyusunan Renstra Ditjen. PSDKP sudah dilakukan dimulai akhir periode renstra 2015 – 2019. Renstra disusun dengan menggunakan evaluasi renstra periode sebelumnya, asumsi yang dipertanggungjawabkan serta kombinasi pendekatan *bottom up* dan *top down* dengan keterliatan Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV lingkup Ditjen. PSDKP. Pendekatan *top down* mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan *bottom up* dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Secara ringkas arah kebijakan Ditjen. PSDKP tahun 2020 – 2024 untuk mendukung Sasaran Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing;
2. Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan PSDKP;
3. Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla);
4. Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
5. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam PSDKP.

Bedasarkan arah kebijakan PSDKP tersebut, ditetapkan sasaran strategis pencapaian dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran strategis tersebut digunakan juga untuk Penyusunan rencana kerja dan perjanjian kinerja Ditjen. PSDKP.

1. Strategis Pencapaian Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, dilakukan melalui:
 - a. Membangun Budaya Kerja Ditjen PSDKP;
 - b. Mengembangkan Kompetensi SDM Aparatur PSDKP;
 - c. Membangun Pola Karir PNS Ditjen. PSDKP;
 - d. Meningkatkan Jumlah dan Sebaran SDM Aparatur PSDKP.
2. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan PSDKP, dilakukan melalui:
 - a. Membangun Sarana Pengawasan (Kapal Pengawas, Speed Boat dan Sarana Pengawasan lainnya);
 - b. Membangun Infrastruktur Pengawasan yang memadai;
 - c. Meningkatkan Pemeliharaan Kapal Pengawas agar siap operasional;
 - d. Mengembangkan Kelembagaan Pengawasan.
3. Strategis Pencapaian Kebijakan Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla), dilakukan melalui:
 - a. Operasi Bersama Pengawasan di Laut;
 - b. Pertukaran Data;
 - c. Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan;
 - d. Peningkatan Kapasitas SDM Pengawasan.
4. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan komunikasi dengan *stakeholder* dan pelaku usaha kelautan dan perikanan, dilakukan melalui:
 - a. Memperkuat sinergitas dan harmonisasi PSDKP dengan Pemerintah Daerah serta lintas sektor di tingkat Pusat;
 - b. Memelihara komitmen bersama dengan Lembaga Internasional dan Regional dalam pemberantasan *IUU Fishing*;
 - c. Menjalankan alur pendekatan pengawasan secara komprehensif, yakni: pencegahan (*preventif*), pembinaan, represif (*ultimum remedium*);

- d. Menerapkan metode *auditing* dalam PSDKP yang mengedepankan upaya perbaikan berkelanjutan terhadap temuan ketidaksesuaian bagi para pelaku usaha kelautan dan perikanan.
5. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam PSDKP, dilakukan melalui:
- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab;
 - b. Pemberian pemahaman kepada nelayan untuk tidak melintas batas ke perairan negara lain;
 - c. Optimalisasi peran serta masyarakat dalam mendukung PSDKP melalui POKMASWAS;
 - d. Menanamkan pengetahuan pengelolaan SDKP yang bertanggungjawab sejak dini melalui “PSDKP Mengajar”;
 - e. Meningkatkan peran aktif pemuda melalui “Pemuda Pelopor Pengawasan”;
 - f. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pokmaswas yang berkontribusi besar.

Pengarusutamaan (*mainstreaming*) di dalam dokumen Renstra Pangkalan PSDKP Lampulo 2020-2024 merupakan suatu bentuk upaya inovatif-adaptif di dalam penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menjadi katalis untuk mempercepat pencapaian target sekaligus memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Dengan berpedoman pada RPJMN 2020-2024, terdapat 4 (empat) pengarusutamaan, yaitu:

1) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pangkalan PSDKP Lampulo senantiasa berkomitmen dalam agenda memerangi *IUU Fishing* sambil terus mengembangkan secara simultan indikator-indikator yang esensial dan operasional di lapangan. Berkaitan dengan indikator persentase kepatuhan pelaku usaha dan perikanan yang sudah tercantum baik di dalam RPJMN 2020-2024 maupun Renstra KKP 2020-2024, Pangkalan PSDKP Lampulo akan mengadopsi langsung sebagai indikator kinerja utama pada level program yang secara simultan terus melakukan pengembangan dalam hal metode pemeriksaan kepatuhan maupun metode pengukurannya sehingga dapat menggambarkan kondisi kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang sebenarnya.

2) Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor dalam pembangunan, melalui strategi meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan kelautan dan perikanan khususnya di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

3) Pendekatan Sosial Budaya

Pendekatan sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta Penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial-budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khasanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa. Pembangunan kebudayaan ingin memastikan bahwa setiap individu maupun kelompok memperoleh perlindungan hak kebudayaan dan kebebasan berekspresi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif. Peningkatan pembangunan inklusif dan berwawasan budaya lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo, antara lain sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan penyadartahuan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab senantiasa memperhatikan nilai budaya, kearifan lokal dan keragaman SDA hayati,
- (2) Penumbuhan partisipasi masyarakat dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara inklusif dan terbuka
- (3) Pengembangan dan penguatan budaya kerja serta budaya organisasi lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo dilakukan secara kolektif, adaptif, dan inovatif menggunakan berbagai pendekatan yang efektif dalam menjawab tantangan kompleksitas permasalahan pada lingkungan strategis.

4) Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*) dan pengelolaan big data. Optimalisasi teknologi digital sebagai salah satu arus utama pada lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo dilakukan melalui:

- (1) Optimalisasi peranan *Regional Monitoring Center* (RMC) Pangkalan PSDKP Lampulo dalam mengintegrasikan berbagai teknologi pemantauan jarak jauh terhadap seluruh aktivitas pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menghasilkan informasi yang cepat dan akurat dalam mendukung setiap operasi pengawasan,
- (2) Pengembangan sistem pengelolaan data pengawasan sumber daya kelautan berbasis digital,
- (3) Pemanfaatan *Information Technology Forensic* (teknologi forensik digital) dan *intelligent open source* untuk pengembangan kasus tindak pidana kelautan dan perikanan (TPKP).

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Pangkalan PSDKP Lampulo sendiri memiliki Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan terkait dengan target kinerja pada tahun 2020. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil. Maka sesuai jenjang hirarki UPT Pangkalan PSDKP Lampulo diberi amanah oleh Direktorat Jenderal PSDKP untuk menjalankan tugas sesuai penetapan kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo pada tahun 2020 telah mengalami revisi sebanyak 3 kali, pada bulan Maret, Mei, dan September. Pada awal Penyusunan Perjanjian Kinerja di awal tahun 2020, Pangkalan PSDKP Lampulo berpedoman pada 11 Sasaran Strategis yang terdiri dari 22 Indikator Kinerja Utama. Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo mengalami perubahan pada bulan Maret tahun 2020, menjadi teridentifikasi dalam 8 Sasaran Strategis yang terdiri dari 28 Indikator Kinerja Utama. Kemudian pada bulan Mei 2020, mengalami perubahan lagi, mengacu pada 6 Sasaran Strategis yang terdiri dari 27 Indikator Kinerja Utama. Pada bulan September, Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo mengalami perubahan lagi, yang mengacu pada 14 Sasaran Strategis, terdiri dari 24 Indikator Kinerja Utama. Adapun Perjanjian Kinerja yang menjadi acuan Pangkalan PSDKP Lampulo tahun 2020, adalah Perjanjian Kinerja Revisi September 2020, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo (Revisi September) Tahun 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terselenggaranya tindak lanjut atas laporan pengaduan Pokmaswas	1. Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	70
2.	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan	2. Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo [pelaku usaha]	21
3.	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan	3. Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	100
4.	Terselenggaranya Pemantauan SDKP menggunakan kapal pengawas	4. Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	1,34
5.	Terselenggaranya Pemantauan SDKP menggunakan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat	5. Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan <i>Illegal Fishing</i> melalui operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	0,064
6.	Terselenggaranya Pemantauan SDKP melalui Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP)	6. Persentase kesiapan sistem pemantauan SDKP (%)	70
7.	Terselenggaranya perawatan kapal pengawas	7. Jumlah kapal pengawas yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (unit)	1
8.	Terselenggaranya perawatan speedboat pengawas	8. Jumlah <i>speedboat</i> yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (unit)	5
9.	Terselenggaranya Operasi Kapal Pengawas	9. Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan kapal pengawas (unit)	125
		10. Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (hari operasi)	125

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
10.	Terselenggaranya Operasi speedboat Pengawas	11. Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan <i>speedboat</i> (unit)	75
		12. Jumlah hari operasi Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (hari operasi)	35
11.	Tersedianya awak kapal pengawas perikanan yang memenuhi kualifikasi kesehatan	13. Jumlah Awak Kapal Pengawas Perikanan yang memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin tahunan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (orang)	13
12.	Terselenggaranya Penyidikan TPKP	14. Persentase Penyelesaian administrasi penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka serta saksi TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	100
13.	Terselenggaranya Penanganan Barbuk dan Awak Kapal	15. Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	93
		16. Persentase Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	93
14.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Lampulo	17. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan Pangkalan PSDKP Lampulo [Indeks]	80
		18. Persentase pemenuhan layanan dukungan manajemen Satker lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	100
		19. Persentase pemenuhan layanan Sarana dan Prasarana Internal lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	100
		20. Persentase pemenuhan layanan perkantoran lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	100
		21. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo [Indeks]	72
		22. Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (nilai)	90
		23. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup [%]	82
		24. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	Baik [88]

C. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2020

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Manual IKU. Selanjutnya, nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui Penyusunan laporan kinerja yang didukung dengan implementasi Aplikasi *Kinerjaku* yang merupakan aplikasi berbasis teknologi informasi.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang PSDKP Tahun 2020

1. Capaian Sasaran Strategis (SS) Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2020

Berdasarkan implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja, Pangkalan PSDKP Lampulo telah menyempurnakan dan menetapkan 14 (empat belas) Sasaran Strategis (SS) dengan 24 Indikator Kinerja Utama (IKU). Nilai Rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Ditjen. PSDKP sebesar 108,37 dengan rincian pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2020

No.	Nama Unit Kerja	NPSS TW I	NPSS TW II	NPSS TW III	NPSS TW IV
1.	PANGKALAN PSDKP LAMPULO	88,58	104,49	92,99	108,37
2.	SUB BAGIAN TATA USAHA	111,333	120,00	113,33	112,01
3.	SEKSI SARANA DAN PRASARANA	113,85	100,00	100,00	100,01
4.	SEKSI OPERASIONAL PENGAWASAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN	96,67	90,84	104,59	112,50

Sumber: SAPK (kinerjaku.kkp.go.id)

Hasil capaian NPSS Pangkalan PSDKP Lampulo pada Triwulan IV 2020 sebesar 108,37 dengan status indikator berwarna hijau. Pada Capaian Level 4, Capaian NPSS Sub Bagian Tata Usaha sebesar 112,01 dengan status indikator berwarna hijau, capaian NPSS Seksi Sarana dan Prasarana sebesar 100,01 dengan status indikator berwarna hijau, capaian NPSS Seksi Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran sebesar 112,50 dengan status indikator berwarna hijau. Capaian kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo, tetap dalam tren positif dengan nilainya masih dalam indikator hijau.

2. Capaian Indikator Kinerja Utama PSDKP Tahun 2020

Capaian Indikator Kinerja Utama Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2020 ditabulasikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2. Hasil Pengukuran Kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2020

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE
1.	Terselenggaranya tindak lanjut atas laporan pengaduan Pokmaswas	1. Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	700%	100%	120%
2.	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan	2. Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo [pelaku usaha]	21	87	120%
3.	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan	3. Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	100%	100%	100%
4.	Terselenggaranya Pemantauan SDKP menggunakan kapal pengawas	4. Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	1,34	1,51	112,69%
5.	Terselenggaranya Pemantauan SDKP menggunakan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat	5. Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan <i>Illegal Fishing</i> melalui operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	0,064	0,0136	120%
6.	Terselenggaranya Pemantauan SDKP melalui Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP)	6. Persentase kesiapan sistem pemantauan SDKP (%)	70%	100%	120%
7.	Terselenggaranya perawatan kapal pengawas	7. Jumlah kapal pengawas yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (unit)	1	1	100%
8.	Terselenggaranya perawatan speedboat pengawas	8. Jumlah <i>speedboat</i> yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (unit)	5	5	100%

9.	Terselenggaranya Operasi Kapal Pengawas	9. Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan kapal pengawas (unit)	125	202	120%
		10. Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (hari operasi)	125	125	100%
10.	Terselenggaranya Operasi speedboat Pengawas	11. Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan <i>speedboat</i> (unit)	75	505	120%
		12. Jumlah hari operasi Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (hari operasi)	35	35,4	101,14%
11.	Tersedianya awak kapal pengawas perikanan yang memenuhi kualifikasi kesehatan	13. Jumlah Awak Kapal Pengawas Perikanan yang memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin tahunan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (orang)	13	13	100%
12.	Terselenggaranya Penyidikan TPKP	14. Persentase Penyelesaian administrasi penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka serta saksi TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	100%	100%	100%
13.	Terselenggaranya Penanganan Barbuk dan Awak Kapal	15. Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	93	100%	107,53%
		16. Persentase Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	93	100%	107,53%
14.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Lampulo	17. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan Pangkalan PSDKP Lampulo [Indeks]	80	90,08	112,60%
		18. Persentase pemenuhan layanan dukungan manajemen Satker lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	100%	100%	100%

		19. Persentase pemenuhan layanan Sarana dan Prasarana Internal lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	100%	100%	100%
		20. Persentase pemenuhan layanan perkantoran lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	100%	100%	100%
		21. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo [Indeks]	72	75,17	104,4%
		22. Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (nilai)	90	68,97	76,63%
		23. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup [%]	82	77,70%	76,63%
		24. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	Baik [88]	82,06	93,25%

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020, UPT Pangkalan PSDKP Lampulo telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap Sasaran Strategis, diuraikan sebagai berikut:

Sasaran Strategis-1: Terselenggaranya Tindak Lanjut Atas Laporan Pengaduan POKMASWAS

Pencapaian Sasaran Strategis “Terselenggaranya Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat” diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu:

IKU-1: “Persentase Tindak Lanjut Informasi Pokmaswas Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Pada tahun 2020, kegiatan tindak lanjut informasi Pokmaswas belum dilaksanakan. Adapun informasi tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3. Hasil Capaian IKU “Persentase Tindak Lanjut Informasi Pokmaswas Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		CAPAIAN	PERSEN
	TAHUN 2020	TW I		
Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	70%	-	-	-
		TW II	CAPAIAN	PERSEN
		70%	100%	120%
		TW III	CAPAIAN	PERSEN
		-	-	-
		TW IV	CAPAIAN	PERSEN
		70%	100%	120%

Dari tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada Pangkalan PSDKP Lampulo memperoleh capaian di tahun 2020. Tindak lanjut informasi Pokmaswas lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo dilaksanakan atas Laporan Aduan Masyarakat Nelayan Tradisional Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat,

Provinsi Sumatera Barat yang mengalami penurunan hasil tangkapan ikan dikarenakan adanya kebocoran limbah pabrik kelapa sawit PT. Bintara Tani Nusantara yang mencemari aliran sungai hingga ke perairan Teluk Air Bangis. Keadaan tersebut menjadikan warna air menghitam, berbau busuk, dan banyak ikan yang mati lalu mengapung. Dampak dari pencemaran oleh limbah tersebut, telah merusak ekosistem perairan di Teluk Air Bangis. Laporan aduan masyarakat ini ditandatangani oleh 370 nelayan, yang dibuat pada tanggal 21 Maret 2020.

Selanjutnya, Laporan Aduan Masyarakat Nelayan Tradisional Nagari Air Bangis ditindaklanjuti oleh Pangkalan PSDKP Lampulo melalui Satwas SDKP Padang dengan melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan pada 24 April 2020. Koordinasi dilaksanakan terlebih dahulu dengan Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat, dilanjutkan dengan pemeriksaan langsung, dengan menyisir perairan dari Lubuk Larangan, Lubuk Buaya, hingga Jorong Pigogah, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan informasi yang didapat, kolam penampungan limbah milik PT. Bintara Tani Nusantara mengalami kebocoran pada bulan Maret 2020, kemudian jebol pada tanggal 18 April 2020. Informasi yang didapat dari hasil monitoring pengukuran kualitas air di Lubuk Larangan hingga Lubuk Buaya, Kecamatan Sungai Beremas yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat pada 20 April 2020, adalah nilai pH = 6,4; nilai NH₃ = 1, warna air hitam keabu-abuan berbau sulfur, dan kondisi air berminyak serta berlumpur. Monitoring dilanjutkan pada tanggal 21 April 2020, dengan hasil sebagai berikut:

1. Terjadinya kematian massal ikan yang disebabkan oleh pencemaran limbah PT. Bintara Tani Nusantara.
2. Pengukuran panjang kawasan yang tercemar ± 10 km, bermuara di Jorong Pigogah hingga Pantai Air Bangis.
3. Kondisi air pada kawasan tercemar berwarna hitam keabu-abuan, berbau sulfur.
4. Kondisi air di Pantai Air Bangis berwarna kekuningan.

Tindak lanjut terhadap Laporan Aduan Masyarakat Nelayan Tradisional Nagari Air Bangis, kemudian dilanjutkan pada tanggal 25 Juni 2020 oleh Pangkalan PSDKP Lampulo melalui Satwas SDKP Padang, dengan melaksanakan koordinasi dengan Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat dan Aidil Fitra sebagai tokoh nelayan. Dari hasil koordinasi tersebut, didapatkan informasi sebagai berikut:

1. Permasalahan terkait pencemaran kolam penampungan limbah kelapa sawit PT. Bintara Tani Nusantara, telah dilakukan mediasi oleh Bupati Pasaman Barat, POLRES Pasaman Barat, Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. Dari hasil mediasi, didapatkan kesepakatan bahwa pihak perusahaan bertanggungjawab atas kejadian jebolnya kolam penampungan limbah PT. Bintara Tani Nusantara, dan bersedia memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak dari kejadian tersebut.
2. Kompensasi yang diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak dari pencemaran perairan, berupa uang sejumlah Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dibagikan kepada masyarakat pesisir Air Bangis dengan jumlah ±600 orang, dan uang sejumlah Rp 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) yang digunakan untuk pembangunan sumur sebanyak 6 (enam) unit dan pemulihan lingkungan bagi masyarakat sekitar Lubuk Larangan, Lubuk Buaya, hingga Jorong Pigogah yang berjumlah sekitar 15 (lima belas) kepala keluarga. Pada tanggal 22 Mei 2020, dilakukan serah terima kompensasi dari pihak perusahaan PT. Bintara Tani Nusantara kepada masyarakat yang dihadiri oleh POLRES Pasaman Barat dan Kejaksaan Negeri Pasaman Barat.

Selain melakukan tindak lanjut terhadap Laporan Aduan Masyarakat, Pangkalan PSDKP Lampulo juga melaksanakan Pembinaan Pokmaswas, yang dilakukan pada Pokmaswas Pante Jaya dan Pokmaswas Camar Laut tanggal 02 Oktober 2020 di Kota Sabang, Provinsi Aceh. Upaya yang dilakukan pada 2021, UPT Pangkalan PSDKP Lampulo agar melaksanakan sosialisasi secara berkala kepada Pokmaswas-Pokmaswas yang berada di wilayah kerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo supaya Pokmaswas lebih aktif dalam menyampaikan aspirasinya selama membantu dalam kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya Sasaran Strategis 1 sebesar Rp 12.600.000,00. Sampai dengan bulan Desember 2020, anggaran telah terserap sebesar Rp 1.1770.000,00 atau bila dipersentasekan sebesar 93,41%. anggaran terserap secara efisien. Data realisasi anggaran diambil dari Aplikasi SAS.

**Sasaran Strategis-2: Terselenggaranya Pengawasan Kepatuhan Pemangku
Kepentingan Kelautan**

Pada Sasaran Strategis 2, terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama, yang diuraikan sebagai berikut:

IKU-2: “Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang Diperiksa Kepatuhan nya Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Pada IKU Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo, memiliki komponen sebagai berikut:

- Jumlah pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan;
- Jumlah pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau *Apendiks Cites*;
- Jumlah pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan;
- Jumlah pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- Jumlah pelaku usaha pengelolaan ruang laut;
- Jumlah usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya;
- Jumlah pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan pelarangan *destructive fishing*.

Tabel 3.4. Hasil Capaian IKU “Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang Diperiksa Kepatuhan nya Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		TARGET		CAPAIAN	PERSEN
	TAHUN 2019	CAPAIAN	TAHUN 2020	TW I		
Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	30	56	21	6	6	100%
				TW II	CAPAIAN	PERSEN
				3	12	120%
				TW III	CAPAIAN	PERSEN
				7	43	120%
				TW IV	CAPAIAN	PERSEN
5	26	120%				

Target jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo pada tahun 2020 sebanyak 21 pelaku usaha, telah tercapai sebanyak 87 pelaku usaha, maka persentase realisasi capaian sebesar 120%. Dibandingkan dengan tahun 2019, pada tahun target jumlah pelaku usaha kelautan yang diperiksa kepatuhannya mengalami penurunan. Target pemeriksaan pelaku usaha pada tahun 2019 sebanyak 30

pelaku usaha, sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 21 pelaku usaha. Namun, capaian pemeriksaan pelaku usaha pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2019. Pada tahun 2019, capaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha sebanyak 56 pelaku usaha, sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 87 pelaku usaha. Adapun rincian jumlah pelaku usaha kelautan per jenis kegiatan pengawasan, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.5. Rincian Capaian IKU “Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang Diperiksa Kepatuhan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

No.	Jenis Pengawasan	Jumlah Pelaku Usaha	Indikasi Ketaatan	
			Taat	Tidak Taat
1.	Kawasan Konservasi	13	13	-
2.	Jenis Ikan Dilindungi	5	5	-
3.	Pengelolaan Ruang Laut	3	2	1
4.	Jasa Kelautan	1	-	1
5.	Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	8	8	-
6.	<i>Destructive Fishing</i>	57	38	19

Adapun rincian jumlah pelaku usaha kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo per jenis kegiatan pengawasan, antara lain sebagai berikut:

1. PENGAWASAN KAWASAN KONSERVASI

Kegiatan pengawasan kawasan konservasi, dilakukan terhadap 13 (tiga belas) pelaku usaha, dengan rincian sebagai berikut:

- 1.) Taher, adalah nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Kawasan Pulau Pandan, Provinsi Sumatera Barat (KKPN Pulau Pieh). Kapal perikanan berukuran ukuran \pm 3 GT dengan alat tangkap pancing. Indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong taat.
- 2.) Murniadi, adalah pengelola Lembaga Konservasi Penyu Aroen Meubanja, Gampong Keude Panga, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh (KKPD Aceh). Pada lokasi ini, ditemukan kegiatan konservasi dan rehabilitasi Penyu yang juga dijadikan lokasi penelitian mahasiswa dan akademisi. Pemanfaatan kawasan ini sudah sesuai dengan zonasi peruntukannya dengan dasar Kep. MENKP No. 76/KEPMEN - KP/2020. Indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong taat.

- 3.) Kelompok Pemuda Gampong Lhok Buya, Dusun Drien Rampak, Gampong Lhok Buya, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh. Kegiatan di kawasan ini yaitu kegiatan usaha/wisata kuliner di pesisir pantai dan tidak jauh dari pesisir pantai ditemukan alat tangkap tradisional berupa bagan tancap. pemanfaatan kawasan ini sudah sesuai dengan zonasi peruntukannya dengan dasar Kep. MENKP No. 76/KEPMEN - KP/2020. Indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong taat.
- 4.) Effendi, adalah pelaku usaha pengelolaan kawasan mangrove Kawasan Wisata Pantai Pasir Putih, Kecamatan Lamreh, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Garis pantai yang dimanfaatkan sepanjang 500 meter dijadikan sebagai “Jembatan *Selfie*”, ditumbuhi oleh mangrove jenis *Sonneratia alba*. Area ini dimanfaatkan sebagai lokasi wisata yang dikelola oleh penduduk desa setempat. Hasil pengamatan secara langsung, kondisi mangrove dan kebersihan lingkungan masih baik. Indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong taat.
- 5.) Wandrie, adalah pengelola Ekowisata Pulo Tabek Mangrove, Pantai Cemara Indah Gosong Telaga, Gampong Gosong Telaga Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Luas total area ± 300 meter, dengan luas area yang dimanfaatkan ± 100 meter. Kondisi mangrove pada kawasan tersebut masih bagus, dengan spesies *Avicennia marina* dan *Rhizophora apiculata*. Indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong taat.
- 6.) Lurah Sumber Jaya, adalah pengelola Mangrove Education Center Sumber Jaya, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Program Mangrove Education Center di kawasan Sumber Jaya merupakan kerja sama Palang Merah Indonesia dengan *Japanese Red Cross Society* sebagai upaya pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat. Program ini sesuai dengan potensi dan karakteristik di Kelurahan Sumber Jaya yang berada di wilayah pesisir yang diharapkan dengan adanya Mangrove Education Center ini, dapat memberikan wawasan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kelestarian hutan mangrove terlebih karena Bengkulu masuk sebagai daerah dengan potensi bencana alam dan tsunami yang tinggi. Indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong taat.
- 7.) Kepala Desa Haloban, adalah pengelola Kawasan Mangrove Desa Haloban, Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

Kondisi ekosistem mangrove di sekitar Desa Haloban secara umum masih cukup bagus. Vegetasi mangrove yang umum dijumpai adalah: *Avicennia marina* (Api-api) dan *Rhizophora apiculata*. Indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong taat.

- 8.) Pengelola Pantai Nirwana, adalah pelaku usaha kawasan mangrove di Pantai Nirwana, Teluk Bayur, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Luas kawasan mangrove pada lokasi ini $\pm 8,042$ koloni/m². Komposisi vegetasi mangrove yang terdapat di Pantai Nirwana ini terdapat 2 (dua) jenis mangrove, yaitu : *Rhizophora apiculata* dan *Sonneratia alba* dengan kondisi yang baik. Indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong taat.
- 9.) Abdul Aziz, adalah pelaku usaha pengelolaan kawasan mangrove di Gampong Pande, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Luas mangrove yang dikelola $\pm 22,58$ hektar. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan adanya kerusakan mangrove yang disebabkan adanya penebangan hutan mangrove yang dilakukan oleh masyarakat, selain itu petugas juga mendapati adanya beberapa lokasi yang sudah dipasang patok yang mana antara satu patok dengan patok lainnya sudah dipasang tali yang mana hasil pengakuan warga sekitar lokasi tersebut akan dibangun jalan. Komposisi vegetasi mangrove yang terdapat di Gampong Pande ada 6 (enam) jenis, yaitu: *Rhizophora apiculata*, *Rhizophora mucronata*, *Xylocarpus granatum*, *Avicenia* sp., *Sonneratia alba*, dan *Nypa frutycan* yang tersebar dari Gampong Pande, Gampong Peulanggahan, hingga Gampong Jawa. Indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong taat.
- 10.) Abdul Hadi, adalah pengelola Ekowisata Mangrove Gampong Baro, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh. Luas kawasan mangrove pada lokasi ini ± 30 hektar. Ekowisata Mangrove Gampong Baro merupakan salah satu lembaga binaan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saat ini, Ekowisata Mangrove masih dalam tahap pembangunan yang direncanakan selesai pada tahun 2022, dengan adanya fasilitas Kantin, Penangkaran Buaya, Tracking Wisata, Pondok Edukasi Mangrove, Menara Pandang, Jogging Tracking, dan Spot Wisata. Secara umum, kondisi mangrove pada lokasi ini bagus dan dikelola dengan baik. Komposisi vegetasi mangrove yang terdapat pada Ekowisata Mangrove terdiri dari 18 (delapan belas) spesies mangrove, antara lain: *Rhizopora mucronata*, *Rhizopora apiculata*, *Rhizopora*

stylosa, *Bruguera ginnoriza*, *Ceriops tagal*, *Ceriops decandra*, *Ceriops sp.*, *Avicenia marine*, *Nypa frutican*, *Sonneratia casiolaris*, *Xylocarpus garantum*, *Casuarina equisetifolia*, *Pandanus odorifer*, *Acrostichum aureum*, *Acanthus sp.*, *Ipomoea Pes-caprae L sweet*, *Thespesia populnea*, dan *Ziziphus mauritiana*. Indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong taat.

- 11.) Kepala Gampong Suak Seumaseh, adalah pengelola kawasan mangrove Gampong Suak Seumaseh, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Luas kawasan mangrove pada lokasi ini $\pm 7,2$ hektar. Indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong taat. Komposisi vegetasi mangrove yang terdapat di pesisir Gampong Suak Seumaseh didominasi oleh Bakau (*Rhizophora sp.*) dan Paku Laut (*Acrostichum aureum*). Indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong taat.
- 12.) Kepala Gampong Cot Darat, adalah pengelola kawasan mangrove di Gampong Cot Darat, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Luas kawasan mangrove pada lokasi ini $\pm 5,3$ hektar. Komposisi vegetasi mangrove yang terdapat di pesisir Gampong Cot Darat didominasi oleh Bakau (*Rhizophora sp.*) dan Paku Laut (*Acrostichum aureum*). Indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong taat.
- 13.) Edi Hariyanto, adalah pengelola Taman Wisata Mangrove Badrika yang berada di Jl. Jenggalu 1, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Luas kawasan mangrove pada lokasi ini ± 4 hektar. Status tanah Taman Wisata Mangrove Badrika masih dalam kawasan Konservasi TWA Pantai Panjang dan tidak dikeluarkan izin oleh BKSDA Provinsi Bengkulu. Indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong taat.

2. JENIS IKAN DILINDUNGI

Kegiatan pengawasan jenis ikan dilindungi, dilakukan terhadap 5 (lima) pelaku usaha, dengan rincian sebagai berikut:

- 1.) Pandah Art Green, merupakan lembaga pengelola ikan dilindungi dengan jenis Penyu di Stasiun Konservasi Penyu Sialang, area pesisir pantai Gampong Pasi Lembang, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh. Pandah Art Green bernaung di bawah Balai Besar Taman Nasional Gunung Lauser, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Luas kawasan Pandah Art Green ± 40 hektar. Dari hasil pengamatan diketahui bahwa Penyu

yang terdapat di lokasi penangkaran ini, yaitu Penyu Lekang (*Lepidochelys olivacea*) atau sering disebut Penyu Abu-abu dan Penyu Hijau (*Chelonia mydas*), serta terdapat anakan Penyu (tukik). Secara umum kondisi area pesisir pantai di Gampong Pasi Lembang masih cukup bagus dan alamnya masih terjaga. Indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong taat.

- 2.) Kelompok Konservasi Penyu Pantai Binasi, merupakan lembaga pengelola ikan dilindungi jenis Penyu yang berada di Kelurahan Binasi, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Luas kolam penampungan Penyu pada lokasi ini berukuran $(6 \times 13) \text{m}^2$. Pelestarian Penyu dilakukan swadaya oleh kelompok masyarakat dengan nama Kelompok Konservasi Penyu Pantai Binasi Sorkam Barat. Jenis Penyu yang berada di lokasi ini adalah jenis Penyu Lekang (*Lepidochelys olivacea*). Indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong taat.
- 3.) Pandah Art, merupakan lembaga pengelola ikan dilindungi dengan jenis Penyu yang berlokasi di Desa Haloban, Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Luas kolam penampungan Penyu pada lokasi ini berukuran $(5 \times 5) \text{m}^2$. Jenis Penyu yang berada di Pandah Art adalah Penyu Lekang (*Lepidochelys olivacea*) dan Penyu Sisik (*Eretmochelys imbricata*). Indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong taat.
- 4.) Rinto / Abdiansyah Tanjung, adalah pelaku usaha ikan dilindungi jenis Lobster. Usaha yang dimiliki merupakan usaha penampungan Lobster bernama UD. Karya Lestari yang berlokasi di Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara. Kolam penampungan Lobster pada lokasi ini berjumlah 3 kolam yang berukuran $(1,5 \times 3 \times 1) \text{m}^3$. Usaha penampungan sudah berdiri selama 10 tahun, jenis Lobster yang ditampung adalah Lobster Mutiara (*Panulirus ornatus*) dengan tujuan pengiriman ke Jakarta. Pada saat dilakukan pengukuran karapas dan penimbangan bobot Lobster, tidak ditemukan Lobster yang melanggar aturan sesuai PERMEN KP No. 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan di Wilayah Negara Republik Indonesia. Indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong taat.
- 5.) Murniadi, adalah pengelola Lembaga Konservasi Penyu Aroen Meubanja yang berlokasi di Gampong Keude Panga, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh. Pada lokasi ini, terdapat bak pembesaran tukik berukuran $2,5 \times 2 \times 1$ meter (2 buah) dan pagar untuk penetasan berukuran $3 \times 1,5$ meter (1

buah) wilayah kerja 15,5 hektar. Pelestarian penyu dilakukan secara swadaya oleh kelompok Aroen Meubanja dengan kegiatan yang dilaksanakan berupa penetasan dan penangkaran yang mulai dilaksanakan pasca tsunami. Legalisasi pengelolaan kawasan konservasi Aroen Meubanja dilaksanakan pada tahun 2012. Indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong taat.

3. PENGELOLAAN RUANG LAUT

Kegiatan pengawasan pengelolaan ruang laut, dilakukan terhadap 2 (dua) pelaku usaha, dengan rincian sebagai berikut:

- 1.) Adi Putera Alizar, adalah penanggung jawab CV. Andalus Samudera yang berlokasi di Keramba Jaring Apung Wisata Mandeh, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Perusahaan ini belum memiliki dokumen perizinan, sehingga indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong tidak taat.
- 2.) Gao Zhiyi, adalah penanggung jawab PT. Dempo Fuyang Aquatic yang berlokasi di Keramba Jaring Apung Wisata Mandeh, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Perusahaan ini memiliki Izin Usaha serta Izin Lokasi yang berada di zona budidaya laut (KPU-BD-BDLI) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong taat.
- 3.) Tjhie Sugianto, adalah penanggung jawab PT. Titan Wijaya yang berlokasi di Desa Kota Bani, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. PT. Titan Wijaya merupakan pelabuhan khusus batu bara yang telah memiliki perizinan yang sesuai dengan Perda Provinsi Bengkulu Nomor: 5 Tahun 2019 Tentang RZWP3K Provinsi Bengkulu. Indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong taat.

4. JASA KELAUTAN

Kegiatan pengawasan jasa kelautan, dilakukan terhadap 1 (satu) pelaku usaha, yaitu Raflfesia Bengkulu Diving Center yang berlokasi di Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Pada saat dilaksanakan kegiatan pengawasan, belum ada kegiatan pemanfaatan atau pengangkatan terhadap BMKT yang dilakukan secara legal. Indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong taat.

5. WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Kegiatan pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dilakukan terhadap 8 (delapan) pelaku usaha, dengan rincian sebagai berikut:

- 1.) Untung Harapan Sihombing, adalah penanggung jawab usaha wisata bahari Pondok Lesehan II Pulau Karang, yang berlokasi di Desa Sitiris-Tiris, Kecamatan Andam Dewi, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Usaha ini belum memiliki izin usaha, izin lokasi, maupun izin pengelolaan. Indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong taat.
- 2.) Mardan Situmorang, adalah penanggung jawab usaha wisata bahari Coffee Beach Pulau Karang yang berlokasi di Desa Sitiris-Tiris, Kecamatan Andam Dewi, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Usaha ini belum memiliki izin usaha, izin lokasi, maupun izin pengelolaan. Indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong taat.
- 3.) Willy, adalah penanggung jawab Kimo Resort yang berlokasi di Pulau Panjang Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Usaha ini belum memiliki izin usaha, izin lokasi, maupun izin pengelolaan. Indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong taat.
- 4.) BUMdes Balai Jaya, adalah penanggung jawab Resort di Pulau Balai yang berlokasi di Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Usaha ini belum memiliki izin usaha, izin lokasi, maupun izin pengelolaan. Indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong taat.
- 5.) Heru, adalah penanggung jawab Pulau Pagang Cottage yang berlokasi di Pulau Pagang, Nagari Sungai Pinang, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan ke arah Bungus Teluk Kabung, Provinsi Sumatera Barat. Usaha ini belum memiliki izin usaha, izin lokasi, maupun izin pengelolaan. Indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong taat.
- 6.) Jacob Sumarban Widjaja, adalah penanggung jawab PT. Bintang Paradiso yang berlokasi di Pulau Cubadak, Nagari Sungai Pinang, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Usaha pada kawasan tersebut telah memiliki izin lokasi pemanfaatan. Luas kawasan ini 32,94 hektar. Indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong taat.
- 7.) Hendra Wijaya dan Yasmin Yastan, adalah penanggung jawab CV Yama -G yang berlokasi di Pulau Talam dan Ujung Siroba (Gugusan Pulau Mursala), Desa Tapian Nauli VII, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah,

Provinsi Sumatera Utara. Luas Pulau Mursala ± 8.000 hektar. CV. Yama -G belum memiliki izin usaha, izin lokasi, maupun izin pengelolaan, hanya memiliki Akta Notaris Pendirian CV Yama -G No 74 tanggal 27 Agustus 2020. Indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong taat.

- 8.) Suryadi, adalah pelaku usaha pengelola Pulau Angsoduo yang berlokasi di Jl. H. Agus Salim No. 53, Desa Kampung Baru, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Luas kawasan ini 5,13 hektar. Pada lokasi ini belum memiliki izin lokasi pemanfaatan. Kondisi Pulau Angsoduo secara umum baik, saat ini dikelola oleh Dinas Pariwisata Kota Pariaman. Indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong taat.

6. DESTRUCTIVE FISHING

Kegiatan pengawasan terhadap pelaku usaha *Destructive Fishing*, dilakukan terhadap 57 (lima puluh tujuh) pelaku usaha, dengan rincian sebagai berikut:

- 1.) Ali Hardi, adalah pemilik KM. Tanpa Nama yang berlokasi di sekitar perairan Pulau Sarok dan Gosong Telaga, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Hasil pemeriksaan terhadap kapal tersebut tidak ditemukan adanya dugaan kegiatan *destructive fishing*, indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong taat.
- 2.) Saripuddin, adalah pemilik KM. Siang Malam I yang berlokasi di sekitar perairan Pulau Sarok dan Gosong Telaga, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Hasil pemeriksaan terhadap kapal tersebut tidak ditemukan adanya dugaan kegiatan *destructive fishing*, indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong taat.
- 3.) Wantri Sembiring, adalah pemilik KM. Putri yang berlokasi di sekitar perairan Pulau Sarok dan Gosong Telaga, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Hasil pemeriksaan terhadap kapal tersebut tidak ditemukan adanya dugaan kegiatan *destructive fishing*, indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong taat.
- 4.) Masrudin Sitinjak, adalah pemilik KM. Khaziq yang berlokasi di sekitar perairan Pulau Sarok dan Gosong Telaga, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Hasil pemeriksaan terhadap kapal tersebut tidak ditemukan adanya dugaan kegiatan *destructive fishing*, indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong taat.
- 5.) Yakini Gunawan, adalah pemilik KM. Tanpa Nama (warna lambung abu-abu) yang berlokasi di Gampong Ujung Pancu, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Dari hasil pemeriksaan, alat tangkap

berupa *gill net*, namun ditemukan adanya dugaan kegiatan *destructive fishing*, dengan bukti adanya alat bantu kompresor. Selanjutnya, bukti fisik diamankan di Pangkalan PSDKP Lampulo untuk selanjutnya dilakukan penyidikan. Indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong tidak taat.

- 6.) M. Ruslan Bin Marzuki, adalah pemilik KM. Tanpa Nama (warna lambung merah maroon) yang berlokasi di Gampong Ujung Pancu, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Dari hasil pemeriksaan, alat tangkap berupa *gill net*, namun ditemukan adanya dugaan kegiatan *destructive fishing*, dengan bukti adanya alat bantu kompresor. Selanjutnya, bukti fisik diamankan di Pangkalan PSDKP Lampulo untuk selanjutnya dilakukan penyidikan. Indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong tidak taat.
- 7.) Firmansyah, adalah pemilik KM. Tanpa Nama yang berlokasi di Pantai Barat, Provinsi Sumatera Barat. Hasil pemeriksaan terhadap kapal tersebut tidak ditemukan adanya dugaan kegiatan *destructive fishing*, indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong taat.
- 8.) Sudirman, adalah pemilik KM. Tanpa Nama yang berlokasi di Pantai Barat, Provinsi Sumatera Barat. Hasil pemeriksaan terhadap kapal tersebut tidak ditemukan adanya dugaan kegiatan *destructive fishing*, indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong taat.
- 9.) Risdianto, adalah pemilik KM. Andre 04 yang berlokasi di Pantai Barat, Provinsi Sumatera Barat. Hasil pemeriksaan terhadap kapal tersebut tidak ditemukan adanya dugaan kegiatan *destructive fishing*, indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong taat.
- 10.) Zainal, adalah pemilik KM. Promag 02 yang berlokasi di Pantai Barat, Provinsi Sumatera Barat. Hasil pemeriksaan terhadap kapal tersebut tidak ditemukan adanya dugaan kegiatan *destructive fishing*, indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong taat.
- 11.) Dodi, adalah pemilik KM. NDL 01 yang berlokasi di Pantai Barat, Provinsi Sumatera Barat. Hasil pemeriksaan terhadap kapal tersebut tidak ditemukan adanya dugaan kegiatan *destructive fishing*, indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong taat.
- 12.) Wendi, adalah pemilik KM. Tanpa Nama yang berlokasi di Pantai Barat, Provinsi Sumatera Barat. Hasil pemeriksaan terhadap kapal tersebut tidak

ditemukan adanya dugaan kegiatan *destructive fishing*, indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong taat.

- 13.) Lukman, adalah pemilik KM. Promag 03 yang berlokasi di Pantai Barat, Provinsi Sumatera Barat. Hasil pemeriksaan terhadap kapal tersebut tidak ditemukan adanya dugaan kegiatan *destructive fishing*, indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong taat.
- 14.) Rico Gusmanto, adalah pemilik KM. Anak Rantau 01 yang berlokasi di Pantai Barat, Provinsi Sumatera Barat. Hasil pemeriksaan terhadap kapal tersebut tidak ditemukan adanya dugaan kegiatan *destructive fishing*, indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong taat.
- 15.) Ahmad Sanusi, adalah pemilik KM. Zahy yang berlokasi di Pantai Barat, Provinsi Sumatera Barat. Hasil pemeriksaan terhadap kapal tersebut tidak ditemukan adanya dugaan kegiatan *destructive fishing*, indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong taat.
- 16.) Yendri Efendi, adalah pemilik KM. Diah 03 yang berlokasi di Pantai Barat, Provinsi Sumatera Barat. Hasil pemeriksaan terhadap kapal tersebut tidak ditemukan adanya dugaan kegiatan *destructive fishing*, indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong taat.
- 17.) Amir, adalah pemilik KM. Tanpa Nama yang berlokasi di Pantai Barat, Provinsi Sumatera Barat. Hasil pemeriksaan terhadap kapal tersebut tidak ditemukan adanya dugaan kegiatan *destructive fishing*, indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong taat.
- 18.) Syamsurizal, adalah pemilik KM. Fadhil 01 yang berlokasi di Pantai Barat, Provinsi Sumatera Barat. Hasil pemeriksaan terhadap kapal tersebut tidak ditemukan adanya dugaan kegiatan *destructive fishing*, indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong taat.
- 19.) Ibrahim, adalah pemilik KM. Tanpa Nama yang berlokasi di Pantai Barat, Provinsi Sumatera Barat. Hasil pemeriksaan terhadap kapal tersebut tidak ditemukan adanya dugaan kegiatan *destructive fishing*, indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong taat.
- 20.) Rahmaddi, adalah pemilik KM. Nada 01 yang berlokasi di Pantai Barat, Provinsi Sumatera Barat. Hasil pemeriksaan terhadap kapal tersebut tidak ditemukan adanya dugaan kegiatan *destructive fishing*, indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong taat.

- 21.) Yuang Manih, adalah pemilik KM. Runni 01 yang berlokasi di Pantai Barat, Provinsi Sumatera Barat. Hasil pemeriksaan terhadap kapal tersebut tidak ditemukan adanya dugaan kegiatan *destructive fishing*, indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong taat.
- 22.) Erizal, adalah pemilik KM. Murni yang berlokasi di Pantai Barat, Provinsi Sumatera Barat. Hasil pemeriksaan terhadap kapal tersebut tidak ditemukan adanya dugaan kegiatan *destructive fishing*, indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong taat.
- 23.) Asep Putra, adalah pemilik KM, Runni 03 yang berlokasi di Pantai Barat, Provinsi Sumatera Barat. Hasil pemeriksaan terhadap kapal tersebut tidak ditemukan adanya dugaan kegiatan *destructive fishing*, indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong taat.
- 24.) Mawan, adalah pemilik KM. Mawan yang berlokasi di aliran Sungai Padang Guci, Desa Air Kering II, Kecamatan Padang Guci Hilir, Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan adanya dugaan kegiatan *destructive fishing*, dengan bukti berupa alat setrum. Selanjutnya, barang bukti berupa alat setrum diamankan oleh Satwas SDKP Bengkulu, dan sebanyak 2 (dua) ekor ikan hasil tangkapan dilakukan Uji Forensik di Laboratorium BKIPM Bengkulu. Indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong tidak taat.
- 25.) Surya Baru, adalah pemilik KM. Surya Baru yang berlokasi di Pelabuhan Pendaratan Ikan Pasar Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Dari hasil pemeriksaan pada kapal tersebut, ditemukan adanya dugaan kegiatan *destructive fishing*, dengan bukti berupa alat tangkap *mini trawl*. Indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong tidak taat.
- 26.) Hikma, adalah pemilik KM. Hikma yang berlokasi di Pelabuhan Pendaratan Ikan Pasar Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Dari hasil pemeriksaan pada kapal tersebut, ditemukan adanya dugaan kegiatan *destructive fishing*, dengan bukti berupa alat tangkap *mini trawl*. Indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong tidak taat.
- 27.) Sumut Sejahtera, adalah pemilik KM. Sumut Sejahtera yang berlokasi di Pelabuhan Pendaratan Ikan Pasar Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Dari hasil pemeriksaan pada kapal tersebut, ditemukan adanya dugaan kegiatan *destructive fishing*, dengan bukti berupa alat tangkap *mini trawl*. Indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong tidak taat.

- 28.) Viga Putri, adalah pemilik KM. Viga Putri yang berlokasi di Pelabuhan Pendaratan Ikan Pasar Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Dari hasil pemeriksaan pada kapal tersebut, ditemukan adanya dugaan kegiatan *destructive fishing*, dengan bukti berupa alat tangkap *mini trawl*. Indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong tidak taat.
- 29.) Katar, adalah pemilik KM. Katar yang berlokasi di Pelabuhan Pendaratan Ikan Pasar Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Dari hasil pemeriksaan pada kapal tersebut, ditemukan adanya dugaan kegiatan *destructive fishing*, dengan bukti berupa alat tangkap *mini trawl*. Indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong tidak taat.
- 30.) Bustami, adalah pemilik KM. Tanpa Nama yang berlokasi di Pulau Tuangku, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan adanya dugaan kegiatan *destructive fishing* dengan bukti alat bantu penangkap ikan berupa kompresor. Indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong tidak taat.
- 31.) Dian, adalah pemilik KM. Dian yang berlokasi di Pelabuhan Pendaratan Ikan Pasar Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Dari hasil pemeriksaan pada kapal tersebut, ditemukan adanya dugaan kegiatan *destructive fishing*, dengan bukti berupa alat tangkap *mini trawl*. Indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong tidak taat.
- 32.) Tapacol, adalah pemilik KM. Tapacol yang berlokasi di Pelabuhan Pendaratan Ikan Pasar Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Dari hasil pemeriksaan pada kapal tersebut, ditemukan adanya dugaan kegiatan *destructive fishing*, dengan bukti berupa alat tangkap *mini trawl*. Indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong tidak taat.
- 33.) Putra, adalah pemilik KM. Putra yang berlokasi di Pelabuhan Pendaratan Ikan Pasar Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Dari hasil pemeriksaan pada kapal tersebut, ditemukan adanya dugaan kegiatan *destructive fishing*, dengan bukti berupa alat tangkap *mini trawl*. Indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong tidak taat.
- 34.) Aldi, adalah pemilik KM. Aldi yang berlokasi di Pelabuhan Pendaratan Ikan Pasar Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Dari hasil pemeriksaan pada kapal tersebut, ditemukan adanya dugaan kegiatan

- destructive fishing*, dengan bukti berupa alat tangkap *mini trawl*. Indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong tidak taat.
- 35.) Zaki, adalah pemilik KM. Zaki 03 yang berlokasi di Pelabuhan Pendaratan Ikan Pasar Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Dari hasil pemeriksaan pada kapal tersebut, ditemukan adanya dugaan kegiatan *destructive fishing*, dengan bukti berupa alat tangkap *mini trawl*. Indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong tidak taat.
- 36.) Tunas Baru, adalah pemilik KM. Tunas Baru yang berlokasi di Pelabuhan Pendaratan Ikan Pasar Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Dari hasil pemeriksaan pada kapal tersebut, ditemukan adanya dugaan kegiatan *destructive fishing*, dengan bukti berupa alat tangkap *mini trawl*. Indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong tidak taat.
- 37.) Samsu Rizal, adalah pemilik KM. Fadhil-01 yang berlokasi di Perairan Pantai Barat, Provinsi Sumatera Barat. Hasil pemeriksaan terhadap kapal tersebut tidak ditemukan adanya dugaan kegiatan *destructive fishing*, indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong taat.
- 38.) Risdianto, adalah pemilik KM. Andre-04 yang berlokasi di Perairan Pantai Barat, Provinsi Sumatera Barat. Hasil pemeriksaan terhadap kapal tersebut tidak ditemukan adanya dugaan kegiatan *destructive fishing*, indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong taat.
- 39.) Jarial, adalah pemilik KM. Puspa Sari-04 yang berlokasi di Perairan Pantai Barat, Provinsi Sumatera Barat. Hasil pemeriksaan terhadap kapal tersebut tidak ditemukan adanya dugaan kegiatan *destructive fishing*, indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong taat.
- 40.) Dori Yurahman, adalah pemilik KM. Tanpa Nama yang berlokasi di Perairan Pantai Barat, Provinsi Sumatera Barat. Dari hasil pemeriksaan pada kapal tersebut, ditemukan adanya dugaan kegiatan *destructive fishing*, dengan bukti berupa alat tangkap *mini trawl*. Indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong tidak taat.
- 41.) Basril, adalah pemilik KM. ABC yang berlokasi di Perairan Pantai Barat, Provinsi Sumatera Barat. Dari hasil pemeriksaan pada kapal tersebut, ditemukan adanya dugaan kegiatan *destructive fishing*, dengan bukti berupa alat tangkap *mini trawl*. Indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong tidak taat.

- 42.) Sandra Saputra, adalah pemilik KM. Putri Tunggal-01 yang berlokasi di Perairan Pantai Barat, Provinsi Sumatera Barat. Dari hasil pemeriksaan pada kapal tersebut, ditemukan adanya dugaan kegiatan *destructive fishing*, dengan bukti berupa alat tangkap *mini trawl*. Indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong tidak taat.
- 43.) Nurman, adalah pemilik KM. Farakal Salam-02 yang berlokasi di Perairan Pantai Barat, Provinsi Sumatera Barat. Dari hasil pemeriksaan pada kapal tersebut, ditemukan adanya dugaan kegiatan *destructive fishing*, dengan bukti berupa alat tangkap *mini trawl*. Indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong tidak taat.
- 44.) Zelda Mendri, adalah pemilik KM. Anak Rantau yang berlokasi di Perairan Pantai Barat, Provinsi Sumatera Barat. Hasil pemeriksaan terhadap kapal tersebut tidak ditemukan adanya dugaan kegiatan *destructive fishing*, indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong taat.
- 45.) Irwan, adalah pemilik KM. Bintang Timur-03 yang berlokasi di Perairan Pantai Barat, Provinsi Sumatera Barat. Hasil pemeriksaan terhadap kapal tersebut tidak ditemukan adanya dugaan kegiatan *destructive fishing*, indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong taat.
- 46.) Asril Tanjung, adalah pemilik KM. Farid-02 yang berlokasi di Perairan Pantai Barat, Provinsi Sumatera Barat. Hasil pemeriksaan terhadap kapal tersebut tidak ditemukan adanya dugaan kegiatan *destructive fishing*, indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong taat.
- 47.) Riki Chandra, adalah pemilik KM. Riak Gunung-Gunung 01 yang berlokasi di Perairan Pantai Barat, Provinsi Sumatera Barat. Hasil pemeriksaan terhadap kapal tersebut tidak ditemukan adanya dugaan kegiatan *destructive fishing*, indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong taat.
- 48.) Mariza Efendi, adalah pemilik KM. Herwina yang berlokasi di Perairan Pantai Barat, Provinsi Sumatera Barat. Hasil pemeriksaan terhadap kapal tersebut tidak ditemukan adanya dugaan kegiatan *destructive fishing*, indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong taat.
- 49.) Afriladi, adalah pemilik KM. NDL-01 yang berlokasi di Perairan Pantai Barat, Provinsi Sumatera Barat. Hasil pemeriksaan terhadap kapal tersebut tidak ditemukan adanya dugaan kegiatan *destructive fishing*, indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong taat.

- 50.) Riki Afrinas, adalah pemilik KM. Popy-01 yang berlokasi di Perairan Pantai Barat, Provinsi Sumatera Barat. Hasil pemeriksaan terhadap kapal tersebut tidak ditemukan adanya dugaan kegiatan *destructive fishing*, indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong taat.
- 51.) Riko Saputra, adalah pemilik KM. Yola yang berlokasi di Perairan Pantai Barat, Provinsi Sumatera Barat. Hasil pemeriksaan terhadap kapal tersebut tidak ditemukan adanya dugaan kegiatan *destructive fishing*, indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong taat.
- 52.) Rahmaddi, adalah pemilik KM. Nada-01 yang berlokasi di Perairan Pantai Barat, Provinsi Sumatera Barat. Hasil pemeriksaan terhadap kapal tersebut tidak ditemukan adanya dugaan kegiatan *destructive fishing*, indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong taat.
- 53.) Muntasir, adalah pemilik KM. SKPT GT.5 yang berlokasi di Pelabuhan Balokan, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Hasil pemeriksaan terhadap kapal tersebut tidak ditemukan adanya dugaan kegiatan *destructive fishing*, indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong taat.
- 54.) Syauqas, adalah pemilik KM. Nelayan GT. 5 yang berlokasi di Pelabuhan Balokan, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Hasil pemeriksaan terhadap kapal tersebut tidak ditemukan adanya dugaan kegiatan *destructive fishing*, indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong taat.
- 55.) Zulhijriansyah, adalah pemilik KM. Makmur Nelayan GT. 5 yang berlokasi di Pelabuhan Balokan, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Hasil pemeriksaan terhadap kapal tersebut tidak ditemukan adanya dugaan kegiatan *destructive fishing*, indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong taat.
- 56.) Ibrahim, adalah pemilik KM. Tanpa Nama yang berlokasi di Pelabuhan Pria Laot, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Hasil pemeriksaan terhadap kapal tersebut tidak ditemukan adanya dugaan kegiatan *destructive fishing*, indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong taat.
- 57.) Panglima Laot Pria Laot, adalah pemilik KM. Tanpa Nama yang berlokasi di Pelabuhan Pria Laot, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Hasil pemeriksaan terhadap kapal tersebut tidak ditemukan adanya dugaan kegiatan *destructive fishing*, indikasi ketaatan pelaku usaha tergolong taat.

Alokasi anggaran yang digundakan untuk mendukung tercapainya Sasaran Strategis 2 pada awalnya adalah sebesar Rp 307.500.000,00. Namun, pada Bulan Maret 2020, Pangkalan PSKDP Lampulo mengalami revisi anggaran sehingga alokasi anggaran untuk mencapai Sasaran Strategis 2 sebesar RP 226.600.000,00. Sampai dengan bulan Desember tahun 2020, anggaran telah terserap sebesar Rp 201.363.252,00 (88,86%), anggaran terserap secara efisien. Data realisasi anggaran diambil dari Aplikasi SAS.

Sasaran Strategis-3: Terselenggaranya Pengawasan Kepatuhan Pemangku Kepentingan Perikanan

Pada Sasaran Strategis 3, terdiri dari 1 Indikator Kinerja Utama, yang diuraikan sebagai berikut:

IKU-3: “Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang Diperiksa Kepatuhan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Pada IKU “Jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang Diperiksa Kepatuhan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”, terdiri dari komponen sebagai berikut:

- Persentase Kapal Perikanan yang Diperiksa Kepatuhan Lingkup UPT Pangkalan PSDKP Lampulo;
- Persentase Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang Diperiksa Kepatuhan Lingkup UPT Pangkalan PSDKP Lampulo;
- Persentase Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Diperiksa Kepatuhan;
- Persentase Unit Usaha Distribusi Hasil Perikanan yang Diperiksa Kepatuhan Lingkup UPT Pangkalan PSDKP Lampulo.

Pada IKU-3, capaian kinerja sebesar 100,00%. Informasi capaian IKU-3 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.6. Hasil Capaian IKU “Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang Diperiksa Kepatuhan nya Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		CAPAIAN	PERSEN
	TAHUN	TW I		
Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang Diperiksa Kepatuhan nya Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	100%	100%	100%	100%
		TW II	CAPAIAN	PERSEN
		100%	100%	100%
		TW III	CAPAIAN	PERSEN
		100%	100%	100%
		TW IV	CAPAIAN	PERSEN
		100%	100%	100%

Target IKU-3 pada tahun 2020, sebesar 100%, dengan capaian sebesar 100%, maka persentase capaian sebesar 100%. Adapun rincian hasil capaian IKU 3, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.7. Rincian Capaian IKU “Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang Diperiksa Kepatuhan nya Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Persentase Kapal Perikanan yang Diperiksa Kepatuhan nya lingkup UPT Pangkalan PSDKP Lampulo	100%	100%	100%
Persentase Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang Diperiksa Kepatuhan nya lingkup UPT Pangkalan PSDKP Lampulo	100%	100%	100%
Persentase Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Diperiksa Kepatuhan nya lingkup UPT Pangkalan PSDKP Lampulo	100%	100%	100%
Persentase Unit Usaha Distribusi Hasil Perikanan yang Diperiksa Kepatuhan nya lingkup UPT Pangkalan PSDKP Lampulo	100%	100%	100%

Terdapat beberapa komponen dalam pencapaian kinerja yang berkontribusi pada pencapaian kinerja IKU “Jumlah pelaku usaha perikanan yang diperiksa kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan”, antara lain sebagai berikut:

1.) **Persentase Kapal Perikanan yang Diperiksa Kepatuhannya Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo**

Komponen IKU “Persentase Kapal Perikanan yang Diperiksa Kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” sampai dengan bulan Desember 2020 telah tercapai sebesar 100,00% dari target 100,00%. Persentase ini didapat karena telah melengkapi dokumen HPK Berangkat (0,25), HPK Datang (0,25), Surat Perintah Tugas (0,25) dan Pelaporan Simwaskan (0,25) yang apabila ditotalkan menjadi poin 1 (satu) capaian. Target yang ada pada RKAKL Pangkalan PSDKP Lampulo adalah sebanyak 751 unit kapal dalam tahun 2020 yang dibagi ke setiap triwulan. Sampai dengan bulan Desember 2020, jumlah ketaatan kapal perikanan telah tercapai sebanyak 1.361 unit yang terdiri dari 424 unit Kapal Izin Pusat dan 937 Unit Kapal Izin Daerah. Jumlah ketaatan kapal perikanan telah terealisasi dengan adanya bukti capaian (SPT, HPK B, HPK D, dan Pelaporan Simwaskan). Sampai dengan bulan Desember tahun 2020, Pangkalan PSDKP Lampulo mendapatkan capaian sebanyak 100%.

Adapun rincian jumlah ketaatan kapal perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.8. Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa Kepatuhannya Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo

No.	UPT/Satker/Pos PSDKP	IJIN PUSAT/ZEEI LAUT LEPAS	IJIN DAERAH/ TERITORIAL & PEDALAMAN
1	PANGKALAN PSDKP LAMPULO	10	233
2	SATWAS SDKP ACEH BARAT	-	31
3	SATWAS SDKP SIMEULUE	-	133
4	SATWAS SDKP SIBOLGA	253	144
5	SATWAS SDKP PADANG	154	370
6	SATWAS SDKP BENGKULU	7	26
Jumlah		424	937

2.) Persentase Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang Diperiksa Kepatuhan nya Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo

Komponen IKU “Persentase Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang Diperiksa Kepatuhan nya lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” sampai dengan bulan Desember tahun 2020 telah tercapai sebesar 100,00% dari target 100,00%. Persentase ini didapat karena telah melengkapi dokumen Surat Perintah Tugas (0,25), Pemeriksaan Administrasi (0,50) dan Pelaporan Simwaskan (0,25) yang apabila ditotalkan menjadi poin 1 (satu) capaian. Capaian Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang Diperiksa Kepatuhan nya Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo sampai dengan bulan Desember tahun 2020, yaitu sebanyak 38 unit, yang terdiri dari 29 unit pengolahan ikan skala kecil dan 9 unit pengolahan ikan skala besar. Dari ketaatan unit usaha pengolahan ikan, telah terealisasi dengan adanya bukti capaian, sehingga realisasi didapat sebesar 100%. Adapun rincian capaian pada komponen “Persentase Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang Diperiksa Kepatuhan nya Lingkup UPT Pangkalan PSDKP Lampulo”, antara lain sebagai berikut:

Tabel 3.9. Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang Diperiksa Kepatuhan nya Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo

No.	Unit Pengolahan Ikan	Tanggal Pengawasan	Alamat	Skala Usaha	Izin	Indikasi Ketaatan
TRIWULAN I 2020						
1.	UD. IKANIA TUNA	06 Februari 2020	Komplek Cendana Tahap IX RT. 003 RT. 009, Kel. Koto Baru Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang	Kecil	0115/03.07/MK/SIUP/I/2019, tanggal 23 Januari 2019	Taat
2.	UD. SINAR MAS	19 Februari 2020	Jalan Gang Albarokah 2 RT.009 / RW.02, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu	Kecil	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil dengan NO: 1084/08.04/PK/X/2018 Tanggal 31 Oktober 2018	Taat
3.	PT. YAKIN PASIFIK TUNA	19 Februari 2020	Jl. Sultan Iskandar Muda, No.88 Gp. Cot Lamkuweuh, Kec. Meuraxa, Kota Banda Aceh	Besar	SIUP (Perdagangan) Menengah No. 110/01.01/PM/VII/2017/ s.d 10 Juli 2022 SITU (Surat Izin Tempat Usaha) No. 503/3450/ DPMPSTP/2019 s.d 03 Juli 2020	Taat
4.	CV. TUAH BAHARI GROUP	19 Februari 2020	Jl. Sisingamangaraja Ujung No.16, Lampulo (Komplek TPI Lampulo), Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh	Besar	SIUP Nomor: 523.3/DPMPSTP/1487/2019 (30 thn)	Taat
5.	UD. RISKI	19 Februari 2020	Desa Keude Meukek, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh	Kecil	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil No 130/01/PK/VI/2008	Taat
6.	UD. OPI	19 Februari 2020	Desa Pasar Lama, Kecamatan Labuhan Haji Tengah, Kabupaten Aceh	Kecil	-	

No.	Unit Pengolahan Ikan	Tanggal Pengawasan	Alamat	Skala Usaha	Izin	Indikasi Ketaatan
7.	CV. NAGATA TUNA	26 Februari 2020	Jl. Cut Arun 2, Punge Blang Cut, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh	Besar	SIUP Nomor: 1330-134/01-01/PK/XII/2017.P.1	Taat
8.	PT. ACEH LAMPULO JAYA BAHARI	26 Februari 2020	Jl. Sisingamangaraja Ujung No.16, Lampulo (Komplek TPI Lampulo), Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh	Besar	523.3/BP2T/852. 2016	Taat
9.	PT. AGUNG SUMATERA SAMUDERA ABADI	27 Februari 2020	Jl. Gatot Subroto No. 110, Kelurahan Pondok Batu, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara	Besar	0025./02.17./SUP-PM./III./2001(PP)	Tidak Taat
10.	UD. YANI KETY	11 Maret 2020	Jalan Enggano Pantai Pasar Bengkulu RT.005 RW.03 Kelurahan Pasar Bengkulu, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu	Kecil	Surat Keterangan Izin Usaha dari Kelurahan Setempat	Taat
TRIWULAN II 2020						
11.	UPI ISKANDAR	29 April 2020	Desa Padang Seurahet, Johan Pahlawasn, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh	Kecil	-	Taat
12.	UPI SUARDI	19 Mei 2020	Desa Padang Seurahet, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh	Kecil	-	Taat
13.	UPI HARIANTO	28 Mei 2020	Jalan Padangsidimpuan – Sibolga, Kelurahan Hajoran Indah, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara	Kecil	-	Taat
14.	UPI MARIANA SIHOMBING	28 Mei 2020	Jalan Padangsidimpuan – Sibolga, Kelurahan Hajoran Indah, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara	Kecil	-	Taat
15.	UPI SEKWAN TAMBA	28 Mei 2020	Jalan Padangsidimpuan – Sibolga, Kelurahan Hajoran Indah, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara	Kecil	-	Taat
16.	UPI RISKI PURBA	28 Mei 2020	Jalan Padangsidimpuan – Sibolga, Kelurahan Hajoran Indah, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara	Kecil	-	Taat
17.	UPI EVA SIBURIAN	28 Mei 2020	Jalan Padangsidimpuan – Sibolga, Kelurahan Hajoran Indah, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara	Kecil	-	Taat
18.	UPI MAK AGUS LIMBONG	28 Mei 2020	Jalan Padangsidimpuan – Sibolga, Kelurahan Hajoran Indah, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara	Kecil	-	Taat
19.	UPI JANTI SIBURIAN	28 Mei 2020	Jalan Padangsidimpuan – Sibolga, Kelurahan Hajoran Indah, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara	Kecil	-	Taat
20.	UPI SARI	24 Juni 2020	Desa Jumpulo Rayeuk, Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh	Mikro	-	Taat
21.	UPI SULAIMAN	24 Juni 2020	Desa Jumpulo Rayeuk, Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh	Mikro	-	Taat

No.	Unit Pengolahan Ikan	Tanggal Pengawasan	Alamat	Skala Usaha	Izin	Indikasi Ketaatan
22.	UPI AZMAN	24 Juni 2020	Desa Jumpulo Rayeuk, Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh	Mikro	-	Taat
TRIWULAN III 2020						
23.	UPI YERNI	07 Juli 2020	Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat	Mikro	-	Taat
24.	UPI RIZAL	08 Juli 2020	Desa Padang Seurahet, Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh	Mikro	-	Taat
25.	CV. HORIZON GROUP	08 Juli 2020	Jl. Gatot Subroto Kelurahan Pondok Batu, Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara	Besar	SIUP (Perdagangan) Menengah No. 0001/02.16/SIUP-PM/1/2016 (PP) DU.I tanggal 01 Desember 2016 (masa berlaku s.d. 5 tahun dari tanggal penerbitan) oleh Dinas Pelayanan Terpadu Kabupaten Tapanuli Tengah	Taat
26.	UPI ETRAWATI	21 Juli 2020	Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat	Mikro	-	Taat
27.	UKM IKAN KERING TEPUNG JN	22 Juli 2020	Jalan Raya Sungai Hitam RT.012 RW.23, Kelurahan Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu	Mikro	Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil dengan NO: 503/011/IUMK/ PK/VII/2017 Tanggal 05 Juli 2017	Taat
28.	UPI TITIN SUMARNI	27 Juli 2020	Kecamatan Bungus teluk kabung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat	Mikro	-	Taat
29.	UPI ARDISON	10 Agustus 2020	Desa Taluak, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat	Mikro	-	Taat
30.	UPI IRWANDI	11 Agustus 2020	Kuala Panggong, Desa Ujung Karang, Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh	Mikro	-	Taat
31.	UD. ASSA Padangsidempuan	13 Agustus 2020	Jalan Untemanis, Desa/Kelurahan Losung Batu, Kec.amatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara	Besar	SIUP (Perdagangan) Besar Hasil Perikanan No. 9120101483704/ diterbitkan tanggal 30 April 2019 NIB (Nomor Induk Berusaha) No. 9120101483704 diterbitkan 30 April 2019	Taat
32.	UPI NELI PUSPITA	15 Agustus 2020	Desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh	Mikro	sedang dalam tahap pengurusan	Taat
33.	UPI HERLINO	15 Agustus 2020	Desa Haloban Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh	Mikro	sedang dalam tahap pengurusan	Taat
34.	PT. Hasil Laut Sibolga	25 Agustus 2020	Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Pondok Batu, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara	Besar	SIUP (Perdagangan) Besar Hasil Perikanan No. 0220205201843/ diterbitkan tanggal 14 Februari 2020 NIB (Nomor Induk Berusaha) No. 02205201843 diterbitkan 14 Februari 2020	Taat
35.	UPI KASMAYANTI	31 Agustus 2020	Pasar Laban, Kelurahan Bungusatan, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat	Mikro	-	Taat
36.	KOPERASI ACEH FOOD FISH JELLY	03 September 2020	Jalan Rama Setia, Kelurahan Lampaseh, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh	Mikro	TDP-Koperasi Nomor 01024700586 Tanggal 31 Juli 2019	Taat
37.	UPI SOKA CEMARA INDAH	03 September 2020	Jalan Iskandar Muda, Kelurahan Cot Lamkeueh, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh	Mikro	SIUP Kecil Nomor 600-247/01-01/PK/XII/2014.P.I	Taat

No.	Unit Pengolahan Ikan	Tanggal Pengawasan	Alamat	Skala Usaha	Izin	Indikasi Ketaatan
38.	CV. NOVIRA ABADI	08 September 2020	Jalan Tengku Batee Troen, Kelurahan Lamdingin, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh	Besar	SIUP No. Proyek 202009-0114-3229-5813-509 tanggal 01 September 2020 Nomor Induk Berusaha (NIB): 0220200200043 dengan Kode KBLI 46100 (Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa / Fee atau Kontrak dan 52102 (Aktivitas Cold Storage) diterbitkan tanggal 04 Februari 2020, perubahan kedua tanggal 11 Februari 2020	Taat

3.) Persentase Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Diperiksa Kepatuhan nya lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo

Komponen IKU “Persentase Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Diperiksa Kepatuhan nya lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” sampai dengan bulan Desember tahun 2020, telah tercapai sebesar 100,00 % dari target 100,00 %. Persentase ini didapat karena telah melengkapi dokumen Surat Perintah Tugas (0,25), Berita Acara Hasil Pengawasan (0,50), dan Pelaporan Simwaskan (0,25) yang apabila ditotalkan menjadi poin 1 (satu) capaian. Capaian jumlah unit usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhan nya lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo sebanyak 39 unit usaha budidaya ikan dengan persentase pemeriksaan sebesar 100%. Adapun rincian Komponen IKU “Persentase Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Diperiksa Kepatuhan nya Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” pada tahun 2020”, antara lain sebagai berikut:

Tabel 3.10. Jumlah Pelaku Usaha Pembudidayaan Ikan yang Diperiksa Kepatuhan nya Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo

No.	Nama Perusahaan / Pemilik	Lokasi	Jenis Ikan	Indikasi Ketaatan
TRIWULAN I 2020				
1.	Bintang Aquarium / Syafril	Jl. Teuku Umar No. 147, Gampong Seutui, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh	Arwana (Silver Brazil dan Banjar Red)	Taat
2.	Merak Jingga / Intan Tiranda	Jl. Teuku Umar No. 141, Gampong Seutui, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh	Arwana (Golden, Silver Albino, dan Banjar)	Taat
3.	Merak Jingga 2 / Muammar Kadafi	Jl. Teuku Umar, Gampong Seutui, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh	Arwana Golden Red dan Arwana Silver	Taat
4.	Aneka Tani / Barmazi	Jl. Teuku Umar, Gampong Seutui, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh	Arwana Golden Red dan Arwana Silver	Taat

No.	Nama Perusahaan / Pemilik	Lokasi	Jenis Ikan	Indikasi Ketaatan
5.	Dunia Ikan / Eka Sri Handayani	Jl. Teuku Umar, Gampong Seutui, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh	Arwana Super Red (Bersertifikat), Golden Red, dan Silver Albino)	Taat
6.	Pisces Aquarium / Assyfa Salsabila Arsaf)	Jl. Teuku Umar, Gampong Seutui, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh	Arwana Super Red (No.Sertifikat: 2868714923 dan 2868715928); Banjar Red; Silver; Pind, Golden Red	Taat
7.	Toko X-One / M.Risky	Jl. Teuku Umar, Gampong Seutui, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh	Arwana Super Red (No.Sertifikat: 888111888023092), Banjar, Golden Red, Golden Red, Silver	Taat
8.	Kelompok Marsose / Muklis	Gampong Asoe Nanggroe, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh	Ikan Kakap Putih	Taat
9.	Hendriansyah	Deyah Baro, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh	Udang Vaname	Taat
10.	Marzuki	Gampong Ruyung, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh	Udang Vaname	Taat
11.	Silman Arizi,S.Pi	Gampong Ruyung, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh	Udang Vaname	Taat
12.	Tunas Karya / Nasrial	Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat	Ikan Patin dan Ikan Lele	Taat
13.	Pokdakan Rahmad Alam	Gampong Indra Damai, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh	Ikan Nila (<i>Oreochromis niloticus</i>)	Taat
14.	Rahmat Bahri	Gampong Kuala Tuha, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh	Ikan kakap	Taat
15.	Altarupat Jaya / Ridwansyah	Gampong Kuala Tuha, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh	Ikan Nila (<i>Oreochromis niloticus</i>)	Taat
16.	PT. Maju Tambak Sumur / Frans Antony	Jalan Desa Kota Agung, Kecamatan Air Besi KM 42, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu	Udang Vaname	Taat
17.	Mitra Benih / Tarzan	Jalan Ciranduy, Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu	Ikan Lele	Taat
TRIWULAN II 2020				
18.	Iwan Afriadi	Gampong Ruyung, Lorong Blang Ara, Jalan Laksamana Malahayati, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh	Udang Vaname	Taat

No.	Nama Perusahaan / Pemilik	Lokasi	Jenis Ikan	Indikasi Ketaatan
19.	Muhammad Nazar	Gampong Paya Kameng, Jalan Laksamana Malahayati, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh	Udang Vaname	Taat
20.	UD.Sahata Saoloan / Rudianto	Desa Tapian Nauli I Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara	Udang Vaname	Taat
21.	PT. Berkat Kasih Karunia / Rudolf Pardede	Jalan Padangsidimpuan KM 17, Muara Nibung, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara	Udang Vaname	Taat
TRIWULAN III 2020				
22.	PT Berkat Kasih Karunia (Rudolf Pardede)	Jln.Padangsidimpuan Km.17 Muara Nibung, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara	Udang Vaname	Taat
23.	Bapak Hanafi	Kelurahan Bungus Timur, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat	Lele Dumbo	Taat
24.	PT.Laut Biru Bengkulu/ Samo	Desa Pasar Bembah Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu	Udang Vaname	Taat
25.	Bapak Zulfadli	Desa Deah Raya, Alue Naga, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh	Udang Vaname	Taat
26.	Bapak Irwandi	Kelurahan Bungus Timur, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat	Ikan Lele, Ikan Nila, dan Ikan Patin	Taat
27.	Bapak Akmal Bukhori	Kelurahan Bungus Timur, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat	Udang Vaname	Taat
28.	Bapak Saksa Wiza Raihan	Desa Suak Pandan, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh	Udang Vaname	Taat
29.	Desa Pulau Balai	Desa Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh	Ikan Kakap Putih	Taat
30.	CV.YOEL SILAIT MAJU BERSAMA	Desa Ujung Silait, Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh	Lobster	Taat
31.	Bapak Saweu Rakan / Ibnu Jarir	Gampong Lampageu, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh	Udang Vaname	Taat
32.	Bapak Marhaban	Gampong Lampageu, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh	Udang Vaname	Taat

No.	Nama Perusahaan / Pemilik	Lokasi	Jenis Ikan	Indikasi Ketaatan
33.	Bapak Amri	Gampong Lam Teungoh, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh	Udang Vaname	Taat
34.	Bapak Mahyudin	Gampong Alue Naga, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh	Udang Vaname	Taat
35.	Bapak Said Mustafa	Gampong Alue Naga, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh	Udang Vaname	Taat
36.	Bapak Eviady	Gampong Lamnga, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh	Udang Vaname	Taat
37.	Bapak Muktar Lubis (Iwan)	Jalan Pasir Kandang, Kelurahan Pasie Nan Tigo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat	Udang Vaname	Taat
38.	UD. Sari Inti Tani / Amiruddin	Desa Suak Pandan, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh	Udang Vaname	Taat
TRIWULAN IV 2020				
39.	Mitra Rakyat/ Ibu. Ratih Fajarika Anugrah Dewanti	Gampong Suak Seukee, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh	Udang Vaname	Taat

4.) Persentase Unit Usaha Distribusi Hasil Perikanan yang Diperiksa Kepatuhan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo

Komponen IKU “Persentase Unit Usaha Distribusi Hasil Perikanan yang Diperiksa Kepatuhan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” telah tercapai sebesar 100%. Pelaku usaha distribusi ikan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang dihitung sampai dengan tahun 2020, merupakan pelaku usaha Distribusi Hasil Perikanan Ekspor, Distribusi Hasil Perikanan Impor, Distribusi Hasil Perikanan Dalam Negeri, dan Penerbitan LVHPI. Adapun rincian jumlah pelaku usaha distribusi. Adapun rincian jumlah pelaku usaha distribusi, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.11. Komponen IKU “Persentase Unit Usaha Distribusi Hasil Perikanan yang Diperiksa Kepatuhan nya Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” Melalui Pemeriksaan Distribusi Hasil Perikanan Ekspor

No.	Nama Perusahaan	Alamat	Perizinan Ekspor	Jenis dan Jumlah Produk yang Diekspor	Indikasi Ketaatan
TRIWULAN II 2020					
1.	PT. Yakin Pasifik Tuna	Jl. Sultan Iskandar Muda No. 88, Gampong Cot Lamkuweuh, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh	1. Packing List Nomor YADE 20003 Tanggal 14 April 2020	1. FROZEN SKIPJACK WHOLE ROUND 22.760.000 kg	Taat
			2. KID-4 / Izin Ekspor Karantina Ikan Nomor P8KI-D446.0IV2020002074 Tanggal 16 April 2020	2. FROZEN BULLET TUNA WHOLE ROUND 2.240.000 kg	
			3. Nomor Pengajuan PEB: 010700-000248-20200416-010060		
TRIWULAN III 2020					
2.	PT. Anugerah Samudera Hindia	Jalan Gatot Subroto No. 106, Kelurahan Pondok Batu, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara	1. Sertifikat Pelepasan Nomor P8/KI-D12/46.0/VIII/2019/000123 tanggal 07 Agustus 2019 TOTAL 47.430 kg	1. FROZEN SKIPJACK TUNA WHOLE ROUND 2. FROZEN YELLOWFIN TUNA WHOLE ROUND	Taat
			2. Sertifikat Pelepasan Nomor P8/KI-D12/46.0/VIII/2019/000124	1. FROZEN SKIPJACK TUNA WHOLE ROUND 2. FROZEN YELLOWFIN TUNA WHOLE ROUND	

Tabel 3.12. Komponen IKU “Persentase Unit Usaha Distribusi Hasil Perikanan yang Diperiksa Kepatuhan nya Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” Melalui Pemeriksaan Distribusi Hasil Perikanan Impor

No.	Nama Perusahaan / Penanggung jawab	Tanggal Pengawasan	Alamat	Perizinan Impor	Jenis Produk yang Diimpor	Indikasi Ketaatan
TRIWULAN III 2020						
1.	Toko Bogor / Vera Sanny	29 September 2020	Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Peunayong, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh	-	Ikan Salmon	-

No.	Nama Perusahaan / Penanggung jawab	Tanggal Pengawasan	Alamat	Perizinan Impor	Jenis Produk yang Diimpor	Indikasi Ketaatan
2.	Simpang Lima Grocery	29 September 2020	Pante Pirak Lama, Jalan H. Dimurthala Kuta Alam Nomor 19, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh	-	Ikan Salmon	-
TRIWULAN IV 2020						
3.	PT. Kelola Pangan Indonesia / Syukri	01 Oktober 2020	Jalan Sultan Iskandar Muda Nomor 88, Gampong Cot Lamkuweuh, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh	HC Nomor 114893 oleh PT. Agro Boga Utama dengan Izin Pemasukan Hasil Perikanan Indonesia Nomor: 04.PI-53.19.0927 untuk produk Atlantic Salmon Fillet sebanyak 18.795 kg dari Chile kemasan, masa berlaku sampai dengan 30 Oktober 2019.	Ikan Salmon	-

Tabel 3.13. Komponen IKU “Persentase Unit Usaha Distribusi Hasil Perikanan yang Diperiksa Kepatuhannya Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” Melalui Pemeriksaan Distribusi Hasil Perikanan Dalam Negeri

No.	Nama Perusahaan/ UPI	Alamat Perusahaan / UPI	Penanggung Jawab	Jenis Ikan / Bahan Baku	Jenis Hasil Produk	Menggunakan Bahan Tambahan Berbahaya		Taah / Tidak Taat	Skala	Jumlah dan Jenis Ikan yang Didistribusikan	Tujuan Pemasaran
						Ya	Tidak				
TRIWULAN III 2020											
1	PT. NAGA LAUT	<i>Cold Storage</i> Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat	Yuni	Ikan Layur, Ikan Tenggiri, dan Ikan Bawal Hitam	Ikan Layur Beku, Ikan Tenggiri Beku, dan Ikan Bawal Hitam Beku	-	Tidak	Taat	Skala Mikro	Akumulasi seluruh jenis ikan yang diproduksi hingga 100 ton/bulan	Muara Angke, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta
2	JINGGO FISH	<i>Cold Storage</i> Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat	Erfa Roni	Ikan Kerapu dan Ikan Bayam	Ikan Kerapu Beku dan Ikan Bayam Beku	-	Tidak	Taat	Skala Mikro	Akumulasi seluruh jenis ikan yang diproduksi hingga 10 ton/bulan	Muara Baru, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta

Pada tahun 2020, Pangkalan PSDKP Lampulo, melalui Satwas SDKP Simeulue juga melaksanakan kegiatan pemeriksaan distribusi hasil perikanan melalui pelayanan penerbitan LVHPI. Adapun jumlah LVHPI yang telah diterbitkan sebanyak 851 lembar dari 88 pelaku usaha, namun karena terkendala penginputan Simwaskan di Satwas SDKP Simeulue, maka hasil pemeriksaan disampaikan dalam bentuk rekapitulasi penerbitan LVHPI melalui e-mail ke Direktorat PPSDP. Hal tersebut menjadi acuan Pangkalan PSDKP Lampulo di tahun 2021 untuk melatih kualitas Sumber Daya Manusia dari UPT hingga ke Satwas dan Wilker agar dapat menguasai Aplikasi SIMWASKAN dengan lebih baik lagi.

Alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung tercapainya SS-3 sebesar Rp 218.050.000,00. Realisasi anggaran SS-3 sampai dengan bulan Desember tahun 2020 sebesar Rp 207.212.633,00 (95,03%), anggaran terserap secara efisien. Data realisasi anggaran diambil dari Aplikasi SAS.

Sasaran Strategis-4: Terselenggaranya Pemantauan SDKP Menggunakan Kapal Pengawas

Pencapaian Sasaran Strategis 4, diidentifikasi dalam 1 IKU, yaitu:

IKU-4: “Persentase Cakupan WPPNRI yang Dipantau Menggunakan Kapal Pengawas Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Persentase cakupan wilayah pengawasan adalah persentase luas wilayah yang dapat dijangkau oleh armada kapal pengawas kelas A, B, C, dan E dalam setiap pelaksanaan operasi terhadap luas WPPNRI. WPPNRI (Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia) adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang dilindungi agar terhindar dari kegiatan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing)*. Kapal Pengawas di bawah Pangkalan PSDKP Lampulo adalah Kapal Pengawas Hiu-12 yang melakukan kegiatan patroli kapal perikanan di laut dengan daerah pengawasan di WPPNRI 571 dan WPPNRI 572. Adapun hasil dari capaian IKU 4, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.14. Hasil Capaian IKU “Persentase Cakupan WPP-NRI yang Dipantau Menggunakan Kapal Pengawas Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		CAPAIAN	PERSEN
	TAHUN 2020	TW I		
Persentase Cakupan WPP-NRI yang Dipantau Menggunakan Kapal Pengawas Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	1,34%	0,35%	0,35%	100%
		TW II	CAPAIAN	PERSEN
		0,50%	0,81%	120%
		TW III	CAPAIAN	PERSEN
		0,65%	1,22%	120%
		TW IV	CAPAIAN	PERSEN
1,34%	1,51%	112,69%		

Target persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo pada tahun 2020 adalah 1,34%. Pada tahun 2020, persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas telah tercapai sebesar 1,51%, maka diperoleh persentase realisasi sebesar 112,69%. Capaian tersebut menjadi dasar bagi Pangkalan PSDKP Lampulo untuk mempertahankan kinerja yang baik agar target-target kinerja di tahun 2021 dapat tercapai dengan optimal.

Alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung tercapainya SS-4 sebesar Rp 5.423.108.000,00. Realisasi anggaran SS-4 sampai dengan bulan Desember tahun 2020 sebesar Rp 5.245.759.588,00 (96,73%), anggaran terserap secara efisien. Data realisasi anggaran diambil dari Aplikasi SAS.

Sasaran Strategis-5: Terselenggaranya Pemantauan SDKP Menggunakan *Speed Boat* / *Rigid Inflatable Boat* / *Rubber Boat*

Pencapaian Sasaran Strategis 5, diidentifikasi dalam 1 IKU, yaitu:

IKU-5: “Persentase Cakupan WPP-NRI yang Dipantau dari Kegiatan *Illegal Fishing* Melalui Operasional *Speed Boat* / *Rigid Inflatable Boat* / *Rubber Boat* Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo

Persentase cakupan wilayah pengawasan adalah persentase luas wilayah yang dapat dijangkau oleh *Speed Boat* / *Rigid Inflatable Boat* / *Rubber Boat* dalam setiap pelaksanaan operasi terhadap luas WPPNRI. WPPNRI (Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia) adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut

teritorial, zona tambahan, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang dilindungi agar terhindar dari kegiatan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing)*. Kapal Pengawas jenis *Speed Boat / Rigid Inflatable Boat / Rubber Boat* di bawah Pangkalan PSDKP Lampulo yang melakukan kegiatan pengawasan kapal perikanan di laut ada 5 unit, yaitu Kapal Pengawas Napoleon 045 dan *Sea Rider* yang dioperasikan oleh Pangkalan PSDKP Lampulo; Kapal Pengawas Napoleon 036 yang dioperasikan oleh Satwas SDKP Sibolga; Kapal Pengawas Kakap yang dioperasikan oleh Satwas SDKP Padang; dan Kapal Pengawas Dolphin ST. BL. 01 yang dioperasikan oleh Satwas SDKP Bengkulu. Adapun hasil capaian IKU-5 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.15. Hasil Capaian IKU “Persentase Cakupan WPP-NRI yang Dipantau dari Kegiatan *Illegal Fishing* Melalui Operasional *Speed Boat / Rigid Inflatable Boat / Rubber Boat* Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		CAPAIAN	PERSEN
	TAHUN	TW I		
Persentase Cakupan WPP-NRI yang Dipantau dari Kegiatan <i>Illegal Fishing</i> Melalui Operasional <i>Speed Boat / Rigid Inflatable Boat / Rubber Boat</i> lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	0,064%	0,02%	0,02%	100%
		TW II	CAPAIAN	PERSEN
		0,01%	0,0373%	120%
		TW III	CAPAIAN	PERSEN
		0,05%	0,0373%	74,6%
		TW IV	CAPAIAN	PERSEN
0,064%	0,184%	120%		

Target persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan *Illegal Fishing* melalui operasional *Speed Boat / Rigid Inflatable Boat / Rubber Boat* lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo pada tahun 2020 adalah 0,064%. Pada tahun 2020, persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas telah tercapai sebesar 0,184%, maka diperoleh persentase realisasi sebesar 120%. Capaian tersebut menjadi acuan bagi Pangkalan PSDKP Lampulo untuk terus memperbaiki kinerja agar lebih baik lagi.

Alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung tercapainya SS-5 sebesar Rp 895.655.000,00. Realisasi anggaran SS-5 sampai dengan bulan Desember tahun 2020 sebesar Rp 594.027.563,00 (66,32%), anggaran terserap secara efisien. Data realisasi anggaran diambil dari Aplikasi SAS.

Sasaran Strategis-6: Terselenggaranya Pemantauan SDKP Melalui Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP)

Pencapaian Sasaran Strategis-6 diidentifikasi dalam 1 IKU, yaitu:

IKU-6: “Persentase Kesiapan Sistem Pemantauan SDKP”

IKU “Persentase Kesiapan Sistem Pemantauan SDKP” merupakan pengukuran pemenuhan data dan analisis hasil pemantauan yang disiapkan oleh bagian RMC kepada user pengguna hasil analisis. Analisis yang diberikan bersumber dari data Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) dan *Automatic Identification System* (AIS). Adapun komponen pemenuhan data, meliputi Bidang Operasi Armada (Bahan Operasi Kapal Pengawas dan Bahan Operasi *Speed Boat* Pengawas), Bidang Sumber Daya Perikanan (indikasi pelanggaran kapal perikanan dan analisis pemantauan kapal pengangkut ikan hidup), dan Bidang Sumber Daya Kelautan (Analisis Data kapal perikanan di wilayah konservasi). Capaian pada IKU-6, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.16. Hasil Capaian IKU “Persentase Kesiapan Sistem Pemantauan SDKP”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		CAPAIAN	PERSEN
	TAHUN 2020	TW I		
Persentase Kesiapan Sistem Pemantauan SDKP	70%	12,5%	12,5%	100%
		TW II	CAPAIAN	PERSEN
		12,5%	12,5%	100%
		TW III	CAPAIAN	PERSEN
		12,5%	100%	120%
		TW IV	CAPAIAN	PERSEN
		12,5%	100%	120%

Target persentase kesiapan sistem pemantauan SDKP Pangkalan PSDKP Lampulo pada tahun 2020 sebesar 70%. Sampai dengan bulan Desember 2020, kesiapan sistem pemantauan SDKP Pangkalan PSDKP Lampulo telah tercapai 100%, sehingga persentase hasil realisasi didapatkan sebesar 120%. Kesiapan sistem

pemantauan SDKP Pangkalan PSDKP Lampulo dibuktikan dengan adanya Surat Permohonan Data Sebaran Kapal oleh KP. Hiu-12 kepada Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo dengan Nomor 061.a/LAN.1-HIU 12/PW.411/VIII/2020 tentang Permintaan Data Sebaran Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang memasang VMS sebagai acuan dalam melaksanakan gelar operasi kepatuhan kapal perikanan. Surat permintaan data tersebut telah ditindaklanjuti dengan dikirimkannya Data Kapal Perikanan yang memasang VMS lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo.

Alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung tercapainya SS-6 sebesar Rp 19.000.000,00. Realisasi anggaran SS-6 sampai dengan bulan Desember tahun 2020 sebesar Rp 14.670.594,00 (77,21%), anggaran terserap secara efisien. Data realisasi anggaran diambil dari Aplikasi SAS.

Sasaran Strategis-7: Terselenggaranya Perawatan Kapal Pengawas

Pencapaian Sasaran Strategis-7, diidentifikasi dalam 1 IKU, yaitu:

IKU-7: “Jumlah Kapal Pengawas yang Siap Operasi Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Jumlah armada PSDKP lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo terdiri dari 1 (satu) unit, yaitu Kapal Pengawas Hiu-12. Kapal Pengawas Hiu-12 dalam keadaan siap untuk melakukan kegiatan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Adapun hasil capaian dari IKU-7, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.17. Hasil Capaian IKU “Jumlah Kapal Pengawas yang Siap Operasi Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		TARGET		CAPAIAN	PERSEN
	TAHUN 2019	CAPAIAN	TAHUN 2020	TW I		
Jumlah Kapal Pengawas yang Siap Operasi Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	1	1	1	1	1	100%
				TW II	CAPAIAN	PERSEN
				1	1	100%
				TW III	CAPAIAN	PERSEN
				1	1	100%
				TW IV	CAPAIAN	PERSEN
1	1	100%				

Pada tahun 2020, target jumlah kapal pengawas yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo adalah sebanyak 1 unit, yaitu Kapal Pengawas Hiu-12, merupakan kapal berbahan aluminium dengan ukuran 32 m. Capaian tahun 2020 adalah sebanyak 1 unit, maka persentase realisasi capaian sebesar 100%. Hal ini sama dengan dengan target dan capaian jumlah kapal pengawas yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo pada tahun 2019, yaitu 1 unit Kapal Pengawas Hiu-12. Kesiapan kapal pengawas dalam melakukan kegiatan operasionalnya, dibuktikan dengan adanya Laporan Kondisi Teknis yang disampaikan sebelum dan sesudah melaksanakan patroli laut.

Adapun bentuk fisik dari Kapal Pengawas Hiu-12, dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.1. Kapal Pengawas Hiu-12

Alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung tercapainya SS-7 sebesar Rp 1.573.736.000,00. Realisasi anggaran SS-6 sampai dengan bulan Desember tahun 2020 sebesar Rp 1.427.592.123,00 (90,71%), anggaran terserap secara efisien. Data realisasi anggaran diambil dari Aplikasi SAS.

Sasaran Strategis-8: Terselenggaranya Perawatan *Speed Boat* Pengawas

Pencapaian Sasaran Strategis-8, diidentifikasi dalam 1 IKU, yaitu:

IKU-8: “Jumlah *Speed Boat* yang Siap Operasi Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Jumlah *speed boat* pengawas yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo sebanyak 5 (lima) unit, yaitu Kapal Pengawas Napoleon-045 dan *Sea Rider* yang dioperasikan oleh Pangkalan PSDKP Lampulo, Kapal Pengawas Napoleon-036 yang dioperasikan oleh Satwas SDKP Sibolga, Kapal Pengawas Kakap yang dioperasikan oleh Satwas SDKP Padang, dan Kapal Pengawas Dolphin ST. BL. 01 yang dioperasikan oleh Satwas SDKP Bengkulu. Adapun hasil capaian IKU-9, disajikan pada tabel berikut:


Tabel 3.18. Hasil Capaian IKU “Jumlah *Speed Boat* yang Siap Operasi Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”


INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		TARGET		CAPAIAN	PERSEN
	TAHUN 2019	CAPAIAN	TAHUN 2020	TW I		
Jumlah <i>Speed Boat</i> Pengawas yang Siap Operasi Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	5	5	5	5	5	100%
				TW II	CAPAIAN	PERSEN
				5	5	100%
				TW III	CAPAIAN	PERSEN
				5	5	100%
				TW IV	CAPAIAN	PERSEN
5	5	100%				

Target jumlah *speed boat* pengawas yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo pada tahun 2020 adalah 5 unit, telah tercapai realisasi sebanyak 5 unit, maka diperoleh persentase realisasi sebesar 100%. Target, capaian, dan realisasi jumlah *speed boat* pengawas yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo, dibandingkan dengan tahun 2019 sama. Hal ini dikarenakan tidak ada penambahan dan pengurangan jumlah armada pengawasan di laut. Kesiapan *speed boat* pengawas dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, dibuktikan dengan adanya Laporan Kondisi Teknis yang disampaikan sebelum dan sesudah melaksanakan patroli laut.

Adapun bentuk fisik dari *speed boat* pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo, disajikan pada tabel bergambar berikut.

Tabel 3.19. *Speed Boat* Pengawas yang Siap Operasi Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo

No.	Nama <i>Speed Boat</i> Pengawas	Gambar	Lokasi
1.	Kapal Pengawas Napoleon-045		Pangkalan PSDKP Lampulo
2.	Sea Rider		Pangkalan PSDKP Lampulo
3.	Kapal Pengawas Napoleon-036		Satwas SDKP SDKP Sibolga
4.	Kapal Pengawas Kakap		Satwas SDKP Padang

No.	Nama <i>Speed Boat</i> Pengawas	Gambar	Lokasi
5.	Kapal Pengawas Dolphin ST. BL. 01		Satwas SDKP Bengkulu

Alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung tercapainya SS-8 sebesar Rp 293.823.000,00. Realisasi anggaran SS-8 sampai dengan bulan Desember tahun 2020 sebesar Rp 264.354.465,00 (89,97%), anggaran terserap secara efisien. Data realisasi anggaran diambil dari Aplikasi SAS.

Sasaran Strategis-9: Terselenggaranya Operasi Kapal Pengawas

Pencapaian Sasaran Strategis-9, diidentifikasi dalam 2 IKU, antara lain sebagai berikut:

IKU-9: “Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa di Laut Menggunakan Kapal Pengawas”

Kapal Pengawas pada saat melaksanakan operasi pengawasan di laut, melakukan pemeriksaan kapal perikanan yang tujuan untuk mencegah praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* di wilayah pengawasan Pangkalan PSDKP Lampulo. Kapal perikanan yang diperiksa meliputi Kapal Ikan Indonesia (KII) dan Kapal Ikan Asing (KIA), dengan objek pemeriksaan berupa kesesuaian dokumen, alat tangkap, hasil tangkapan, dan daerah penangkapan ikan. Kapal Pengawas di bawah Pangkalan PSDKP Lampulo adalah Kapal Pengawas Hiu-12 yang melaksanakan kegiatan pemeriksaan kapal perikanan di laut. Adapun capaian IKU-9, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.20. Hasil Capaian IKU “Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa di Laut Menggunakan Kapal Pengawas”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		CAPAIAN	PERSEN	s/d TW I	% TARGET TAHUNAN
	TAHUN	TW I				
Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa di Laut Menggunakan Kapal Pengawas	125	35	56	120%	56	62,2%
		TW II	CAPAIAN	PERSEN	s/d TW II	% TARGET TAHUNAN
		16	37	120%	93	103,3%
		TW III	CAPAIAN	PERSEN	s/d TW III	% TARGET TAHUNAN
		18	48	120%	141	112,8%
		TW IV	CAPAIAN	PERSEN	s/d TW IV	% TARGET TAHUNAN
56	61	108,93%	202	120%		

Target jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan kapal pengawas Pangkalan PSDKP Lampulo pada tahun 2020 adalah 125 unit kapal perikanan. Pada tahun 2020, jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut oleh Kapal Pengawas Hiu-12 sebanyak 202 unit, sehingga persentase capaian didapatkan sebesar 120%. Tingginya capaian disebabkan karena semakin bertambahnya pelaku usaha kapal perikanan, sehingga objek pengawasan semakin bertambah. Semakin banyak kapal perikanan yang diperiksa, maka upaya pencegahan *IUU Fishing* bisa lebih optimal dilaksanakan.

IKU-10: “Jumlah Hari Operasi Kapal Pengawas Lingkup Pangkalan PSKDP Lampulo”

Jumlah hari operasi kapal pengawas adalah akumulasi dari jumlah hari kapal pengawas dalam melaksanakan kegiatan operasi dalam satu tahun. Kapal Pengawas di bawah Pangkalan PSDKP Lampulo adalah Kapal Pengawas Hiu-12. Adapun hasil capaian dari IKU-12, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.21. Hasil Capaian IKU “Jumlah Hari Operasi Kapal Pengawas Lingkup Pangkalan PSKDP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2019		TARGET		CAPAIAN	PERSEN	s/d TW I	% TARGET TAHUNAN
	T	R	TAHUN	TW I				
Jumlah Hari Operasi Kapal Pengawas Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	90	120	125	35	41	117%	41	45,5%
				TW II	CAPAIAN	PERSEN	s/d TW II	% TARGET TAHUNAN
				10	25	120%	66	73,3%
				TW III	CAPAIAN	PERSEN	s/d TW III	% TARGET TAHUNAN
				30	34	113,3%	100	80%
				TW IV	CAPAIAN	PERSEN	s/d TW IV	% TARGET TAHUNAN
				50	25	50%	125	100%

Target jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo pada tahun 2020 adalah sebanyak 125 hari, telah tercapai sebanyak 125 hari, maka persentase realisasi capaian sebesar 100%. Dibandingkan dengan target pada tahun 2019, jumlah hari operasi mengalami peningkatan, begitu juga dengan capaiannya. Peningkatan realisasi hari operasi menunjukkan korelasi positif bagi operasional Kapal Pengawas yang melaksanakan kegiatan secara professional dan akuntabel.

Alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung tercapainya SS-9 sebesar Rp 5.423.108.000,00. Realisasi anggaran SS-9 sampai dengan bulan Desember tahun 2020 sebesar Rp 5.245.759.588,00 (96,73%), anggaran terserap secara efisien. Data realisasi anggaran diambil dari Aplikasi SAS.

Sasaran Strategis-10: Terselenggaranya Operasi *Speed Boat* Pengawas

Pencapaian Sasaran Strategis-10, didefinisikan dalam 2 IKU, antara lain sebagai berikut:

IKU-11: “Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa di Laut Menggunakan *Speed Boat* / *Rigid Inflatable Boat* / *Rubber Boat* Pengawas”

Jumlah hari operasi *speed boat* / *rigid inflatable boat* / *rubber boat* adalah akumulasi dari rata-rata jumlah hari *speed boat* / *rigid inflatable boat* / *rubber boat* dalam melaksanakan kegiatan operasi dalam satu tahun. *Speed Boat* Pengawas di bawah Pangkalan PSDKP Lampulo, antara lain: Kapal Pengawas Napoleon-045 dan Sea Rider yang dioperasikan oleh Pangkalan PSDKP Lampulo, Kapal Pengawas Napoleon-036 yang dioperasikan oleh Satwas SDKP Sibolga, Kapal Pengawas Kakap yang dioperasikan oleh Satwas SDKP Padang, dan Kapal Pengawas Dolphin ST. BL. 01 yang dioperasikan oleh Satwas SDKP Bengkulu. Adapun hasil capaian dari IKU-12, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.22. Hasil Capaian IKU “Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa di Laut Menggunakan *Speed Boat* / *Rigid Inflatable Boat* / *Rubber Boat* Pengawas”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		CAPAIAN	PERSEN	s/d TW I	% TARGET TAHUNAN
	TAHUN 2020	TW I				
Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa di Laut Menggunakan <i>Speed Boat</i> / <i>Rigid Inflatable Boat</i> / <i>Rubber Boat</i> Pengawas	75	5	40	120%	40	53,33%
		TW II	CAPAIAN	PERSEN	s/d TW II	% TARGET TAHUNAN
		5	45	120%	85	113,33%
		TW III	CAPAIAN	PERSEN	s/d TW III	% TARGET TAHUNAN
		32	150	120%	235	120%
		TW IV	CAPAIAN	PERSEN	s/d TW IV	% TARGET TAHUNAN
33	270	120%	505	120%		

Target jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan *Speed Boat* / *Rigid Inflatable Boat* / *Rubber Boat* Pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo tahun 2020 adalah sebanyak 75 unit per *speed boat* pengawas, merupakan akumulasi keseluruhan riksa kapal perikanan yang tercapai. Capaian dari riksa kapal perikanan di

laut dengan menggunakan armada *Speed Boat / Rigid Inflatable Boat / Rubber Boat* Pengawas sebanyak 505 unit, sehingga persentase capaian didapat sebesar 120%.

IKU-12: “Jumlah Hari Operasi *Speed Boat / Rigid Inflatable Boat / Rubber Boat* Pengawas Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Jumlah hari operasi *speed boat / rigid inflatable boat / rubber boat* adalah akumulasi dari rata-rata jumlah hari *speed boat / rigid inflatable boat / rubber boat* dalam melaksanakan kegiatan operasi dalam satu tahun. *Speed Boat* Pengawas di bawah Pangkalan PSDKP Lampulo, antara lain: Kapal Pengawas Napoleon-045 dan Sea Rider yang dioperasikan oleh Pangkalan PSDKP Lampulo, Kapal Pengawas Napoleon-036 yang dioperasikan oleh Satwas SDKP Sibolga, Kapal Pengawas Kakap yang dioperasikan oleh Satwas SDKP Padang, dan Kapal Pengawas Dolphin ST. BL. 01 yang dioperasikan oleh Satwas SDKP Bengkulu. Adapun hasil capaian dari IKU-12, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.23. Hasil Capaian IKU “Jumlah Hari Operasi *Speed Boat / Rigid Inflatable Boat / Rubber Boat* Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2019		2020		CAPAIAN	PERSEN	s/d TW I	% TARGET TAHUNAN
	T	R	T	TW I				
Jumlah Hari Operasi <i>Speed Boat / Rigid Inflatable Boat / Rubber Boat</i> Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	136	113	35	5	3	60%	3	8,57%
				TW II	CAPAIAN	PERSEN	s/d TW II	% TARGET TAHUNAN
				5	3,2	64%	6,2	17,7%
				TW III	CAPAIAN	PERSEN	s/d TW III	% TARGET TAHUNAN
				17	10,6	62,35%	16,8	48%
				TW IV	CAPAIAN	PERSEN	s/d TW IV	% TARGET TAHUNAN
8	18,6	120%	35,4	101,14%				

Target jumlah hari operasi *Speed Boat / Rigid Inflatable Boat / Rubber Boat* Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo pada tahun 2020 adalah sebanyak 35 hari operasi bagi masing-masing *Speed Boat / RIB* Pengawas. Metode penghitungan yang digunakan adalah dengan mengambil rata-rata jumlah hari operasi *Speed Boat / RIB* Pengawas. Jumlah total keseluruhan hari operasi dari kelima armada *Speed Boat / RIB* Pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo adalah sebanyak 177 hari, dibagi dengan 5 armada, sehingga diperoleh hasil 35,4 hari. Dari hasil tersebut, didapatkan persentase realisasi sebesar 101,14%. Dibandingkan dengan tahun 2019, terdapat perbedaan metode penghitungan

capaian jumlah hari operasi, yang mana pada tahun 2019 dengan mengakumulasi keseluruhan hari operasi pada semua Speed Boat / RIB lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo. Capaian tahun 2020, dibandingkan dengan capaian tahun 2019, mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2019 realisasi sebesar 83%, pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 101,14%. Peningkatan capaian dan realisasi didukung oleh adanya perawatan dan perbaikan yang lebih optimal pada *Speed Boat / RIB* sehingga kegiatan operasional *Speed Boat / RIB* dapat berjalan dengan baik, dan target dapat tercapai dengan optimal.

Alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung tercapainya SS-10 sebesar Rp 895.655.000,00. Realisasi anggaran SS-10 sampai dengan bulan Desember tahun 2020 sebesar Rp 594.027.563,00 (66,32%), anggaran terserap secara efisien. Data realisasi anggaran diambil dari Aplikasi SAS.

Sasaran Strategis-11: Terselenggaranya Awak Kapal Pengawas Perikanan yang Memenuhi Kualifikasi Kesehatan

Pencapaian Sasaran Strategis-11, diidentifikasi dalam 1 IKU, yaitu:

IKU-13: “Jumlah Awak Kapal Pengawas Perikanan yang Memperoleh Pemeriksaan Kesehatan Rutin Tahunan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Pemeriksaan kesehatan rutin adalah kegiatan setiap tahun yang dilakukan untuk mengetahui kesehatan setiap pegawai lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo, khususnya bagi Awak Kapal Pengawas agar tetap bugar dan sehat, baik keadaan fisik maupun mental melalui program *Medical Check Up*. Adapun hasil capaian IKU-13, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.24. Hasil Capaian IKU “Jumlah Awak Kapal Pengawas Perikanan yang Memperoleh Pemeriksaan Kesehatan Rutin Tahunan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		CAPAIAN	PERSEN
	TAHUN	TW I		
Jumlah Awak Kapal Pengawas Perikanan yang Memperoleh Pemeriksaan Kesehatan Rutin Tahunan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	13	-	-	-
		TW II	CAPAIAN	PERSEN
		-	-	-
		TW III	CAPAIAN	PERSEN
		-	-	-
		TW IV	CAPAIAN	PERSEN
		13	13	100%

Target jumlah awak kapal pengawas perikanan yang memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin tahunan lingkup Pangkalan PSKDP Lampulo sebanyak 13 orang, yang terdiri dari seluruh Awak Kapal Pengawas Hiu-12. Pelaksanaan *Medical Check Up* bagi Awak Kapal Pengawas Hiu-12 dilaksanakan pada bulan Oktober 2020, namun karena metode penghitungan dilaksanakan di akhir tahun, maka capaian ditampilkan di akhir tahun. Capaian jumlah awak kapal pengawas yang memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin tahunan sebanyak 13 orang, maka persentase realisasi capaian sebesar 100%. Penyerapan anggaran tergolong rendah, karena terjadi pengalihan anggaran menjadi Rapid Test saat pandemi Covid-19 bagi Awak Kapal Pengawas. Kegiatan *Medical Check Up* ke-tigabelas Awak Kapal Pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo sepenuhnya ditanggung oleh Direktorat Pemantauan Operasi dan Armada.

Alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung tercapainya SS-11 sebesar Rp 17.550.000,00. Realisasi anggaran SS-11 sampai dengan bulan Desember tahun 2020 sebesar Rp 5.775.000,00 (32,91%), anggaran terserap secara efisien. Data realisasi anggaran diambil dari Aplikasi SAS.

Sasaran Strategis-12: Terselenggaranya Penyidikan TPKP

Pencapaian Sasaran Strategis-12, diidentifikasi dalam 1 IKU, yaitu:

IKU-14: “Persentase Penyelesaian Administrasi Penyidikan, Pemanggilan, dan Pemeriksaan Tersangka serta Saksi TPKP Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

IKU “Persentase Penyelesaian Administrasi Penyidikan, Pemanggilan, dan Pemeriksaan Tersangka serta Saksi TPKP Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” digunakan untuk mengukur efektivitas penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan secara akuntabel. Target persentase penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan adalah 100% yang dihitung dari rata-rata 2 (dua) indikator, yaitu persentase penyelesaian administrasi penyidikan, pemanggilan, dan pemeriksaan tersangka serta saksi yang diproses hukum hingga selesai (P-21) dan persentase kasus Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) nasional yang terpantau dan dianalisis proses hukumnya. Hasil dua indikator tersebut kemudian dihitung nilai rata-rata untuk mencapai nilai indikator persentase Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan. Adapun capaian IKU-14, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.25. Hasil Capaian IKU “Persentase Penyelesaian Administrasi Penyidikan, Pemanggilan, dan Pemeriksaan Tersangka serta Saksi TPKP Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		CAPAIAN	PERSEN	s/d TW I	% TARGET TAHUNAN
	TAHUN 2020	TW I				
Persentase Penyelesaian Administrasi Penyidikan, Pemanggilan, dan Pemeriksaan Tersangka serta Saksi TPKP Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		TW II	CAPAIAN	PERSEN	s/d TW II	% TARGET TAHUNAN
		100%	100%	100%	100%	100%
		TW III	CAPAIAN	PERSEN	s/d TW III	% TARGET TAHUNAN
		100%	100%	100%	100%	100%
		TW IV	CAPAIAN	PERSEN	s/d TW IV	% TARGET TAHUNAN
		100%	100%	100%	100%	100%

Pada tahun 2020, target IKU “Persentase Penyelesaian Administrasi Penyidikan, Pemanggilan dan Pemeriksaan Tersangka serta Saksi TPKP Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” adalah sebesar 100%. Pada tahun 2020, realisasi telah tercapai sebanyak 100%. Adapun rincian penyelesaian administrasi penyidikan, pemanggilan, dan pemeriksaan tersangka serta saksi TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.26. Penyelesaian Administrasi Penyidikan Terhadap Kasus Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo

No	Tanggal Penangkapan	Nama Kapal	Nama Tersangka	Warga Negara	Bendera Kapal	Proses Hukum
1.	10 Maret 2020	KM. PKFB 776 GT. 54,28	NAI NYEIN CHAN alias SOE TIN	Myanmar	Malaysia	P-21
2.	10 Maret 2020	KM. PKFB 1099 GT. 49,69	THIT KO HTOO	Myanmar	Malaysia	P-21
3.	18 Juni 2020	KM. TANPA NAMA GT.3 (Warna Lambung Abu-Abu)	1. YAKINI GUNAWAN 2. HERMANSYAH 3. IKHSAN 4. DARWIS 5. SYAFARUDDIN	Indonesia	Indonesia	P-21

No	Tanggal Penangkapan	Nama Kapal	Nama Tersangka	Warga Negara	Bendera Kapal	Proses Hukum
4	18 Juni 2020	KM. TANPA NAMA GT.3 (Warna Lambung Abu-Abu)	1. M.RUSLAN 2. MUNTARAN	Indonesia	Indonesia	P-21

Alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung tercapainya SS-12 sebesar Rp 191.650.000,00. Realisasi anggaran SS-12 sampai dengan bulan Desember tahun 2020 sebesar Rp 191.056.199,00 (99,69%), anggaran terserap secara efisien. Data realisasi anggaran diambil dari Aplikasi SAS.

Sasaran Strategis-13: Terselenggaranya Penanganan Barbuk dan Awak Kapal

Pencapaian Sasaran Strategis-13, diidentifikasi dalam 2 IKU, yaitu:

IKU-15: “Persentase Penyelesaian Penanganan Barang Bukti Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Persentase penyelesaian penanganan barang bukti lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo merupakan persentase barang bukti yang selesai ditangani dan telah diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Penyerahan Tahap II. Adapun hasil capaian IKU-15, disajikan pada tabel berikut:





Tabel 3.27. Hasil Capaian IKU “Persentase Penyelesaian Penanganan Barang Bukti Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		CAPAIAN	PERSEN	s/d TW I	% TARGET TAHUNAN
	2020	TW I				
Persentase Penyelesaian Penanganan Barang Bukti Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	93%	93%	100%	100%	100%	107,53%
		TW II	CAPAIAN	PERSEN	s/d TW II	% TARGET TAHUNAN
		93%	100%	100%	100%	107,53%
		TW III	CAPAIAN	PERSEN	s/d TW III	% TARGET TAHUNAN
		93%	100%	100%	100%	107,53%
		TW IV	CAPAIAN	PERSEN	s/d TW IV	% TARGET TAHUNAN
93%	100%	100%	100%	107,53%		

Pada tahun 2020, IKU “Persentase Penyelesaian Penanganan Barang Bukti Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” ditentukan target sebesar 93%. Sampai dengan bulan Desember tahun 2020, telah tercapai sebesar 100%, maka diperoleh persentase

realisasi sebesar 107,53%. Adapun rincian kondisi barang bukti tindak pidana kelautan dan perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.28. Rincian Kondisi Barang Bukti pada Kasus Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo

No.	Foto Barang Bukti	Nama Kapal (GT)/Bendera/Alat Tangkap	Proses Hukum Saat Ini	Lokasi Barang Bukti	Kondisi Barang Bukti
1.		KM. PKFB 776 GT 54,28 Berkebangsaan MALAYSIA/ Alat Penangkap Jenis TRAWL	P-21	PELABUHAN KUALA LANGSA, KOTA LANGSA	Baik, Kapal Dikandaskan di Dermaga Pelabuhan Kuala Langsa
2.		KM. PKFB 1099 GT 49,69 Berkebangsaan MALAYSIA/ Alat Penangkap Jenis TRAWL	P-21	PELABUHAN KUALA LANGSA, KOTA LANGSA	Baik, Kapal Dikandaskan di Dermaga Pelabuhan Kuala Langsa
3.		KM. TANPA NAMA (warna lambung Abu-Abu) Berkembangsaan Indonesia (Aceh) Alat Tangkap Jaring Gilnet GT 3	P-21	ALKAP diamankan di kantor Pangkalan PSDKP Lampulo	Jaring Gillnet dan Alat Bantu Penangkapan Ikan berupa Kompresor
4.		KM. TANPA NAMA (warna lambung Abu-Abu) Berkembangsaan Indonesia (Aceh) Alat Tangkap Jaring Gilnet GT 3	P-21	ALKAP diamankan di kantor Pangkalan PSDKP Lampulo	Jaring Gillnet dan Alat Bantu Penangkapan Ikan berupa Kompresor

IKU-16: “Persentase Penyelesaian Penanganan Awak Kapal Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”


IKU “Persentase Penyelesaian Penanganan Awak Kapal Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” merupakan persentase awak kapal yang selesai ditangani dan sudah dipulangkan ke negara / daerah asal, atau sudah diserahkan ke pihak / instansi terkait. Adapun hasil capaian IKU-17 disajikan pada tabel berikut:




Tabel 3.29. Hasil Capaian IKU “Persentase Penyelesaian Penanganan Awak Kapal Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		CAPAIAN	PERSEN	s/d TW I	% TARGET TAHUNAN
	TAHUN	TW I				
Persentase Penyelesaian Penanganan Awak Kapal Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	93%	93%	100%	100%	100%	107,53%
		TW II	CAPAIAN	PERSEN	s/d TW II	% TARGET TAHUNAN
		93%	100%	100%	100%	107,53%
		TW III	CAPAIAN	PERSEN	s/d TW III	% TARGET TAHUNAN
		93%	100%	100%	100%	107,53%
		TW IV	CAPAIAN	PERSEN	s/d TW IV	% TARGET TAHUNAN
		93%	100%	100%	100%	107,53%

Pada tahun 2020, IKU “Persentase Penyelesaian Penanganan Awak Kapal Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” ditentukan target sebesar 93%. Sampai dengan bulan Desember 2020, capaian didapat sebesar 100%, maka diperoleh hasil persentase realisasi capaian sebesar 107,53%. Adapun informasi awak kapal pada kasus tindak pidana kelautan dan perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.30. Informasi Awak Kapal pada Kasus Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo

No.	Foto Barang Bukti	Nama Kapal (GT)/Bendera/Alat Tangkap	Jumlah ABK/ Kewarganegaraan	Nama Tersangka/ Kewarganegaraan	Proses Hukum Saat Ini	Lokasi Awak Kapal
1.		KM. PKFB 776 GT 54.28 Berkebangsaan MALAYSIA/ Alat Penangkap Jenis TRAWL	Berjumlah 5 (Lima) Orang Awak Kapal Berkewarganegaraan Myanmar, antara lain sebagai berikut: 1. AUNG THAT KHINE 2. MYINT AUNG 3. NAY LWIN 4. MYO SHWE OO 5. SAN WIN TUN	NAI NYEIN CHAN alias SOE TIN, Warga Negara Myanmar	P-21	Pangkalan PSDKP Lampulo

No.	Foto Barang Bukti	Nama Kapal (GT)/Bendera/Alat Tangkap	Jumlah ABK/ Kewarganegaraan	Nama Tersangka/ Kewarganegaraan	Proses Hukum Saat Ini	Lokasi Awak Kapal
2.		KM. PKFB 1099 GT 49,69 Berkebangsaan MALAYSIA/ Alat Penangkap Jenis TRAWL	Berjumlah 5 (Lima) Orang Awak Kapal Berkewarganegaraan Myanmar, antara lain sebagai berikut: 1. SAN YE OO 2. AUNG MYO OO 3. HTAW KYAING 4. AUNG KYAW NAING 5. NYAN TUN	THIT KO HTOO, Warga Negara Myanmar	P-21	Pangkalan PSDKP Lampulo
3.		KM. TANPA NAMA (warna lambung Abu-Abu) Berkembangsaan Indonesia (Aceh) Alat Tangkap Jaring Gilnet GT 3	5. YAKINI GUNAWAN 6. HERMANSYAH 7. IKHSAN 8. DARWIS SYAFARUDDIN	1. YAKINI GUNAWAN 2. HERMANSYAH 3. IKHSAN 4. DARWIS SYAFARUDDIN	P-21	Dirumahkan dengan tetap rutin melakukan pelaporan ke Pangkalan PSDKP Lampulo
4.		KM. TANPA NAMA (warna lambung Abu-Abu) Berkembangsaan Indonesia (Aceh) Alat Tangkap Jaring Gilnet GT 3	1. M.RUSLAN 2. MUNTARAN 3. SAIFUDDIN	1. M.RUSLAN 2. MUNTARAN	P-21	Dirumahkan dengan tetap rutin melakukan pelaporan ke Pangkalan PSDKP Lampulo

Alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung tercapainya SS-13 sebesar Rp 97.660.000,00. Realisasi anggaran SS-13 sampai dengan bulan Desember tahun 2020 sebesar Rp 97.176.000,00 (99,50%), anggaran terserap secara efisien. Data realisasi anggaran diambil dari Aplikasi SAS.

Sasaran Strategis-14: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo

Pencapaian Sasaran Strategis-14, diidentifikasi dalam 8 IK, antara lain sebagai berikut:

IKU-17: “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

IKU ini digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat selaku pengguna layanan penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan. Penghitungan dilakukan dengan cara melakukan penyebaran kuesioner survey kepuasan masyarakat.

Pada Tahun 2020, IKU “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan” ditentukan nilai indeks 80. Adapun hasil capaian IKU-17, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.31. Hasil Capaian IKU “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Surat Laik Operasi) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2020	HASIL SKM	CAPAIAN 2020	PERSEN
Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	80	Semester I	90,08	112,60%
		90,99		
		Triwulan III		
		90,17		
		Triwulan IV		
89,07				

Target nilai indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO, ditentukan sebesar 80. Adapun periode penilaian IKM pada tahun 2020 dilaksanakan sebanyak 3 kali, yaitu pada Semester I, Triwulan III, dan Triwulan IV. Nilai IKU-17, diambil dari rata-rata hasil penghitungan kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat, yang selanjutnya disebut dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan penerbitan SLO lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo pada Semester I, Triwulan III, dan Triwulan IV Tahun 2020, diperoleh nilai sebesar 90,08. Persentase realisasi capaian diperoleh sebesar 112,60%. Tercapainya nilai IKM, diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik oleh Pelayan Publik di lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo.

IKU-18: “Persentase Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen Satker Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Layanan dukungan manajemen Satker Pangkalan PSDKP Lampulo merupakan salah satu output dari Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pangkalan PSDKP Lampulo, yang terdiri dari 5 (lima) komponen yaitu :

- 1) Dukungan Penyusunan rencana program dan rencana anggaran;
- 2) Dukungan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi;
- 3) Dukungan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan;
- 4) Dukungan pengelolaan kepegawaian; dan
- 5) Dukungan pelayanan umum, pelayanan rumah tangga dan perlengkapan.

Pada Tahun 2020, IKU “Persentase Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen Satker Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” mendapatkan target sebesar 100%. Capaian kinerja diambil pada tahun 2020. Adapun informasi tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.32. Hasil Capaian IKU “Persentase Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen Satker Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2020	CAPAIAN	PERSEN
Persentase Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen Satker Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	100%	100%	100%

Target persentase pemenuhan layanan dukungan manajemen satker lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo pada tahun 2020 sebesar 100%, telah tercapai 100% sehingga diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 100%. Tercapainya nilai 100% dibuktikan dengan adanya pengumpulan dokumen Laporan Bulanan Pangkalan PSDKP Lampulo, Laporan Kinerja, RKA/KL, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Rekapitulasi Realisasi Gaji Pegawai, Realisasi Keuangan dari Aplikasi SAS, Laporan Keuangan, Laporan Kegiatan SDMA, Printscreen Aktivitas Operator SIMPEG, SKP Pegawai, dan Dokumen Kontrak Pembelian Barang.

IKU-19: “Persentase Pemenuhan Layanan Sarana dan Prasarana Internal Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Pemenuhan Layanan Sarana dan Prasarana Internal Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo merupakan salah satu *output* dari Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu:

- a.) Realisasi pengadaan kendaraan bermotor lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo;
- b.) Realisasi pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo; dan
- c.) Realisasi pengadaan peralatan fasilitas perkantoran lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo.

Pada tahun 2020, IKU “Persentase Pemenuhan Layanan Sarana dan Prasarana Internal lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” ditentukan target sebesar 100%. Capaian kinerja diambil pada tahun 2020. Adapun informasi tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.33. Hasil Capaian IKU “Persentase Pemenuhan Layanan Sarana dan Prasarana Internal Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2020	CAPAIAN	PERSEN
Persentase Pemenuhan Layanan Sarana dan Prasarana Internal Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	100%	100%	100%

Target persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana internal lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo pada tahun 2020 adalah sebesar 100%, telah tercapai sebesar 100%, maka diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 100%. Capaian tersebut dibuktikan dengan pengumpulan Laporan Keuangan dari Aplikasi SAS, Dokumen Pengadaan Barang kendaraan Bermotor, Dokumen Kontrak Pembelian Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, serta Dokumen Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran.

IKU-20: “Persentase Pemenuhan Layanan Perkantoran Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Pemenuhan Layanan Perkantoran Lingkup pangkalan PSDKP Lampulo merupakan salah satu *output* dari kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pangkalan PSDKP Lampulo, yang terdiri dari 2 (dua) komponen, yaitu:

- a.) Realisasi Gaji dan Tunjangan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo; dan
- b.) Realisasi Operasional dan Pemeliharaan Kantor Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo.

Pada Tahun 2020, IKU “Persentase Pemenuhan Layanan Perkantoran lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” ditentukan target sebesar 100%. Capaian kinerja diambil pada Triwulan IV tahun 2020. Adapun informasi tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.34. Hasil Capaian IKU “Persentase Pemenuhan Layanan Perkantoran Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Persentase Pemenuhan Layanan Perkantoran lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	100%	100%	100%

Target persentase pemenuhan layanan perkantoran lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo pada tahun 2020 adalah sebesar 100%, telah tercapai sebesar 100%, maka diperoleh hasil persentase realisasi capaian sebesar 100%. Capaian tersebut didukung dengan adanya Dokumen Rekapitulasi Realisasi Gaji Pegawai dan Dokumen Realisasi Keuangan dari Aplikasi SAS.

IKU-21: “Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin per masing-masing pegawai Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Adapun penjelasan terkait komponen Indeks Profesionalitas ASN, antara lain sebagai berikut:

- Kualifikasi, berkenaan dengan tingkat pendidikan ASN sesuai SK Pangkat terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di-*update* pada aplikasi *SIMPEG Online* KKP.

- Kompetensi, berkenaan dengan keikutsertaan ASN dalam Diklatpim (bagi Pejabat Eselon) serta Diklat Fungsional, Diklat 20 JP, atau Seminar (bagi ASN Non Eselon).
- Kinerja, berkenaan dengan hasil penilaian prestasi kerja ASN melalui aplikasi Penilaian Prestasi Kerja Onlie KKP yang dikolaborasikan dengan database kepegawaian (*SIMPEG Online KKP*).
- Disiplin, berkenaan dengan pernah atau tidaknya ASN dijatuhi hukuman disiplin.

Pada Tahun 2020, IKU “Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” ditentukan target dengan nilai indeks sebesar 72. Pengambilan data dengan konsolidasi nilai posisi akhir yang dilaksanakan pada Triwulan IV tahun 2020. Adapun informasi tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.35. Hasil Capaian IKU “Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	72	75,17	104,4%

Target nilai Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo pada tahun 2020 adalah 72, dengan perolehan capaian sebesar 75,17, maka persentase realisasi didapatkan sebesar 104%. Nilai Indeks Profesionalitas ASN dapat diakses melalui *website* www.ropeg.kkp.go.id.

IKU-22: “Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Rekonsiliasi adalah rangkaian catatan informasi yang menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan informasi. Rekonsiliasi kinerja merupakan sebetulnya verifikasi dalam bentuk proses pencocokan data kinerja dengan catatan informasi terkait pelaporan kinerja. Rekonsiliasi kinerja di lingkungan KKP dinilai dari 3 aspek yaitu:

- Aspek kepatuhan: dinilai dari kepatuhan penyiapan dan penyampaian dokumen oleh unit kerja
- Aspek kesesuaian: dinilai dari kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan
- Aspek ketercapaian: dinilai dari Pencapaian Kinerja unit kerja (NPSS pada aplikasi kinerjaku)

Rekonsiliasi Kinerja tahun 2020 dilaksanakan pada bulan November, namun capaian diambil di akhir tahun 2020. Adapun hasil capaian IKU-22, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.36. Hasil Capaian IKU “Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	90	68,97	76,63%

Target nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo pada tahun 2020 adalah 90, namun Pangkalan PSDKP Lampulo hanya mencapai 68,97, sehingga persentase realisasi capaian 76,63%. Pada IKU ini, target tidak dicapai dikarenakan pada saat dilaksanakan Rekonsiliasi Kinerja, pemeriksaan Laporan Kinerja Triwulan III tidak dapat disandingkan. Belum selesainya Laporan Kinerja Triwulan III diakibatkan karena Dokumen Perjanjian Kinerja (Revisi September), Manual IKU, Rincian Target IKU, Rencana Aksi, LCK, data Data Dukung belum terkumpul, sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III 2020 tidak terselesaikan, sehingga menyebabkan Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo rendah. Hal tersebut menjadi perhatian penting bagi Tim Monitoring dan Evaluasi lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo untuk memperbaiki kinerja, agar dapat menyelesaikan dokumen SAKIP dan laporannya secara professional dan akuntabel.

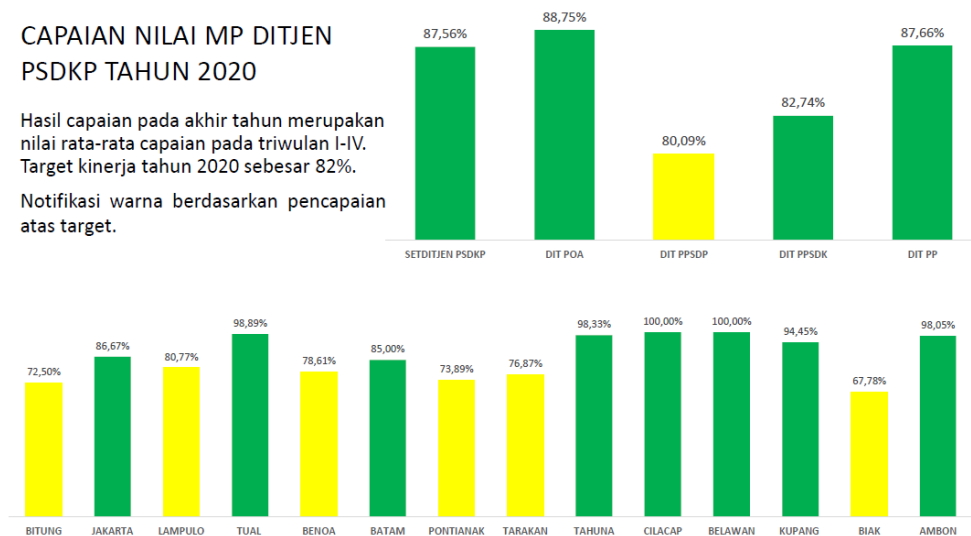
IKU-23: “Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah maupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui, dan dipelajari. Perhitungan penerapan manajemen pengetahuan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo dilakukan atas sharing dokumen mandatory, tingkat keikutsertaan pejabat dan staf, serta tingkat keaktifan unit kerja dalam SI-MP. Adapun hasil capaian IKU-23, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.37. Hasil Capaian IKU “Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		CAPAIAN		PERSEN
	TAHUN	TW I			
Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	82%	65%	68,89%	77,70%	94,76%
		TW II	CAPAIAN		
		70%	75,56%		
		TW III	CAPAIAN		
		75%	85,56%		
		TW IV	CAPAIAN		
82%	80,77%				

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2020, Pangkalan PSDKP Lampulo mendapatkan hasil capaian 80,77% dari target sebesar 82%. Adapun capaian pada tahun 2020 disajikan pada gambar berikut:



Gambar 2.2. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar

Perhitungan didasarkan oleh keaktifan Pejabat Struktural dan Pegawai Pangkalan PSDKP Lampulo pada Aplikasi *BITRIX24*. Metode penghitungan ini menggunakan Aplikasi *BITRIX24* yang merupakan aplikasi untuk mengukur Manajemen Pengetahuan yang mudah diterapkan dengan prinsip melihat seberapa banyak Unit Kerja yang menerima informasi yang disampaikan.

IKU-24: “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Nilai kinerja pelaksanaan anggaran adalah proses evaluasi dan *spending review* terhadap optimalisasi peran belanja Kementerian / Lembaga dalam rangka ketahanan fiskal dan ekonomi dengan berdasarkan 12 (dua belas) Indikator Pelaksanaan Anggaran, yaitu Revisi DIPA, Deviasi RPD, Pengelolaan UP, LPj Bendahara, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerapan Anggaran, Retur SP2D, Perencanaan Kas, Pengembalian SPM, Dispensasi SPM, dan Pagu Minus. Pada Tahun 2020, IKU “Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” ditentukan target dengan nilai 88 (Baik). Adapun informasi tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.38. Hasil Capaian IKU “Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	CAPAIAN		PERSEN
		TW I		
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	88	TW I	81,07	93,25%
		TW II	91,6	
		TW III	97,45	
		TW IV	82,06	

Berdasarkan tabel di atas, Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo pada tahun 2020 sebesar 82,06 dari target nilai 88. Persentase capaian kinerja sebesar 93,25%. Adapun rincian komponen Nilai IKPA, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.39. Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (Reaktivasi) Tahun 2020

Aspek	Keterangan	Nilai	Bobot	Nilai Akhir	Nilai Aspek
Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan	Revisi DIPA	100,00	0	0,00	99,99
	Deviasi Halaman III DIPA	52,56	0	0,00	
	Pagu Minus	99,99	5	5,00	
Kepatuhan Terhadap Regulasi	Data Kontrak	0,00	15	0,00	73,22
	Pengelolaan UP dan TUP	92,86	8	7,43	
	LPJ Bendahara	100,00	5	5,00	
	Dispensasi SPM	100,00	5	5,00	

Aspek	Keterangan	Nilai	Bobot	Nilai Akhir	Nilai Aspek
Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan	Penyerapan Anggaran	99,53	15	14,53	99,88
	Penyelesaian Tagihan	100,00	12	12,00	
	Konfirmasi Capaian Output	100,00	10	10,00	
	Retur SP2D	100,00	5	5,00	
Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan	Renkas	100,00	5	5,00	95,00
	Kesalahan SPM	90,00	5	4,50	
Nilai Total			Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total / Konversi Bobot)	
73,86			90%	82,06	

Alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung tercapainya SS-14 sebesar Rp 953.624.000,00. Realisasi anggaran SS-14 sampai dengan bulan Desember tahun 2020 sebesar Rp 925.906.882,00 (97,09%), anggaran terserap secara efisien. Data realisasi anggaran diambil dari Aplikasi SAS.

C. Akuntabilitas Keuangan

Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Pangkalan PSDKP Lampulo tahun 2020 mengalami revisi anggaran, dari yang semula sebesar Rp 25.931.557.000,00 (Dua Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah), setelah mengalami revisi anggaran menjadi Rp 19.685.586.000,00 (Sembilan Belas Miliar Enam ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah). Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, anggaran tersebut telah terserap sebesar Rp 18.618.013.434,00 atau bila dipersentasikan sebesar 94,58%. Data tersebut diambil dari Penyerapan Anggaran pada Aplikasi SAS. Rincian realisasi anggaran dan perkembangan realisasi anggaran sampai dengan bulan Desember tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.40. Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Lampulo Sampai Bulan Desember 2020

Kode	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2350	Pemantauan dan Operasi Armada	8.342.968.000,00	7.670.184.333,00	91,94%
2351	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	289.310.000,00	288.232.199,00	99,63%
2352	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	226.600.000,00	201.363.252,00	88,86%
2353	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	218.050.000,00	207.212.633,00	95,03%
2355	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP	10.608.658.000,00	10.251.021.017,00	96,63%
	Jumlah	19.685.586.000,00	18.618.013.434,00	94,58%

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat dari hasil Penyusunan Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2020, antara lain sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pangkalan PSDKP Lampulo berlandaskan kepada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan di dalam Renstra Ditjen. PSDKP, Renstra Pangkalan PSDKP Lampulo, dan Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal PSDKP (sebagai pemberi amanah) dengan Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo (sebagai penerima amanah) sebagai acuan dalam pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.
2. Sejalan dengan perkembangan kebijakan dan reformasi birokrasi di KKP, Ditjen. PSDKP telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), dimana UPT Pangkalan PSDKP Lampulo telah mengidentifikasikan 24 IKU yang melekat pada 14 (empat belas) Sasaran Strategis pada Perjanjian Kinerja (Revisi September) Tahun Anggaran 2020.
3. Laporan Kinerja (Laporan Kinerja) Tahun 2020 UPT Pangkalan PSDKP Lampulo memberikan gambaran terhadap capaian kinerja selama tahun 2020, sebagai bahan evaluasi dan rencana tindak lanjut dalam rangka pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (Revisi September) Tahun 2020.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas capaian kinerja Tahun 2020, sebagai upaya peningkatan kinerja berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

Tabel 4.1. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2020

No.	Hal yang Harus Diperbaiki	Rencana Tindak Lanjut
1.	Peningkatan monitoring dan evaluasi kinerja secara reguler (setiap triwulan, semester dan tahunan) serta tepat waktu dalam penyampaian laporan kinerja untuk dapat mengawal pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.	Perlunya supervisi dari pimpinan dalam rangka monitoring dan evaluasi pada setiap triwulan tahun 2021; Setiap Semester Tahun 2021; Akhir Tahun 2021.
2.	Persentase penyerapan anggaran UPT Pangkalan PSDKP Lampulo	Realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran diharapkan dapat sesuai dengan rencana aksi dan rencana penyerapan dana kegiatan Pangkalan PSDKP Lampulo dan percepatan kegiatan prioritas di Pangkalan PSDKP Lampulo. Perlunya peningkatan yang signifikan dalam penyerapan anggaran. Perlunya perencanaan yang lebih baik lagi dalam Penyusunan anggaran.
3.	Kompetensi dan Kualifikasi pada Indeks Profesionalitas ASN UPT Pangkalan PSDKP Lampulo	Perlu adanya lebih banyak usulan Diklat, <i>Workshop</i> dan Seminar bagi ASN Pangkalan PSDKP Lampulo. ASN diprioritaskan untuk mengikuti Diklat untuk meningkatkan SDM pada tahun 2021.
4.	Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	Perlu adanya peningkatan keaktifan pegawai yang terdaftar dalam BITRIX untuk berbagi informasi kegiatan pengawasan SDKP dengan kaidah 5W+1H.

LAMPIRAN

**PERJANJIAN
KINERJA
TAHUN 2020**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN LAMPULO**

Jl. Indra Budiman No. 12 Lampulo, Banda Aceh 23127
Telepon : (0651) 6303980, Fax (0651) 6303149
Email : psdkp.lampulo@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
PANGKALAN PENGAWASAN SDKP LAMPULO**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Basri**
Jabatan : Kepala Pangkalan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Lampulo

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**
Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan
dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, September 2020

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo

Basri

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
PANGKALAN PENGAWASAN SDKP LAMPULO**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terselenggaranya tindak lanjut atas laporan pengaduan Pokmaswas	1. Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	70
2.	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan	2. Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo [pelaku usaha]	21
3.	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan	3. Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	100
4.	Terselenggaranya Pemantauan SDKP menggunakan kapal pengawas	4. Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	1,34
5.	Terselenggaranya Pemantauan SDKP menggunakan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat	5. Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan Illegal Fishing melalui operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	0,064
6.	Terselenggaranya Pemantauan SDKP melalui Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP)	6. Persentase kesiapan sistem pemantauan SDKP (%)	70
7.	Terselenggaranya perawatan kapal pengawas	7. Jumlah kapal pengawas yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (unit)	1
8.	Terselenggaranya perawatan speedboat pengawas	8. Jumlah <i>speedboat</i> yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (unit)	5
9.	Terselenggaranya Operasi Kapal Pengawas	9. Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan kapal pengawas (unit)	125
		10. Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (hari operasi)	125
10.	Terselenggaranya Operasi speedboat Pengawas	11. Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan <i>speedboat</i> (unit)	75
		12. Jumlah hari operasi Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (hari operasi)	35
11.	Tersedianya awak kapal pengawas perikanan yang memenuhi kualifikasi kesehatan	13. Jumlah Awak Kapal Pengawas Perikanan yang memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin tahunan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (orang)	13

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
12.	Terselenggaranya Penyidikan TPKP	14. Persentase Penyelesaian administrasi penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka serta saksi TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	100
13.	Terselenggaranya Penanganan Barbuk dan Awak Kapal	15. Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	93
		16. Persentase Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	93
14.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan	17. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan Pangkalan PSDKP Lampulo [Indeks]	80
		18. Persentase pemenuhan layanan dukungan manajemen Satker lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	100
		19. Persentase pemenuhan layanan Sarana dan Prasarana Internal lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	100
		20. Persentase pemenuhan layanan perkantoran lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	100
		21. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo [Indeks]	72
		22. Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (nilai)	90
		23. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup [%]	82
		24. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	Baik [88]

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Pemantauan dan Operasi Armada	8.342.968.000
2.	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	289.310.000
3.	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	226.600.000
4.	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	218.050.000
5.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PSDKP	10.608.658.000
Total Anggaran Pangkalan Pengawasan SDKP Lampulo		19.685.586.000

Jakarta, September 2020

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo



Basri

**RENCANA
STRATEGIS
2020-2024**

**RENCANA STRATEGIS
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN
DAN PERIKANAN LAMPULO
2020 - 2024**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN LAMPULO
2020**



**RENCANA STRATEGIS
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN
DAN PERIKANAN LAMPULO
2020 - 2024**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN LAMPULO
2020**



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2. Kondisi Umum.....	5
1.3 Potensi dan Permasalahan	10
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN KEMENTERIAN/LEMBAGA.....	13
2.1 Visi dan Misi Kementerian/Lembaga	13
2.2 Visi, Misi dan Tujuan Pangkalan PSDKP Lampulo.....	14
2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis	14
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	16
3.1 Arah Kebijakan.....	16
3.2 Kerangka Regulasi dan kelembagaan.....	20
BAB IV INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	23
4.1 Target Kinerja	23
4.2 Kerangka Pendanaan	26
BAB V PENUTUP.....	27



Kata Pengantar

Renstra Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan tugas dan fungsi serta berdasarkan analisis lingkungan strategis, tantangan dan isu strategis pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan 5 (lima) tahun ke depan yang memuat analisis lingkungan strategis yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan serta target kinerja beserta kebutuhan pendanaan tahun 2020-2024.

Dengan ditetapkannya Renstra ini, maka harus menjadi pedoman bagi seluruh satuan kerja (Satker) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan serta melakukan evaluasi kinerja setiap tahun mulai tahun 2020 sampai 2024.

Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan Lampulo




Basri, A.Pi, M.Si

Nip. 19750713 199803 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 15 ayat (1) dan pasal 19 ayat (2), telah mengamanatkan kepada pimpinan Kementerian Negara/Lembaga untuk menyiapkan Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (Renstra K/L) sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang bersifat indikatif. Hal ini bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sehingga tercapai penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan berkeadilan. Sedangkan Rencana Strategis (Renstra) Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo Tahun 2020-2024 merupakan bagian integral dari Renstra Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo Tahun 2020-2024 yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Indonesia merupakan negara kepulauan jika dilihat berdasarkan Nawa Cita (Sembilan Agenda) dan strategi pembangunan nasional pada RPJMN 2020-2024, urusan kelautan dan perikanan memiliki kaitan erat dengan salah satu dari 3 Dimensi Pembangunan Nasional, yaitu: Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan yang merupakan penjabaran dari Nawa Cita Pertama: Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara; Nawa Cita Keempat: Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; serta Nawa Cita Keenam: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Sedangkan bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berkaitan erat dengan Nawa Cita Pertama dan Keempat.

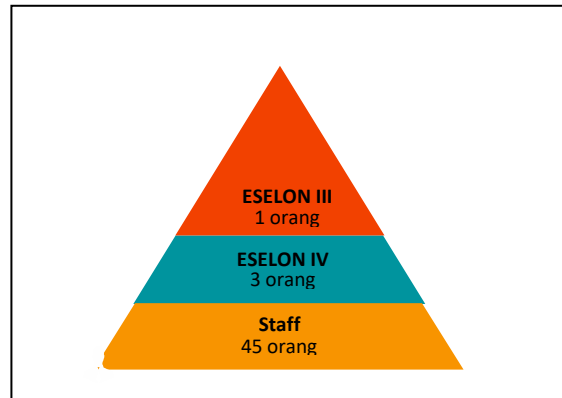
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau di Indonesia kurang lebih 17.504, dan yang sudah dibakukan dan didaftarkan ke PBB sejumlah 16.056 pulau. Luas perairan Indonesia adalah 6,4 juta km² yang terdiri dari luas laut teritorial 0,29 juta km², luas perairan pedalaman dan perairan kepulauan 3,11 juta km², dan luas ZEE Indonesia 3,00 juta km². Selain itu Indonesia memiliki luas Zona Tambahan perairan 0,27 juta km², luas landas kontinen 2,8 juta km² dan panjang garis pantai 108.000 km (Kemenko Maritim, 2018) sebagaimana Gambar 1.

Sebagai salah satu negara maritim terbesar di dunia, Indonesia memiliki kekayaan alam sangat besar dan beragam, baik berupa SDA terbarukan (perikanan, terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove, rumput laut, dan produk bioteknologi), SDA tak terbarukan (minyak, gas bumi, timah, bijih besi, bauksit, dan mineral lainnya), energi kelautan (seperti pasang-surut, gelombang, angin, OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion), maupun jasa-jasa lingkungan kelautan dan pulau-pulau kecil untuk pariwisata bahari, transportasi laut, dan sumber keragaman hayati serta plasma nutfah. Kekayaan alam tersebut menjadi salah satu modal dasar yang harus dikelola dengan optimal untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Salah satu aspek pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan adalah "Pengawasan" yang memiliki peran utama dalam memastikan bahwa pemanfaatan atau eksploitasi sumber daya tersebut dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan tata kelola yang telah ditetapkan. Di samping itu, pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan juga berperan dalam mencegah terjadinya pencurian atau pemanfaatan secara illegal oleh pihak-pihak di luar pemangku kepentingan (stakeholders) kelautan dan perikanan Indonesia.



Gambar 1. Peta Perairan Indonesia

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan, Pangkalan PSDKP Lampulo, memiliki area pengawasan meliputi Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI 572) didukung oleh 90 (Sembilan puluh orang pegawai) yang terdiri dari 49 (Empat puluh Sembilan) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 41 (Empat puluh satu) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dari tingkat pejabat eselon III sampai dengan pelaksana/staf (Gambar 2). Jumlah ini tentu di luar ASN Daerah pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, terdapat 11 (Sebelas) ASN yang memiliki kewenangan khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Sedangkan pelaksana/staf terdiri dari: 15 (lima belas) JFT pengawas perikanan, 11 Awak Kapal Pengawas (AKP PNS) 2 Awak Kapal Pengawas (PPNPN), 30 (tiga puluh) Pejabat Fungsional Umum, dan 15 (lima belas) Pejabat Fungsional Tertentu.



Gambar 2. Komposisi ASN Pangkalan PSDKP Lampulo

Dari segi kuantitas, tentu jumlah tersebut masih jauh dari cukup untuk mengawasi pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di seluruh wilayah WPPNRI 572. Kemudian dalam hal kompetensi, pada dasarnya seluruh ASN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo telah memiliki kompetensi dasar sesuai dengan bidang kewenangannya masing-masing namun seiring dengan meningkatnya kompleksitas permasalahan dan tantangan di lingkungan strategis tentu peningkatan kompetensi ASN Pangkalan PSDKP Lampulo secara terus-menerus harus menjadi salah satu agenda utama sebagai modalitas yang menopang pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP.

Secara kelembagaan, Pangkalan PSDKP Lampulo memiliki 1 (satu) Kepala Pangkalan dan 3 (tiga) Kepala Seksi yang terdiri dari: Subag Tata Usaha, Seksi Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran, dan Seksi Sarana dan Prasarana. Satuan Pengawasan Pangkalan PSDKP Lampulo tersebar di sepanjang pantai barat Sumatera terdiri dari: Satuan Pengawasan SDKP Aceh Barat, Satuan Pengawasan SDKP Simeulue, Satuan Pengawasan SDKP Sibolga, Satuan Pengawasan SDKP Padang, dan Satuan Pengawasan SDKP Bengkulu.

Sarana dan prasarana Pangkalan PSDKP Lampulo terdiri dari 1 (satu) unit kapal pengawas perikanan dan 5 (lima) unit Speed Boat.

Distribusi kapal pengawas perikanan yaitu: 1 (satu) unit kapal pengawas Tipe C dioperasikan menyisir perairan WPPNRI 572, dan speed boat lebih kecil dioperasikan di 3 (tiga) Satwas dan UPT Pangkalan PSDKP Lampulo. Kemudian prasarana yang

sangat diandalkan dalam melakukan pemantauan kapal-kapal ikan adalah Pusat Pengendalian Regional Monitoring Center (RMC) yang berada di Satwas SDKP Sibolga. Pengoperasian Pusdal mengintegrasikan data dari Vessel Monitoring System (VMS), sehingga diperoleh informasi yang bermanfaat baik dalam hal pengambilan keputusan maupun dalam hal operasi pencegahan (intercept) oleh armada kapal pengawas.

1.2 Kondisi Umum

Pada periode Renstra Pangkalan PSDKP Lampulo tahun 2017-2019 sektor pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan memegang peranan strategis dalam mendukung 3 [tiga] pilar pembangunan kelautan dan perikanan khususnya dalam penegakan kedaulatan [soverignity] pembangunan kelautan dan perikanan dalam pemberantasan dan penanggulangan IUU Fishing.

Capaian utama program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2015-2019 merupakan pilar strategis yang menjadi fondasi untuk pelaksanaan program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan periode RPJMN ke-3 tahun 2017-2019, capaian-capaian tersebut sebagai berikut :

1. Peningkatan operasional pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan

- a. Pemantauan Kapal perikanan

Kebijakan pemantauan kapal perikanan diwajibkan bagi semua kapal perikanan yang berukuran di atas 30 GT, kapal perikanan tersebut dipasang transmitter VMS yang terintegrasi dengan pusat pemantauan kapal perikanan. Pemasangan transmitter online ini merupakan tools bagi pemerintah untuk mengontrol kegiatan/aktivitas kapal perikanan di laut agar sejalan dengan konsep pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab.

- b. Pengembangan sarana dan prasarana pengawasan

Salah satu kunci keberhasilan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan adalah tersedianya sarana dan prasarana pengawasan yang mencukupi, sampai

dengan tahun 2019 kinerja pengembangan sarana dan prasarana pengawasan yang dicapai sebagai berikut:

1) Armada Kapal Pengawas

Kapal pengawas merupakan sarana pengawasan yang berfungsi untuk pengawasan secara langsung di laut. Kapal pengawas harus mampu beroperasi pada rentang jarak (range) tertentu dan daya jelajah (endurance) pada rentang waktu tertentu disamping memiliki ketetapan deteksi, oleh gerak (manuver) serta strategi operasi mandiri.

2) Pembangunan Prasarana Pengawasan

Pembangunan prasarana pengawasan yang dilaksanakan sampai tahun 2019 yaitu pembangunan fasilitas sarana dan prasarana kantor UPT Pengawasan SDKP, pos pengawasan, ruang tahanan (detention center), mess ABK, mess operator dan prasarana pengawasan lainnya.

3) Sarana Pengawas perikanan

Pengadaan sarana pengawas perikanan sampai dengan tahun 2019 yaitu Pengadaan kendaraan roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua) sebagai sarana mobilisasi dan pelaksanaan tugas di lapangan.

2. Peningkatan Operasional Pengawasan sumber daya perikanan

1) Pengawasan Ketaatan Kapal Perikanan

Pengawasan ketaatan kapal perikanan bertujuan untuk memastikan bahwa kapal-kapal perikanan telah mentaati ketentuan peraturan dibidang penangkapan ikan. Pengawasan penangkapan ikan dilakukan sebagai upaya tindakan pencegahan [preventif] kegiatan penangkapan ikan illegal, kegiatan pengawasan tersebut dilakukan sebelum operasi penangkapan [before fishing], pada saat pendaratan [during landing] dan setelah pendaratan [post landing].

2) Pengawasan Usaha Budidaya Perikanan

Pengawasan usaha budidaya ikan bertujuan untuk memastikan bahwa usaha budidaya perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan di bidang perikanan. Hasil pengawasan usaha budidaya perikanan Pada tahun 2017 sebanyak 46 unit usaha

budidaya telah dilakukan verifikasi pengawasan, tahun 2018 sebanyak 25 unit usaha, dan tahun 2019 sebanyak 25 unit usaha, telah dilakukan verifikasi dan pengawasan.

3) Pengawasan usaha pengolahan dan pengangkutan, pemasaran Hasil Perikanan
Hasil pengawasan usaha pengolahan dan pengangkutan, pemasaran hasil perikanan pada tahun 2017 yaitu telah dilakukan verifikasi dan pengawasan usaha pengolahan dan pengangkutan, pemasaran hasil perikanan sebanyak 48 unit usaha, tahun 2018 difokuskan pada pengawasan Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala besar dan kecil sebanyak 23 unit, dan tahun 2019 difokuskan kembali pada pengawasan Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala besar dan kecil sebanyak 25 unit dari hasil pengawasan tersebut telah ditindaklanjuti dengan proses penegakan peraturan terkait dengan pelanggaran atas izin yang diberikan.

4) Pemberdayaan dan Pembinaan POKMASWAS

Dengan keterbatasan jumlah SDM pengawasan yang ada saat ini, melihat potensi partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan memberikan andil besar, hal tersebut mendorong Pangkalan PSDKP Lampulo untuk melakukan pemberdayaan seluruh lapisan masyarakat agar berpartisipasi dalam pengawasan SDKP. Upaya tersebut melalui peningkatan antusiasme masyarakat untuk membentuk Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dikembangkan melalui program Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (SISWASMAS).

Peran dan fungsi POKMASWAS selama ini cukup efektif untuk memberikan informasi yang akurat atas pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang disampaikan ke aparat penegak hukum. Sampai dengan tahun 2019 telah terbentuk sebanyak 119 kelompok, sebanyak 119 kelompok yang tersebar di seluruh lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo. Upaya yang dilakukan dalam rangka mengembangkan Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (SISWASMAS) yaitu melalui pemberian sarana dan prasarana kepada POKMASWAS, serta bimbingan teknis dan sosialisasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

3. Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan

1) Pengawasan ekosistem perairan dan kawasan konservasi perairan

Selama kurun waktu tahun 2017-2019 telah dilakukan pengawasan ekosistem perairan terkait dengan penggunaan bahan peledak dan beracun, potasium dan bahan berbahaya lainnya dalam kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan di WPPNRI 572. Hasil pengawasan ekosistem perairan dan kawasan konservasi perairan tahun 2017 - 2019 sebagai berikut:

2) Pengawasan Pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Hasil pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil diperoleh data dan informasi adanya tambang pasir besi, perubahan alih fungsi lahan mangrove menjadi pertambakan, penebangan mangrove, penambangan karang dan penambangan pasir besi yang menyebabkan sedimentasi dan kerusakan terhadap ekosistem perairan. Tindak lanjut dan rekomendasi hasil pengawasan tersebut telah disampaikan ke Instansi yang berwenang dan Pemerintah Daerah untuk ditindak lanjuti.

3) Pengawasan Jasa Kelautan dan Sumber Daya Non Hayati

Pengawasan jasa kelautan dan sumber daya non hayati meliputi pengawasan pemanfaatan pasir laut, aktivitas bahari dan sumber daya non hayati, serta pengawasan pengelolaan BMKT yang legal atau telah mendapat ijin dari pihak berwenang, pengawasan pengelolaan BMKT.

4. Peningkatan Operasional dan pemeliharaan kapal pengawas

a. Operasi penanggulangan IUU Fishing

Dalam periode tahun 2017-2019 telah dilakukan operasi penanggulangan IUU Fishing melalui kegiatan operasi kapal di laut. Tujuan operasi kapal pengawas yaitu memastikan bahwa selama kegiatan penangkapan ikan [while fishing] telah mematuhi [compliance] terhadap ketentuan dan perijinan yang diberikan serta mencegah dan menanggulangi kegiatan IUU Fishing.

b. Kerjasama operasi pengawasan

Selain operasi mandiri, Pangkalan PSDKP Lampulo melakukan kerjasama operasi pengawasan dengan instansi terkait yaitu TNI-AL, POLAIR, dan

BAKORKAMLA. Operasi tersebut dilakukan di perairan perbatasan ZEEI yang dianggap rawan pelanggaran.

c. Pembinaan dan pengembangan karier awak kapal pengawas

Pembinaan dan pengembangan karir awak kapal pengawas dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan kemampuan Awak Kapal Pengawas baik dasar atau lanjutan. Sejak tahun 2017 - 2019 Awak Kapal Pengawas yang telah diberikan pelatihan sebanyak 4 orang.

5. Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

Penanganan tindak pidana pelanggaran bertujuan untuk menegakkan atas pelanggaran dibidang kelautan dan perikanan, disamping itu penanganan pelanggaran dapat memberikan efek jera. Ruang lingkup penanganan pelanggaran yaitu sampai pada tahap P-21 [berkas dinyatakan lengkap].

Kebijakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka mewujudkan Indonesia bebas illegal fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan. Sejalan dengan kebijakan tersebut Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 /PERMEN-KP/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan maka Pangkalan PSDKP Lampulo memiliki tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelayanan penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan;
- b. Pelayanan penerbitan Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan (LVHPI).

Fungsi pelayanan tersebut tentu sejalan dengan persiapan sistem kinerja yang direncanakan dengan efektif seperti capaian kinerja tahun 2019 yang secara garis besar Pangkalan PSDKP Lampulo dapat memenuhi seluruh target yang ditetapkan dan mendapatkan notifikasi berwarna hijau.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori sangat baik dengan rata-rata capaian keseluruhan indikator sebesar 104,64%. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 1 Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP dicapai 110,00%;
2. Sasaran Strategis 2 Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan SDKP secara profesional dan partisipatif dicapai 110,91%;
3. Sasaran Strategis 3 Tersedianya infrastruktur pengawasan SDKP dan sistem informasi dan komunikasi pengawasan SDKP dicapai 100,00 %.
4. Sasaran Strategis 4 Terwujudnya ASN Pangkalan PSDKP Lampulo yang kompeten profesional dan berintegrasi dicapai 88,19 %
5. Sasaran Strategis 5 Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses dicapai 102,41%.
6. Sasaran Strategis 6 Terwujudnya birokrasi Pangkalan PSDKP Lampulo yang efektif efisien dan berorientasi pada layanan prima dicapai 102,38 %.
7. Sasaran Strategis 7 Terkelolanya anggaran Pangkalan PSDKP Lampulo secara efisien dan akuntabel dicapai 100,88 %.

Penyusunan rencana strategis Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2019 - 2024, mengacu kegiatan yang mendukung program prioritas nasional untuk penanggulangan Illegal, Unregulated and Unreported Fishing .

1.3 Potensi dan Permasalahan

Sebagai gambaran umum bahwa meskipun KKP sejak lahirnya pada tahun 2000 senantiasa memiliki komitmen yang kuat dalam pemberantasan IUU fishing namun praktik-praktik ini masih marak terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) baik dalam bentuk pencurian ikan oleh kapal-kapal perikanan asing (KIA) maupun penangkapan ikan dengan cara merusak (destructive

fishing) dan tidak sesuai ketentuan oleh kapal-kapal perikanan Indonesia (KII) ditambah lagi dengan kompleksitas pemanfaatan sumber daya kelautan yang memberi dampak eksternalitas bagi sumber daya ikan dan lingkungannya. Hal ini tentu memberikan kerugian yang sangat nyata bagi Indonesia baik dalam aspek sosial, ekologi/lingkungan, maupun ekonomi.

Kerugian secara sosial tercermin dari masih sering terjadinya konflik horizontal antar nelayan di beberapa daerah, seperti: Lampung, Sumatera Utara, pantai selatan Jawa, pantai utara Jawa, perairan Masalembo, Bali, NTT, Jambi, dan beberapa daerah lain yang sebagian besar terkait dengan operasional nelayan andon. Upaya yang se lama ini dilakukan oleh aparaturng Pangkalan PSDKP Lampulo bersama pemerintah daerah dengan melibatkan tokoh masyarakat adalah melalui mediasi dan pendekatan persuasif.

Kerugian secara ekologi/lingkungan dari praktik IUU fishing dan kegiatan yang merusak adalah menurunnya potensi sumber daya ikan dan kualitas lingkungan sumber daya ikan. Belum ada perhitungan secara ilmiah terhadap kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya akibat praktik IUU fishing dan kegiatan yang merusak namun hal ini dapat dibuktikan secara terbalik bahwa ketika praktik-praktik tersebut ditekan dan dikendalikan maka terjadi kemelimpahan potensi sumber daya ikan. Laporan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) pada High Level Panel (HPL) for Sustainable Ocean Economy-Regional Sherpas Meeting tahun 2019 di Canberra, Australia menyatakan bahwa Stok Ikan Indonesia sebesar 7,3 juta ton pada tahun 2015 meningkat menjadi 12,54 juta ton pada tahun 2017 dan 13,1 juta ton pada tahun 2018 (news.kkp.go.id).

Selain itu masalah perbatasan laut merupakan salah satu kendala dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan mengingat kasus pencurian ikan masih marak terjadi di wilayah perairan perbatasan seperti, Laut Natuna sebelah utara, Laut Sulawesi sebelah utara, dan Selat Malaka yang masih terdapat unresolved area dengan negara tetangga. Hal ini menjadikan kasus perikanan di wilayah perbatasan akan terus menjadi tantangan tersendiri.

Seluruh potensi dijadikan modal untuk mendukung keberhasilan visi dan misi Pangkalan PSDKP Lampulo kedepan yang dalam penerapannya akan menemukan beberapa tantangan dan permasalahan diantaranya:

- Kegiatan IUU fishing oleh Kapal Ikan Asing [KIA] dan Kapal Ikan Indonesia [KII] yang masih banyak terjadi di wilayah perairan Indonesia;
- Usaha penangkapan budidaya perikanan tidak sesuai dengan ketentuan dan izin yang berlaku;
- Kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dengan cara merusak (destructive fishing);
- Pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan cara merusak dan tidak sesuai dengan ketentuan;
- Sumber daya manusia (SDM) pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan masih terbatas;
- Sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan masih terbatas;
- Tata kelola pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan belum optimal;
- Teknologi informasi dan komunikasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang terintegrasi belum tersedia;
- Penegakkan hukum (law enforcement) belum konsisten;
- Pemberdayaan PPNS Perikanan, Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K belum optimal.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN/LEMBAGA

2.1 Visi dan Misi Kementerian/Lembaga

Visi KKP 2020-2024 yang ditetapkan adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Dalam rangka mewujudkan Visi KKP 2020-2024 maka ditetapkan Visi Direktorat Jenderal PSDKP 2020-2024, yaitu: “Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab menuju terwujudnya visi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Misi KKP 2020-2024, yaitu:

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan;
- 2) Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
- 3) Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- 4) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan misi KKP 2020-2024 maka ditetapkan Misi Direktorat Jenderal PSDKP 2020-2024, adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi;
- 2) Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan;

- 3) Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggung jawab;
- 4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup Ditjen. PSDKP.

2.2. Visi, Misi, dan Tujuan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo

- Visi

Visi pembangunan Kelautan dan Perikanan Pangkalan PSDKP Lampulo 2020-2024 yaitu “Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP di WPPNRI 572 yang tertib dan bertanggung jawab menuju terwujudnya visi Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

- Misi

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang telah ditetapkan, maka dirumuskan Misi Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2020-2024 :

- Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi;
- Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan;
- Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggung jawab;
- Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo.

2.3 Tujuan, dan Sasaran Strategis Kegiatan

Sebagai penjabaran dari Visi Pangkalan PSDKP Lampulo maka dirumuskan beberapa Tujuan Pangkalan PSDKP Lampulo 2020-2024 yang dilengkapi dengan Sasaran Strategis berikut indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan bagian dari rumusan Tujuan pada Renstra Ditjen PSDKP tahun 2020-2024, yaitu:

- 1) Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional melalui pencapaian Sasaran Strategis Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Meningkat dengan indikator kinerja Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (IKMKP) dari 59,16 pada tahun 2020 menjadi 63,87 pada tahun 2024. Ditjen. PSDKP dan Pangkalan PSDKP Lampulo mendukung secara tidak langsung terhadap pencapaian IKU IKMKP melalui kontribusi data Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang aktif dalam mendukung pengawasan SDKP sebagai salah satu komponen pendukung pada formula perhitungan IKMKP, terutama pada aspek sosial-kelembagaan.
- 2) Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui pencapaian beberapa Sasaran Strategis, diantaranya:
 - a. Tata kelola SDKP bertanggung jawab dengan indikator kinerja Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan, dari 94% pada tahun 2020 menjadi 98% pada tahun 2024;
 - b. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Integratif dengan indikator kinerja:
 - c. Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing, dari 54,18% pada tahun 2020 menjadi 75% pada tahun 2024;
 - d. Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan, dengan target 93% dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
- 3) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP melalui pencapaian Sasaran Strategis Tatakelola Pemerintahan yang Baik dengan indikator kinerja berikut ini:
 - a. Nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP dari 80 pada tahun 2020 menjadi 85 pada tahun 2024; dan
 - b. Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KKP dari 88 pada tahun 2020 menjadi 90 pada tahun 2024.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan

3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pengawasan SDKP

Arah kebijakan dan strategi pada dasarnya merupakan hasil dari analisis potensi dan permasalahan sehingga diperoleh rumusan solusi yang penting, mendesak dan memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian Sasaran Nasional, Sasaran Strategis K/L, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan.

KKP telah merumuskan 5 (lima) Arah Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2020-2024 yang salah satunya diamanatkan kepada Ditjen. PSDKP dan diturunkan ke Pangkalan PSDKP Lampulo, yaitu: Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui koordinasi dengan instansi terkait. Di samping itu, terdapat pula arahan direktif Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Ditjen. PSDKP untuk terus menjadi garda terdepan dalam mengamankan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia melalui:

Penindakan tegas terhadap kapal perikanan asing (KIA) pelaku illegal fishing dan destructive fishing; dan

Pembinaan (penaatan) terhadap nelayan lokal.

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 dan arahan direktif Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut, maka dirumuskan arah kebijakan dan rincian strategi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2020-2024, sebagai berikut:

- Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, dengan cara:
 - Membangun budaya kerja Pangkalan PSDKP Lampulo;
 - Mengembangkan kompetensi SDM Aparatur Pangkalan PSDKP Lampulo;
 - Membangun pola karir PNS Pangkalan PSDKP Lampulo;
 - Meningkatkan jumlah dan sebaran SDM Aparatur Pangkalan PSDKP Lampulo.

- Peningkatan kapasitas teknologi pemantauan, sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP, dengan cara:
 - Membangun sarana pengawasan;
 - Membangun prasarana pengawasan yang memadai;
 - Meningkatkan pemeliharaan kapal pengawas agar siap operasional;
 - Mengembangkan kelembagaan pengawasan.
- Penguatan sinergi dengan penegak hukum (TNI AL, POLRI, Bakamla dan Instansi terkait lainnya), dengan cara:
 - Operasi bersama pengawasan di laut dan di darat (TNI AL, POLRI, Bakamla, Bea Cukai, KLHK);
 - Pertukaran data/informasi (intelijen, operasi);
 - Penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;
 - Peningkatan kapasitas SDM Pengawasan;
 - Forum koordinasi tindak pidana perikanan (TNI AL, POLRI, Bakamla dan Kejaksaan Agung).
- Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan, dengan cara:
 - Memperkuat sinergitas dan harmonisasi pengawasan SDKP dengan Pemerintah Daerah serta lintas sektor di tingkat Pusat;
 - Memelihara komitmen bersama dengan lembaga internasional dan regional dalam pemberantasan IUU fishing;
 - Menjalankan alur pendekatan pengawasan secara komprehensif, yakni: pencegahan (preventif), pembinaan, penegakan hukum dengan pendekatan sanksi pidana sebagai pilihan terakhir (ultimum remedium);
 - Menerapkan metode auditing dalam pengawasan SDKP yang mengedepankan upaya perbaikan berkelanjutan terhadap temuan ketidaksesuaian bagi para pelaku usaha kelautan dan perikanan.

- Peningkatan kesadartahuan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP, dengan cara:
- Meningkatkan kesadartahuan masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab;
- Pemberian pemahaman kepada nelayan untuk tidak melintas batas ke perairan negara lain ;
- Optimalisasi peran serta masyarakat dalam mendukung pengawasan SDKP melalui POKMASWAS;
- Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pokmaswas yang berkontribusi besar.

3.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian/Lembaga

Pengarusutamaan (*mainstreaming*) di dalam dokumen Renstra Pangkalan PSDKP Lampulo 2020-2024 merupakan suatu bentuk upaya inovatif-adaptif di dalam penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menjadi katalis untuk mempercepat pencapaian target sekaligus memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Dengan berpedoman pada RPJMN 2020-2024, terdapat 4 (empat) pengarusutamaan, yaitu:

1) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pangkalan PSDKP Lampulo senantiasa berkomitmen dalam agenda memerangi IUU fishing sambil terus mengembangkan secara simultan indikator-indikator yang esensial dan operasional di lapangan. Berkaitan dengan indikator persentase kepatuhan pelaku usaha dan perikanan yang sudah tercantum baik di dalam RPJMN 2020-2024 maupun Renstra KKP 2020-2024, Pangkalan PSDKP Lampulo akan mengadopsi langsung sebagai indikator kinerja utama pada level program yang secara simultan terus melakukan pengembangan dalam hal metode pemeriksaan kepatuhan maupun metode pengukurannya sehingga dapat menggambarkan kondisi kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang sebenarnya.

2) Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor dalam pembangunan, melalui strategi meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan kelautan dan perikanan khususnya di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

3) Pendekatan Sosial Budaya

Pendekatan sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (local knowledge), kearifan lokal (local wisdom), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial-budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa.

Pembangunan kebudayaan ingin memastikan bahwa setiap individu maupun kelompok memperoleh perlindungan hak kebudayaan dan kebebasan berekspresi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif. Peningkatan pembangunan inklusif dan berwawasan budaya lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo, diantaranya adalah (1) Pelaksanaan penyadartahuan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab senantiasa memperhatikan nilai budaya, kearifan lokal dan keragaman SDA hayati, (2), Penumbuhan partisipasi masyarakat dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara inklusif dan terbuka (3) Pengembangan dan penguatan budaya kerja serta budaya organisasi lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo dilakukan secara kolektif, adaptif, dan inovatif menggunakan berbagai pendekatan yang efektif dalam menjawab tantangan kompleksitas permasalahan pada lingkungan strategis.

4) Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan

transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (supply), pemanfaatan (demand) dan pengelolaan big data.

Optimalisasi teknologi digital sebagai salah satu arus utama pada lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo dilakukan melalui: (1) Optimalisasi peranan Regional Monitoring Center (RMC) Pangkalan PSDKP Lampulo dalam mengintegrasikan berbagai teknologi pemantauan jarak jauh terhadap seluruh aktivitas pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menghasilkan informasi yang cepat dan akurat dalam mendukung setiap operasi pengawasan, (2) Pengembangan sistem pengelolaan data pengawasan sumber daya kelautan berbasis digital, (3) Pemanfaatan Information Technology Forensic (teknologi forensik digital) dan intelegent open source untuk pengembangan kasus tindak pidana kelautan dan perikanan (TPKP).

3.2 Kerangka Regulasi dan Kelembagaan

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan strategi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2020-2024, diperlukan kerangka regulasi yang merupakan perencanaan pembentukan regulasi untuk memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara.

Bahwa penyusunan program peraturan perundang-undangan di lingkungan KKP disusun berdasarkan program tahunan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri KP, selain itu penyusunan peraturan didasarkan pada kebutuhan strategis KKP dalam rangka pelaksanaan visi dan misi presiden 2020-2024 khususnya di sektor kelautan dan perikanan.

Untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang transparan, akuntabel, dan implementatif, maka diperlukan masukan dari masyarakat, pemangku kepentingan, pemerintah, dan/atau pemerintah daerah. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut diperlukan uji publik atau konsultasi yang dalam hal ini dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan melibatkan para pakar yang tergabung dalam Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan.

Adapun mekanisme pelaksanaan dari konsultasi publik atau uji publik tersebut, yaitu setiap rancangan peraturan perundang-undangan yang berdampak kepada

masyarakat/publik terlebih dahulu harus disampaikan ke publik guna mendapatkan masukan/tanggapan.

Dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah, maka:

- a. dalam hal kebijakan berpotensi pada aspek perekonomian dan aspek penciptaan lapangan kerja, maka Kepala Pangkalan menyampaikan kebijakan tersebut kepada Direktur Jenderal PSDKP untuk mendapatkan pertimbangan sebelum kebijakan tersebut ditetapkan;
- b. dalam hal kebijakan berpotensi pada disharmonisasi kewenangan dan berpotensi pada tidak terlaksananya tugas dan fungsi kementerian/lembaga, maka menteri menyampaikan kebijakan tersebut secara tertulis kepada Direktur Jenderal PSDKP yang lingkup koordinasinya terkait dengan kebijakan tersebut untuk dibahas dalam Rapat Koordinasi guna mendapatkan kesepakatan; dan
- c. dalam hal kebijakan berpotensi pada stabilitas nasional, Kepala Pangkalan menyampaikan rencana kebijakan tersebut secara tertulis kepada Direktur Jenderal PSDKP guna mendapatkan keputusan.

Kerangka kelembagaan yang dimaksud merupakan perangkat Pangkalan PSDKP Lampulo (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara) yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan tugas dan fungsi Pangkalan PSDKP Lampulo yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN 2020-2024, Renstra KKP 2020-2024, dan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024.

Penataan kelembagaan Pangkalan PSDKP Lampulo akan disesuaikan dengan arahan Presiden terkait transformasi jabatan struktural ke jabatan fungsional. Penataan kelembagaan Pangkalan PSDKP Lampulo selanjutnya akan menyesuaikan dengan rencana redesign nomenklatur program dan kegiatan yang diinisiasi oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

Kerangka kelembagaan dalam Renstra Pangkalan PSDKP Lampulo tahun 2020-2024 difokuskan untuk melaksanakan program/kegiatan bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Kelembagaan yang dikembangkan dalam Renstra Pangkalan PSDKP Lampulo 2020-2024 harus tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses yang menekankan nilai *structure follow strategy*, dan diharapkan akan mendorong efektivitas kelembagaan yang sejalan dengan arah pembangunan. Adapun urgensi kerangka kelembagaan dalam dokumen perencanaan, diantaranya adalah mengarahkan penataan organisasi pemerintah sejalan dan mendukung pencapaian pembangunan serta mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi.

BAB IV

INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

SASARAN STRATEGIS [SS] DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA [IKU]		TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
SS 1. Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat						
1	Persentase tindak lanjut informasi pokmaswas lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	70				
SS 2. Terselenggaranya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan						
2	Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo [pelaku usaha]	21				
3	Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	100				
SS 3. Terselenggaranya Pemantauan SDKP						
4	Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	0,72				
5	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan Illegal Fishing melalui operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP	0.06				

	Lampulo (%)					
6	Persentase kesiapan sistem pemantauan SDKP (%)	70				
SS 4. Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP						
7	Jumlah kapal pengawas yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (unit)	1				
8	Jumlah speedboat yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (unit)	5				
SS 5. Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP						
9	Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan kapal pengawas (unit)	90				
10	Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan speedboat (unit)	75				
11	Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (hari operasi)	90				
12	Jumlah hari operasi Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (hari operasi)	35				
13	Jumlah Awak Kapal Pengawas Perikanan yang memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin tahunan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (orang)	13				

SS 6. Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan						
14	Persentase Penyelesaian administrasi penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka serta saksi TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	100				
15	Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	93				
16	Persentase Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	93				
SS 7. Tata kelola pemerintahan yang baik						
17	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo [Indeks]	72				
18	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup [%]	82				
19	Persentase Pemenuhan dokumen RB lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo [%]	100				
20	Persentase Pemenuhan dokumen SPIP lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo [%]	100				
21	Persentase Pemenuhan dokumen AKIP lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo [%]	100				

22	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan [Indeks]	80				
23	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	88				
24	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Pangkalan PSDKP Lampulo dibandingkan Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Lampulo TA. 2019 [%]	1				
25	Persentase pemenuhan layanan dukungan manajemen Satker lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo [%]	100				
26	Persentase pemenuhan layanan Sarana dan Prasarana Internal lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo [%]	100				
27	Persentase pemenuhan layanan perkantoran lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo [%]	100				

4.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan pembangunan kelautan dan perikanan yang kaitannya dengan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Pangkalan PSDKP Lampulo bersumber dari dana APBN yang direncanakan dengan mempertimbangkan luasan wilayah kerja dan beban kerja pengawasan SDKP yang ada dilapangan dan mengacu pada program kerja yang mendukung visi dan misi Kementerian/Lembaga.

BAB V

PENUTUP

Rencana strategis Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2020 - 2024 merupakan acuan bagi seluruh satuan pengawasan dan wilker pengawasan SDKP di lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya, terutama dalam mendukung sasaran strategis Direktorat Jenderal PSDKP sehingga tercapai visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 - 2024. Reviu Rencana strategis dilakukan setiap tahun dalam rangka menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra. Hasil reviu Renstra ini adalah hasil perubahan Renstra yang telah ditetapkan sebelumnya, yang disusun dengan mempertimbangkan penetapan kinerja Ditjen PSDKP. Perubahan-perubahan yang terjadi pada Renstra dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa merubah sasaran kinerja agar tetap memiliki relevansi sebagai dokumen acuan pelaksanaan program pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2020-2024. Keberhasilan pencapaian Renstra (Rencana Strategis) Pangkalan PSDKP Lampulo tahun 2020-2024 memerlukan komitmen dan kerja keras semua pihak, baik Satwas maupun Wilker lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo.

Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo



Basri, A.Pi, M.Si

Nip. 19750713 199803 1 003